

MOESLIMCHOICE

HARGA RP. 125.000,-

BIAYA
HAJI 2026
DISEPAKATI

DARI IES FORUM &
EXPO 2025
DI MATARAM

SUMSEL
RANKING 2 NASIONAL
PENDIDIKAN
PESANTREN

90 JUTA
PELUANG KERJA
TERKAIT
KECERDASAN
BUATAN

**SATU TAHUN
PRABOWO
SUDAH 80%
JALANKAN
AMANAHNYA**



MOESLIM^{CHOICE}.COM

PORTAL NEWS



ALAMAT REDAKSI/IKLAN
PT. Inter Media Digital
Jalan Raya Kalibata No. 8,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750
Telepon : (021) 791 96781
FAX : (021) 791 96786

EMAIL :
moeslimchoice@gmail.com

FACEBOOK :
[moeslimchoice](https://www.facebook.com/moeslimchoice)

TWITTER :
[@moeslimchoice](https://twitter.com/moeslimchoice)
you tube channel:
[moeslimchoice tv](https://www.youtube.com/moeslimchoice)

MCTV
MOESLIMCHOICE.TV

MOESLIM^{CHOICE}
M A G A Z I N E

moeslimchoice.com

PENANGGUNG JAWAB

H. Usman Rizal

DIREKTUR

HM. Kamel Fahresy SH

PEMIMPIN REDAKSI

Gunawan Effendi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Hj. Melati Tagore

REDAKTUR PELAKSANA

Rahmat Romli

SEKRETARIS REDAKSI

Niken Rizky Apriandani

REDAKTURIrmayani, Rosyidah Rozali,
Fahmi Jamba, M. Rahmat,
M. Husnie**REDAKTUR BISNIS**.H. M Firmansyah
Muhammad Rizky,
Muhammad Raden Solehin**REPORTER**Mario CH, Aldi Rinaldi,
M. Iqbal, Ida Iryani, M. Yadhi,
Muhammad Fiqri,
Muhammad Khaidir**KEPALA BIRO SUMSEL**

Rahmat Romli

FOTOGRAFER & VIDEOGRAFER

Al Amin

TATA LETAK/COVER

Kosasih Chiko

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Dra. Nur Khamidah

DIVISI PENGEMBANGAN IT

Irvan, Wahyu, M. Fikri

DISTRIBUSI

Itang AB, M. Isro

PERCETAKAN

PT. RESPATIH SAHABAT SEJATI

Isi di luar tanggung jawab
percetakan

>>SALAM REDAKSI

JUMADIL ULA

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saat November 2025 pada kalender gregorian bermula, kita berada di pertengahan Jumadil Ula atau Jumadil Awal 1447 hijriyah. Pada Jumadil Ula kita bertemu dengan asal kata jumud yang berarti beku. Dalam konteks iklim, Jumadil Ula adalah awal musim dingin yang akan berlanjut dan berakhir pada Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir.

Toh jumud juga berarti beku atau kaku terkait sikap dan pemikiran. Dalam Al Quran Surat Al Baqarah (2) ayat 170, tergambar sikap jumud kaum Quraisy dan Yahudi pada awal kedatangan Islam yang menjadi risalah Nabi Muhammad SAW: Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?".

Nah, perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) yang pesat tampak sebagai terobosan terhadap sikap jumud. Selintas contoh saja, semakin sulit menyembunyikan fakta sesungguhnya tentang Gaza, baik mengenai Israel maupun umat Islam Palestina. Juga perkembangan dari waktu ke waktu situasi di sana.

Pada titik inilah penting memahami algoritma, Al-Khwarizmi (ilmuwan yang bernama lengkap Abu Ja'far Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi). Al Khwarizmi, dalam versi Latin adalah Algorithmi. Ia menulis buku berjudul Al-Kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr wal-muqabala (Buku Ringkas tentang Kalkulasi dengan Melengkapkan dan Menyeimbangkan) yang menjadi cikal bakal aljabar (algebra) modern, berlanjut dengan perkembangan input dan output data komputer, hingga perkembangan mutakhir pemanfaatan algoritma yang menjadi inti kecerdasan imitasi atau buatan (artificial intelligence, AI) dalam berbagai bidang kehidupan manusia.

Algoritma memang inti dari AI. Contohnya, algoritma pembelajaran mesin digunakan untuk melatih sistem AI agar dapat mengenali pola, memprediksi hasil, dan membuat keputusan, seperti yang terjadi pada media sosial, sistem rekomendasi, maupun mesin pencari di internet.

Toh algoritma pula yang dapat memicu disrupsi (gangguan). Contohnya antara lain yang disebut sebagai gelembung penyaring (filter bubble) dan kamar gema (echo chamber): Disrupsi jenis ini menunjukkan algoritma mengenali kecenderungan perorangan (personalisasi) sehingga menjebakannya dalam gelembung informasi yang sesuai dengan pandangan pribadi saja. Alhasil potensi perpecahan (polarisasi) dan misinformasi (informasi keliru) dapat berkembang dari dunia maya hingga konflik di dunia nyata.

Belum lagi gangguan kesehatan mental perorangan akibat sajian informasi yang itu-itu saja lantaran bias rekayasa algoritma. Tak terkecuali kaitannya dengan sisi bisnis karena algoritma juga dapat menargetkan iklan berdasarkan data pengguna (lokasi, usia, gender, misalnya) dan mempengaruhi keputusan pembelian. ♦

>>COVER EDISI INI

**ALAMAT REDAKSI/IKLAN**PT. Inter Media Digital
Jalan Raya Kalibata No.
8, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12750Telepon : (021) 791 96781
FAX : (021) 791 96786**EMAIL :**

moeslimchoice@gmail.com

FACEBOOK :

moeslimchoice

TWITTER :

@moeslimchoice

YOU TUBE CHANNEL:

moeslimchoice TV

>>DAFTAR ISI



06



20



68



24

06

LAPORAN UTAMA

Setahun pemerintahan Prabowo dan Kabinet Merah Putih adalah awal transformasi bangsa. Makna ringkas transformasi adalah proses perubahan bentuk atau format menjadi lebih berkualitas. Apa saja yang layak menjadi catatan?

24

SUMSEL SYARIAH

Gubernur Dr Herman Deru SH MM menegaskan bahwa angka pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan (Sumsel) sebesar 5,42 persen merupakan capaian yang nyata, berkualitas, dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

20

EKONOMI SYARIAH

Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mendapat kehormatan sebagai tuan rumah Indonesia Ekonomi Syariah (IES) Forum dan Expo 2025. Gairah ekonomi syariah rupanya terus menyala di sana.

68

PARLEMEN

Penyelenggaraan Haji 2026 mulai menjadi pembahasan resmi Kementerian Haji dan Umrah dengan Komisi VIII DPR. Kementerian Haji mengusulkan penurunan biaya haji hingga Rp1 juta per jamaah. Wakil Rakyat ingin lebih dari itu.



44

KEMENAG

Bertepatan dengan peringatan Hari Santri 2025, Presiden RI, Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

58

BIROKRASI

Pemerintah RI terus memperkuat kolaborasi antara pusat dan daerah untuk mempercepat pemerataan ekonomi melalui koperasi dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

88

LAPORAN KHUSUS

"Alhamdulillah Sekolah Rakyat. Jadi, anak-anak yang putus sekolah, bisa sekolah. Anak-anak yang tadinya mungkin merasa rendah diri karena orang tuanya sangat susah hidupnya, kita tarik keluar. Kita beri lingkungan yang sebaik-baiknya supaya mereka percaya diri dan dia dapat pendidikan terbaik yang bisa kita berikan."
~Presiden Prabowo Subianto.

REGULER

- 3 | SALAM REDAKSI
- 34 | WISATA HALAL
- 50 | KTT ASEAN
- 52 | MUBA MAJU LEBIH CEPAT
- 72 | KAJIAN
- 80 | KESEHATAN
- 82 | RESENSI
- 84 | INSPIRATIF
- 86 | KOLOM 1
- 98 | KOLOM 2

22

SELEBRITI

Sejumlah selebriti Indonesia gagal menjalankan Rukun Islam kelima, yaitu menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci pada 2025 (1446 H). Mereka yang gagal menunaikan ibadah haji ini, rata-rata adalah mereka yang tercatat mendaftar melalui jalur haji furoda, skema haji non-kuota yang diberikan Arab Saudi melalui undangan khusus atau visa mujamalah.



Setahun Pemerintahan Prabowo

MAKAN BERGIZI GRATIS MENCAKUP 36 JUTA PENERIMA

Setahun pemerintahan Prabowo dan Kabinet Merah Putih adalah awal transformasi bangsa. Makna ringkas transformasi adalah proses perubahan bentuk atau format menjadi lebih berkualitas. Apa saja yang layak menjadi catatan?

Yang kerap menjadi pembahasan kritis sejauh ini adalah program makan bergizi gratis (MBG). Namun, masih jarang yang mengungkap mengapa MBG menjadi salah satu program prioritas pemerintah Prabowo Subianto.

Nah, informasi dari Badan Komunikasi Pemerintah mengemukakan, program MBG merupakan kebijakan mendesak untuk menjadi prioritas berdasarkan kondisi nyata anak-anak Indonesia yang pada saatnya akan menjadi sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Bagaimana kualitas anak-anak Indonesia sekarang?

Data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menunjukkan, pada 2023: tercatat 32 persen dari 44 juta anak Indonesia menderita anemia. Sekitar 41 persen dari 44 juta anak itu tidak sarapan sebelum berangkat ke sekolah, dan 58 persen dari 44 juta anak pola makannya tidak sehat. Dari data Kemenkes, angka prevalensi stunting beberapa tahun terakhir pun relatif stagnan di 21 persen.

Masih dari data kementerian PMK, sekitar 55,6 juta anak usia 7-18 tahun di Indonesia, terdapat 51 juta (91 persen) anak yang terdaftar di sekolah dan paling banyak adalah kelompok dari Sekolah Dasar, mencakup 52 persen. Berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia 2019, sebanyak 46,6 persen anak usia sekolah mengalami anemia.

Studi terbaru yang dilakukan oleh Badan Pangan Dunia (World Food Program) menemukan bahwa lebih dari separuh anak Sekolah Dasar yang disurvei melaporkan bahwa konsumsi makanan mereka berubah selama COVID-19, konsumsi makanan dan minuman yang kurang sehat di kalangan anak usia sekolah relatif tinggi, salah satunya yaitu mengalami kekurangan gizi makro dan mikro, serta masalah perilaku jajan yang berisiko tidak sehat. Jajanan tidak sehat banyak tersedia di sekitar sekolah sehingga anak-anak dapat membelinya dengan menggunakan uang jajan dari orang tua.

Pada gilirannya, status gizi anak sekolah berdampak pada kesehatan, kekurangan atau kelebihan gizi pada usia balita dan usia anak sekolah dapat menghambat perkembangan fisik dan kognitif anak. Perbaikan perilaku makan dan gaya hidup sehat melalui edukasi gizi di sekolah serta di tingkat masyarakat sangat penting untuk mengurangi permasalahan gizi dan untuk meningkatkan perilaku hidup sehat pada usia selanjutnya.

Maka, jadilah program MBG ini sebagai salah satu program prioritas pemerintahan. Dalam penerapan program, MBG juga terbukti mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan membantu keluarga miskin mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan akses kelompok rentan terhadap makanan berkualitas. Implementasi Kebijakan Kabinet Per 15 Agustus 2025 telah terbangun 5.800 Satuan Pelayanan

langsung, berdampak untuk 165 juta penerima manfaat tidak langsung (orang tua murid), dan menciptakan 2,2 juta lapangan kerja tetap baru. Setiap SPPG menciptakan 50 lapangan kerja tetap baru di dapur dan rantai pasok MBG, sehingga per 15 Agustus 2025 telah tercipta 290.000 lapangan kerja tetap baru, dan melibatkan 1 juta petani, nelayan dan UMKM.

Pemerintah menargetkan adanya



Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 Provinsi se-Indonesia yang melayani lebih dari 20 juta porsi MBG setiap hari.

Sedangkan Per 20 Oktober 2025 telah terbangun 12.508 SPPG di 38 Provinsi se-Indonesia yang melayani lebih dari 36,7 juta porsi MBG setiap hari. Setiap SPPG menciptakan 50 lapangan kerja tetap baru di dapur dan rantai pasok MBG, sehingga per pada saat yang sama telah tercipta 625.400 lapangan kerja tetap baru. Selain itu, 18.895 UMKM, Koperasi, BUMDes pun menjadi bagian dari ekosistem MBG.

Selanjutnya Pemerintah menargetkan 32.000 SPPG beroperasi di akhir 2025 untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat

32.000 SPPG di akhir 2025 untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat langsung, berdampak untuk 165 juta penerima manfaat tidak langsung (orang tua murid), dan menciptakan 2,2 juta lapangan kerja tetap baru. Terkait dengan itu, Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025.

Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG ini beranggotakan unsur kementerian dan lembaga lintas sektor, yang diatur dalam Pasal 6 Keppres 28/2025. Berikut susunan Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG bentukannya Prabowo:

Ketua: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

Wakil Ketua I: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno

Wakil Ketua II: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Abdul Muhaimin Iskandar.

Sekretaris: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kasan.

Anggota Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG:

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yu-

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.

Selain itu, Nanik S Deyang yang menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Harian tim tersebut.

Tugas dari Tim Koordinasi MBG tercakup dalam Keppres Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG. Keppres yang ditandatangani pada 24 Oktober 2025 oleh Prabowo ini mengatur pembentukan tim untuk memastikan program andalan

nyelenggaraan program di tingkat pusat dan daerah.

Selain itu, fungsi Tim Koordinasi MBG juga mencakup monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, menyelesaikan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program, serta merekomendasikan kebijakan kepada kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan program.

Presiden Prabowo Subianto pernah mengemukakan program MBG 99,99 persen berhasil. Angka ini merupakan perbandingan dari jumlah porsi yang telah dibagikan dengan jumlah kasus error (kesalahan). Menurut Presiden, MBG telah



dhi Sadewa

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono

Presiden tersebut berjalan efektif, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

"Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki tugas mendukung penyelenggaraan program makan bergizi gratis melalui sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan program makan bergizi gratis," bunyi Pasal 3 Keppres tersebut, diakses Kompas.com pada Kamis (30/10/2025).

Sedangkan fungsi Tim Koordinasi MBG sebagaimana diatur dalam Pasal 4, meliputi penyusunan kebijakan penyelenggaraan program MBG. Lalu, melakukan sinkronisasi dan koordinasi dalam pe-

mendistribusikan 1,4 miliar menu kepada 36,2 juta penerima. Sementara jumlah yang keracunan mencapai sekitar 8.000 lebih.

Dalam sambutannya pada Sidang Senat Terbuka Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Sabtu, 18 Oktober 2025, Prabowo menyebut pencapaian tersebut sebagai tonggak besar dalam upaya meningkatkan gizi anak bangsa dan sekaligus menciptakan lapangan kerja luas di sektor pangan. "Hari ini Makan Bergizi sudah mencapai 36,2 juta penerima manfaat. Artinya, bangsa Indonesia, pemerintahmu sekarang, mampu memberi makan

kepada tujuh Singapura,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan hadirin.

Prabowo menjelaskan pelaksanaan program MBG melibatkan 12.205 dapur di seluruh Indonesia, dengan setiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang. Selain itu, masing-masing dapur memiliki sekitar 15 pemasok bahan pangan di tingkat desa, yang turut membuka lapangan kerja bagi petani dan pelaku UMKM lokal. “Ini prestasi yang tidak kecil. Program ini bahkan sudah menjadi pembicaraan di dunia internasional,” katanya.

Presiden mengungkapkan pula lembaga riset internasional Rockefeller Institute, yang telah lebih dari satu abad bergerak dalam bidang ketahanan pangan, mem-

kita mau zero error walaupun sangat sulit,” jelas Prabowo.

Untuk itu, ia sudah memerintahkan semua dapur umum untuk memiliki alat-alat yang terbaik. Lalu, membersihkan dan mencuci tangan sebelum menyajikan sebagai upaya penyempurnaan program. “Anak-anak sebelum makan cuci tangan yang benar, kalau perlu harus diajarkan bagaimana makan pakai sendok untuk mencegah. Kalau virus bakteri bisa dari mana saja, ini saya highlight ini, karena ini sangat penting,” ujar Prabowo.

Lebih dari itu, pemerintah juga tengah merumuskan susunan Peraturan Presiden (Perpres) Tata Kelola MBG. Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan

nya harus sempurna,” kata Zulhas usai rapat.

Selain itu dalam rapat juga dibahas mengenai Perpres mengenai struktur Organisasi dan Tata Kerja atau Kelembagaan Badan Gizi Nasional. Menurut Zulhas terkait hal ini masih ada satu hal lagi yang harus dibahas.

“Hanya ada tinggal satu lagi yang kami perlu waktu beberapa hari ini untuk mengurusnya. Insyaallah, Perpres struktur organisasi dan tata kerja kita akan selesai minggu depan,” katanya.

Nantinya setelah tim koordinasi sudah terbentuk, maka akan ditunjuk juga pelaksana harian yang akan melakukan monitor terhadap pelaksanaan pemberian MBG.



berikan apresiasi terhadap capaian Indonesia. “Mereka mengatakan, program yang sedang dijalankan Indonesia ini menjadi perhatian seluruh dunia. Saat kita mulai, baru 77 negara yang punya program serupa. Kita waktu itu negara ke-78 atau ke-79. Sekarang sudah ada 112 negara, dan sebagian besar ikut contoh kita,” ungkapnya.

Toh Prabowo juga menegaskan ingin menyempurnakan program ini. Ia tidak ingin ada satupun anak-anak yang sakit dan keracunan akibat mengonsumsi MBG. “Tapi kalau 1,4 miliar dibagi 8.000 (kasus), saya kira ini masih kalau dalam ilmu pengetahuan dalam sains ini masih dalam koridor katakanlah corridor of error, ya. Tapi

menggelar rapat terbatas terkait penyusunan Perpres tata kelola MBG, di Kantor Kemenko Pangan, di Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025.

Dari rapat itu ada tiga aturan yang dibahas bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, hingga Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Menurut Zulhas Perpres terkait tata kelola penyelenggaraan MBG sudah rampung dibahas. Dalam aturan itu membahas mengenai pengawasan penyaluran MBG maupun tata kelolanya.

“Kemudian juga disepakati hari ini Perpres Tata Kelola penyelenggaraan program MBG. Baik nanti penyelenggaraan-

Seperti realisasi target penerima, hingga permasalahan teknis yang terjadi di lapangan. Kalau belum mencapai 82,9 juta kenapa? kalau ada masalah dimana, karena nanti harian kita akan terus melakukan evaluasi agar program yang paling penting di pemerintah kita ini bisa terus selesai dengan baik,” katanya.

Jadi, untuk program MBG sebagai bagian dari transformasi bangsa, tata kelolanya pun akan bertransformasi pula. Jika menurut Presiden Prabowo MBG per Oktober 2025 sudah menjangkau delapan kali penduduk Singapura, maka target 82,9 juta penerima akan setara dengan lebih dari tiga kali lipat jumlah penduduk Australia. *Masya Allah...* ♦

Program Pembiayaan Perumahan

MENUJU 3 JUTA RUMAH

Program Makan Bergizi Gratis jelas urusan pangan. Untuk urusan papan, permukiman apa? Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) nama programnya. Lebih mudah menyebutnya Program 3 Juta Rumah.

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) berpijak pada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023. Data Susenas 2023 ini mengungkapkan sekitar 9,9 juta rumah tangga di Indonesia belum memiliki rumah sendiri. Selain itu, sekitar 26,9 juta rumah tangga belum memiliki rumah layak huni.

Nah ekspansi atau perluasan (FLPP) akan memungkinkan lebih banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat memiliki rumah layak dengan skema pembiayaan terjangkau, termasuk suku bunga rendah dan tenor (jangka waktu) panjang, sehingga meringankan beban rakyat. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pengentasan kemiskinan.

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program skema bantuan FLPP untuk mendukung tiga juta rumah murah pada 17 Februari 2025. Kuota awal FLPP

tahun 2025 adalah 220.000 unit, dengan alokasi dana Rp. 28,2 triliun., lalu naik jadi 350.000 unit rumah. Per awal Agustus 2025, realisasi KPR subsidi dengan skema FLPP berjumlah 147.000 unit rumah.

Perkembangan terbaru, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjalankan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, khususnya di sektor perumahan dan permukiman. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikannya usai dipanggil Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 28 Oktober 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Maruarar melaporkan sejumlah capaian strategis kementeriannya, antara lain realisasi serapan anggaran dan program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Yang pertama, kami laporkan bahwa serapan anggaran di tempat kami sampai hari ini sudah 70 persen. Yang kedua, kami sampai-



kan bahwa rumah subsidi juga dari kuotanya 350 ribu juga terserap cukup banyak, per hari ini sekitar 205 ribu. Yang ketiga, arahan Presiden untuk menjalankan kebijakan yang pro rakyat,” ujar Menteri Maruarar.

Lebih lanjut, Maruarar menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden, pemerintah telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sebelumnya dikenakan biaya. Selain itu, izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal sebagai IMB juga digratiskan bagi kelompok masyarakat tersebut.

“Kemudian, juga PBG-nya, persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, itu juga sudah gratis, itu berjalan, dan dimonitor, dibantu oleh Bapak Mendagri. Jadi para Bupati, Wali Kota juga menjalankan itu, dan sudah dijalankan itu,” jelas Maruarar.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar menambahkan bahwa bunga rumah subsidi tetap dijaga pada tingkat 5 persen, sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil di tengah kondisi ekonomi global yang dinamis. Selain rumah subsidi, pemerintah juga memperkuat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni.

“Kita tahu bahwa rakyat kita yang punya rumah, tapi tidak layak huni, ada 26,9 juta rumah. Jadi punya rumah, tapi tidak layak huni. Di sini, negara membantu tahun ini 45 ribu rumah yang direnovasi, supaya dari tidak layak huni, jadi layak huni. Tahun depan, Bapak Presiden meningkatkan besar sekali, dari 45 ribu pada tahun ini, tahun depan menjadi 400 ribu,” imbuh Maruarar.

Menurut Menteri PKP, aktivitas pembangunan rumah turut menggerakkan ekonomi rakyat, mulai dari penjual bahan makanan di sekitar lokasi proyek hingga pedagang bahan bangunan dan pelaku industri pendukung. Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo agar program perumahan menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat kecil.

Maruarar menyebutkan Mendagri dan para kepala daerah pun berkaitan langsung dengan program ini. Dalam kaitan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, program tiga juta rumah yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto merupakan wujud kebijakan ekonomi kerakyatan. Kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat kecil sebagaimana pemikiran Presiden

Prabowo di dalam buku Paradoks Indonesia.

“Kita melihat bahwa Presiden memiliki paradigma ekonomi kerakyatan. Artinya, bahwa semua program-program melihat pada rakyat kecil. Dan kemudian ada intervensi tangan pemerintah untuk masuk, untuk melindungi rakyat kecil itu,” ujar Mendagri pada acara Sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Dyantra Convention Center, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Kamis, 16 Oktober 2025.

Hadir pada acara tersebut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono, Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Bambang Pramujati, serta para pejabat terkait lainnya.

Usai menghadiri acara itu, Mendagri bersama Menteri PKP langsung meninjau dua Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. Keduanya berdialog dengan warga setempat sembari mendengar aspirasi yang disampaikan warga.



Mendagri juga mengemukakan Program lainnya juga menjadi fokus Presiden Prabowo yakni Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Swasembada Pangan. Berbagai program itu mengisyaratkan pentingnya pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Oleh karenanya, program tiga juta rumah menjadi penting dan relevan. Selain itu, melalui peran aktif pemerintah, program tersebut dapat diimplementasikan secara menyeluruh dengan tetap fokus pada kepentingan rakyat kecil.

Selain itu, dalam perspektif ekonomi kerakyatan, program tiga juta rumah juga ikut membangun efek berantai (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.

pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Lewat aturan ini, kalangan MBR dapat mengurus perizinan tersebut di Mal Pelayanan Publik (MPP) di kabupaten/kota.

Dalam forum itu, Mendagri juga membeberkan capaian Provinsi Jatim dalam program pembebasan retribusi PBG bagi MBR. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang diolah Kemendagri per 15 Oktober 2025, diketahui jumlah penerbitan PBG bagi MBR di Jatim sebanyak 638 perizinan. Sedangkan unit hunian bagi MBR sebanyak 10.234

yang belum memiliki MPP, yakni Kabupaten Blitar, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Madiun. Ia secara khusus meminta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk berkoordinasi dengan tiga daerah tersebut dalam membangun MPP.

"Saya minta kepada Ibu Khof, yang tiga (daerah) ini tolonglah Bu [didorong pembangunan] Mal Pelayanan Publiknya, sebelum itu ditegur Mal Pelayanan Publiknya," tandasnya.

Nah, di Sumatera Selatan, Bank Sum-sel Babel menegaskan komitmennya mendukung program pemerintah pusat dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyaluran Kredit Pemilikan



Pasalnya, dunia perbankan akan saling berinovasi dalam hal pembiayaan untuk program pembangunan tiga juta rumah. Selain itu, program tersebut juga akan melibatkan para buruh bangunan, arsitek, desainer, hingga pengembang.

"Nah, sampai ke yang kecil-kecil, ya tadi ada pembangunan makanan, maka restoran akan hidup, warung-warung akan hidup. Ada UMKM yang berkembang," kata Mendagri.

Di sisi lain, guna mendukung program itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan aturan tentang

unit. Capaian ini menempatkan Jatim di posisi lima provinsi teratas dalam penerbitan PBG bagi MBR. Menyikapi hal itu, Mendagri berharap, kinerja Provinsi Jatim dapat terus ditingkatkan.

Sejauh ini, dari total 38 kabupaten/kota di Jatim, sebanyak 13 daerah belum merealisasikan PBG bagi MBR. Untuk itu, Mendagri berharap daerah-daerah itu dapat mendukung implementasi program tersebut. Proses perizinan tersebut dapat direalisasikan melalui MPP.

Terkait MPP ini, Mendagri menyoroti masih ada tiga kabupaten/kota di Jatim

Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Dukungan tersebut ditegaskan pada momentum Akad Massal KPR FLPP dan Serah Terima Kunci Tahun 2025 yang digelar serentak secara nasional dan dipimpin langsung Presiden RI, Senin, 29 September 2025.

Acara utama terpusat di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan diikuti secara hybrid — yaitu sebagian peserta hadir langsung di lokasi dan sebagian mengikuti secara daring melalui jaringan cabang bank penyalur di seluruh Indone-

sia.

Bank Sumsel Babel menjadi salah satu bank penyalur yang berpartisipasi aktif, dengan mencatatkan 269 debitur penerima KPR FLPP di wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan total penyaluran mencapai Rp43,04 miliar.

Kehadiran Bank Sumsel Babel dalam agenda nasional ini mempertegas peran bank pembangunan daerah dalam mendukung target pemerintah pusat program pembangunan tiga juta rumah yang digencarkan untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat.

Acara ini turut dihadiri langsung Presiden RI Prabowo Subianto dan PPS Di-

makin menguatkan peran kami sebagai bank pembangunan daerah yang tidak hanya fokus pada pembiayaan produktif, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sumsel dan Babel,” imbuhnya.

Sebelumnya, Bank Sumsel Babel telah mengukir prestasi membanggakan di kancah nasional dalam ajang Evaluasi Kinerja Penyaluran KPR FLPP Semester I Tahun 2025 yang digelar oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Bank Sumsel Babel sukses memborong dua penghargaan bergengsi sekaligus.

Kedua penghargaan tersebut yakni, Bank Penyalur Peringkat 3 Kategori

yang dibiayai. Dalam hal ini, Direktur Bisnis Bank Sumsel Babel, Suroso Djailani, menyambut baik penghargaan tersebut dan menyebutnya sebagai wujud nyata komitmen Bank Sumsel Babel dalam mendukung program perumahan nasional.

“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim Bank Sumsel Babel. Ini membuktikan bahwa rumah yang kami bantu pembiayaannya bukan hanya dibangun, tapi benar-benar dihuni dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” tegas Suroso dalam keterangan resmi.

Suroso menambahkan, Bank Sumsel Babel akan terus memperkuat sinergi dengan BP Tapera, pengembang, asosiasi,



rektur Utama Bank Sumsel Babel Festero Mohamad Papeko. “Bank Sumsel Babel konsisten mendukung kebijakan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Festero Mohamad Papeko, PPS Direktur Utama Bank Sumsel Babel.

Melalui penyaluran KPR FLPP, sambung dia, kami tidak hanya membantu mewujudkan impian memiliki rumah pertama yang layak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor perumahan. “Momentum akad massal serentak bersama Presiden ini se-

Penyaluran Pembiayaan FLPP Terbanyak untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Penyalur Peringkat 3 Kategori Tingkat Keterhunian Tertinggi, berdasarkan hasil sampling 100% rumah dihuni. Penghargaan tersebut diumumkan dalam agenda evaluasi nasional BP Tapera yang berlangsung di Bandung, Rabu, 23 Juli 2025.

Kinerja gemilang Bank Sumsel Babel dinilai tidak hanya pada aspek kuantitas penyaluran FLPP, tetapi juga kualitas hasil pembiayaan, terbukti dengan tingkat keterhunian 100% pada rumah

dan pemerintah daerah agar lebih banyak masyarakat di Sumsel dan Babel dapat mengakses rumah layak huni dengan pembiayaan yang terjangkau. Keberhasilan ini semakin menegaskan posisi Bank Sumsel Babel sebagai salah satu BPD paling aktif dan berdedikasi dalam mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat.

Tak hanya sekadar menyalurkan pembiayaan, tentu saja BPD akan ikut memastikan rumah benar-benar menjadi tempat tinggal yang layak bagi keluarga Indonesia. Menuju tiga juta rumah targetnya. ♦

DUKUNG PENGEMBANGAN KOPERASI MERAH PUTIH

Lebih dari 80 Ribu Koperasi di tingkat desa dan kelurahan sudah terbentuk. Langkah berikutnya adalah percepatan operasionalnya hingga akhir 2025.

Latar belakang pembentukan Koperasi Merah Putih adalah pemberdayaan masyarakat terutama yang mata pencahariannya masih bergantung kepada sektor agraris. Badan Komunikasi Pemerintah mengemukakan, harga hasil pertanian dan perikanan yang tidak stabil berisiko merugikan produsen serta mengancam kesejahteraan desa, terutama jika tidak didukung mekanisme penyimpanan dan distribusi yang mampu menjaga keseimbangan pasar.

Tambahan pula, dengan disrupsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam bentuk jaringan internet, sebagian besar masyarakat desa terjerat utang berbunga tinggi dari rentenir atau pinjaman online ilegal ketika berupaya mencari modal usaha sehingga menyebabkan kemiskinan berkepanjangan. Dengan 44 persen penduduk Indonesia tinggal di desa, penguatan ekonomi pedesaan menjadi krusial untuk meningkatkan

kesejahteraan dan mencegah urbanisasi berlebihan.

Nah, dengan latar belakang itulah pemerintah menyediakan pendanaan hingga Rp 3 miliar per Koperasi Merah Putih melalui skema pinjaman dari bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) untuk memperkuat ekonomi desa, meningkatkan akses permodalan, dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir. Konkretnya, pendirian koperasi di 80 ribu desa seluruh Indonesia mencakup kantor, gudang penyimpanan, gudang berpendingin, apotek desa, klinik desa, juga unit simpan pinjam, guna mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya secara ekonomi.

Per 20 Oktober 2025, 81.613 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sudah terbentuk. Sedangkan yang sudah operasional tercatat 108 unit. Seluruh koperasi diharapkan operasional pada akhir 2025. Bagaimana perkembangannya?



Sebulan sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan sebanyak 1.064 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih telah mengajukan proposal pembiayaan kepada bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dan kini tengah menunggu proses pencairan dana. Ferry menyebut proposal tersebut telah melalui proses uji tuntas atau due diligence dan menjadi bagian dari tahap awal operasionalisasi Kopdes Merah Putih, yang merupakan program strategis nasional yang digagas pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa.

"Yang awal itu 1.064 koperasi sudah ajukan proposal ke bank Himbara dan telah diperiksa dalam proses pencairannya. Sekitar 100 koperasi sudah mulai jalan sebagai bagian dari pengembangan mock-up," ujar Ferry usai serah terima jabatan Wakil Menteri Koperasi ke Farida Farichah di Jakarta, Kamis, 18 September 2025.

Meski belum merinci jumlah kredit yang akan dicairkan, Ferry menyebut setiap koperasi yang lolos seleksi berhak mendapatkan plafon pembiayaan maksimal Rp3 miliar. Dana tersebut dapat digunakan untuk modal kerja maupun investasi, termasuk pembangunan gudang penyimpanan dan pengadaan truk operasional.

Pemerintah menargetkan sebanyak 20 ribu Kopdes Merah Putih dapat menerima pembiayaan dan beroperasi secara ideal pada 2025. Prioritas awal diberikan kepada 16 ribu koperasi yang berasal dari desa-desa mandiri, yaitu desa yang telah memiliki kesiapan infrastruktur.

Kementerian Koperasi saat ini tengah menyiapkan titik-titik lokasi pembangunan yang akan segera direalisasikan. Guna mempercepat proses pencairan dana, Ferry menjelaskan pemerintah tengah menyempurnakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025. Revisi ini bertujuan menyederhanakan prosedur pengajuan proposal, termasuk penghapusan kewajiban mendapat persetujuan dari bupati/wali kota serta musyawarah desa khusus (musdesus) dalam setiap proposal bisnis koperasi.

Untuk mendukung pelaksanaan program, pemerintah akan menurunkan sekitar 8.000 tenaga pendamping bisnis mulai Oktober 2025. Satu pendamping akan membina 10 koperasi. Perekrutan dilakukan oleh Kemenkop dan pendanaannya, termasuk gaji pendamping, bersumber dari APBN.

Selain itu, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada dinas-dinas terkait, didampingi oleh bank Himbara dan BUMN. Diharapkan, seluruh pengurus koperasi

desa dapat memahami standar pencairan dan penyusunan proposal sebelum akhir bulan ini, sehingga koperasi-koperasi yang telah mengajukan dapat segera beroperasi mulai Oktober 2025.

Pemerintah pun telah mengalokasikan dana sebesar Rp16 triliun dari sisa anggaran lebih (SAL) APBN 2025 untuk mendukung pembiayaan operasional koperasi. Dana tersebut ditempatkan di bank-bank

Saat ini, Kementerian Keuangan disebut tengah menyiapkan regulasi pengganti sebagai pedoman baru bagi perbankan.

Dalam kaitan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal memanggil Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) apabila penyaluran dana untuk Koperasi Desa Merah Putih mandek atau tak terealisasi. "Bukan dari saya kan, dari Himbaranya. Saya enggak tahu seperti apa harusnya.



Himbara, yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BSI.

Toh Menkop Ferry mengemukakan, hambatan pencairan kredit terutama terjadi karena bank masih memproses proposal bisnis dari setiap koperasi untuk memastikan proyek yang diajukan memenuhi syarat bankable (memenuhi syarat perbankan) dan feasible (layak secara bisnis). Selain itu, perubahan regulasi juga sempat menunda proses pencairan setelah PMK Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman untuk Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dibatalkan.

ya dia diskusi dengan Himbara-nya. Saya pikir itu kan pasti perbankan yang melihat dan menilai kan proyeknya profitable atau enggak karena mereka dasarnya profesional kan, komersial dan profesional," ujar Purbaya Rabu, 29 Oktober 2025.

Toh Menkeu Purbaya bakal menemui langsung Himbara untuk mendengar apa saja kendala yang merintang proses pencairan dana tersebut. "Jadi saya enggak tahu seperti apa masalahnya, tetapi nanti harusnya kalau seminggu enggak jalan maka saya ketemu mereka deh," ujarnya.

Dukungan di luar pembiayaan datang

dari Kementerian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengemukakan segera membentuk satuan tugas percepatan untuk program Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

"Satgas ini nanti dipimpin oleh Bapak Wamen, Pak Bima Arya," kata Tito dalam rapat percepatan program Kopdes yang dilakukan secara hybrid pada Jumat, 31 Oktober 2025.

Selain Bima Arya, ada juga Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Ketua Satgas. Kemudian, akan ada empat polisi aktif yang ikut dalam satgas tersebut.

Pertama, Sekjen Kemendagri, Komjen Pol Tomsy Tohir akan menjadi sekretaris. Selanjutnya, ada Stafsus Menteri Bidang

dataan lahan di pemerintah daerah seluruh Indonesia untuk mendukung Kopdeskel Merah Putih. Dalam pemaparannya, Tito juga menjelaskan kriteria lahan yang bisa digunakan untuk membangun Kopdeskel Merah Putih tersebut.

"Karena lahan tersebut harus bisa untuk dibangun satu perkantornya untuk petugas koperasi bekerja. Dua ada gerainya, yang ketiga ada gudang, minimal seperti itu," katanya.

Sedangkan kriteria lahan yang disebutkan Mendagri, pertama, terkait dengan kepemilikan, seperti adanya sertifikat agar tidak terjadi perkara di kemudian hari. "Kemudian sebaiknya terdata dalam buku Inventarisasi Aset Desa. Ada surat hibah bila tanah dihibahkan oleh masyarakat kepada

ya, pemerintah menugaskan PT Agrinas Pangan. Penunjukan tersebut dilakukan agar proses pembangunan gudang, gerai, dan sarana pendukung lainnya bisa diselesaikan dengan cepat dan efisien melalui kerja sama antara Agrinas dan TNI.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan pembangunan fisik Kopdes Merah Putih menjadi bagian penting dari percepatan program ekonomi kerakyatan yang dijalankan pemerintah. PT Agrinas ditugaskan karena dinilai memiliki kapasitas dan kemampuan pelaksanaan proyek secara profesional serta telah memiliki kerja sama dengan TNI untuk percepatan di lapangan.

"PT Agrinas Pangan kami tugaskan ka-



Keamanan, Irjen Pol Wahyu Bintoro Hari Bawono sebagai Ketua Tim Wilayah Jawa, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Brigjen Pol Edi Mardianto untuk Ketua Tim Wilayah Sumatera, dan Staf Khusus Menteri Bidang Perbatasan dan Desa, Brigjen Pol Hoiruddin Hasibuan. Anggota lainnya, Dirjen Bina Pemdes La Ode Ahmad Bolombo, akan menjadi Ketua Tim Wilayah Bali, Nusra, dan Maluku, serta Papua.

Tito menjelaskan, satgas ini spesifik bertugas untuk melakukan percepatan pen-

desa, misalnya pemerintahan desa. Jadi ini adalah aspek-aspek hukumnya," imbuh Tito.

Kriteria kedua adalah luasannya, karena harus menampung gedung, kantor, dan juga untuk gerai. Yang ketiga adalah gudang, sehingga minimal diperlukan seribu meter persegi. "Juga diperhitungkan ada ruang parkir di halaman depan. Nah yang ketiga, juga tidak mudah ini, lokasinya strategis. Artinya, mudah diakses masyarakat," kata Tito.

Sedangka untuk pembangunan fisiknya,

rena memiliki kapasitas dalam pekerjaan fisik dan sudah ada MoU dengan TNI untuk pelibatan dalam pelaksanaan di lapangan agar lebih cepat dan efisien," kata Ferry saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, pada Senin, 27 Oktober 2025.

Menurut dia, pembangunan Kopdes Merah Putih dilakukan secara bertahap. Dari sekitar 5.000 titik lahan yang sudah terdata, sebanyak 2.400 lokasi telah terkonfirmasi dan siap dibangun. Semoga akhir 2025 hasilnya segera kelihatan. ♦

POLITIK LUAR NEGERI TANPA KECUALI

Dalam setahun pemerintahan Prabowo Subianto kebijakan politik luar negeri juga mengantarkan Indonesia kian berperan di panggung hubungan internasional. Badan Komunikasi Pemerintah mencatat, antara lain bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS.

BRICS adalah organisasi antarpemerintah yang mulanya merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, dan China. Setelah Afrika Selatan bergabung, namanya menjadi BRICS, dan saat ini telah berkembang menjadi blok yang lebih besar dengan anggota baru seperti Indonesia, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

Pada 2024, negara anggota BRICS berkontribusi pada lebih dari 40 persen populasi dunia dan 30 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Dalam perspektif politik luar negeri Indonesia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, persaingan kekuatan besar, dan fragmentasi sistem perdagangan internasional, Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada satu kelompok saja. Dengan menjadi bagian dari BRICS, sebuah negara dapat mengurangi ketergantungan pada satu blok ekonomi tertentu dan menguatkan kerja sama antar negara berkembang.

Maka, Presiden Prabowo mengutus Menteri Luar Negeri RI Sugiono ke Konferensi Tingkat Tinggi BRICS Plus di Kazan, Rusia pada 22-24 Oktober 2024 untuk menyampaikan keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS. Pada 6 Januari 2025, Brazil sebagai Ketua BRICS 2025 mengumumkan bahwa Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS setelah mendapat persetujuan konsensus dari seluruh anggota. Selanjutnya Presiden Prabowo hadir dalam

pertemuan BRICS pertamanya pada tanggal 6-7 Juli 2025 di Rio de Janeiro, Brasil.

Selain itu, pada 19 Desember 2024, Presiden Prabowo menghadiri KTT ke-11 Organisasi Kerja Sama Ekonomi Delapan Negara Berkembang (Development Eight/D-8) untuk bersiap menerima rotasi kepemimpinan organisasi tersebut. Per 1 Januari 2026, Indonesia akan mendapat giliran sebagai pemimpin D-8. Presiden Prabowo mengajak negara anggota D-8 untuk memperdalam integrasi ekonomi dan kerja sama demi memberikan manfaat yang lebih nyata bagi rakyat di setiap negara anggotanya.

The Developing Eight (D-8) merupakan sebuah organisasi ekonomi negara muslim berkembang yang terdiri dari Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Ma-

kancha hubungan internasional. Tak terkecuali rencana pengiriman pasukan perdamaian di Gaza, wilayah konflik yang melibatkan Palestina dan Israel.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah berkomunikasi membahas rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.

"Mengenai komunikasi antara Presiden dan Panglima TNI, tentu berjalan dengan sangat baik. Setiap rencana strategis yang berkaitan dengan pengerahan kekuatan TNI selalu dibahas secara terarah, terpadu, dan lintas kementerian/ lembaga," kata Freddy.

Menurut dia, setiap keputusan untuk mengirim pasukan perdamaian ke luar



laysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Potensi besar yang dimiliki setiap anggota D-8, terutama pemanfaatan ekonomi biru, dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat setiap anggotanya. Secara keseluruhan, D-8 mewakili pertumbuhan ekonomi ketiga terbesar secara global dengan gabungan PDB sebesar USD4,81 triliun per 2023.

Masih banyak kebijakan luar negeri yang menunjukkan peran Indonesia di

negeri pasti didasari oleh perintah dari pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden. Selain Presiden, keputusan pengiriman prajurit juga dibahas oleh lintas kementerian seperti Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri. "Pembahasan tingkat kementerian diperlukan untuk memastikan langkah yang diambil selaras dengan kebijakan luar negeri Indonesia dan prinsip non-blok," ungkapnya. ♦

KECIL

GUNAWAN EFFENDI

Banyak yang menghadapi kesulitan hidup karena masalah-masalah besar: Sebut saja soal ketidakpastian di tingkat global hingga soal ekonomi, hukum, politik. Namun, tetap waspada juga, kita dapat menghadapi masalah karena hal kecil: mikroplastik, bahkan nanoplastik.

Lambat laun pembicaraan mengenai mikroplastik dan nanoplastik kian ramai setelah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membeberkan hasil penelitian mereka pada pertengahan Oktober 2025. Temuan ini menjadi viral dan memicu perbincangan luas karena meningkatkan kekhawatiran publik tentang kualitas lingkungan dan dampak kesehatan yang selama ini kurang mendapat sorotan.

Pada pertengahan Oktober itu yang juga musim penghujan di Indonesia, peneliti BRIN, Dr Muhammad Reza Cordova mengonfirmasi bahwa air hujan di Jakarta tercemar mikroplastik berbahaya. Penelitian mengenai mikroplastik ini sudah berlangsung sejak 2022 dan menemukan partikel mikroplastik di setiap sampel air hujan yang dikumpulkan di Jakarta.

Jadi, menurut Reza Cordova, air hujan yang selama ini dianggap simbol kesegaran ternyata tidak sepenuhnya bersih. Hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap bahwa air hujan di Jakarta mengandung partikel mikroplastik berbahaya yang berasal dari aktivitas manusia di perkotaan. Temuan ini menjadi peringatan bahwa polusi plastik kini tidak hanya mencemari tanah dan laut, tetapi juga atmosfer.

Penelitian BRIN sejak 2022 menunjukkan adanya mikroplastik dalam setiap sampel air hujan di Jakarta yang hingga kini masih menjadi ibu kota Indonesia. Partikel-partikel plastik mikroskopis (hanya terlihat jika menggunakan mikroskop) ini terbentuk dari degradasi (penurunan ukuran) limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia.

Temuan mikroplastik dalam penelitian BRIN berasal dari serat sintetis pakaian, debu kendaraan dan ban, sisa pembakaran sampah plastik, serta degradasi plastik di ruang terbuka. Sedangkan yang banyak menjadi temuan penelitian BRIN umumnya berbentuk serat sintetis dan fragmen kecil plastik, terutama polimer seperti poliester, nilon, polietilena, polipropilena, hingga polibutadiena dari ban kendaraan. Rata-rata, peneliti menemukan sekitar 15 partikel mikroplastik per meter persegi per hari pada sampel hujan di kawasan pesisir Jakarta.

Menurut Reza, pencemaran oleh mikroplastik terjadi karena siklus plastik telah menjangkau ruang udara terbuka, atmosfer. Mikroplastik dapat terangkat ke udara melalui debu jalanan, asap pembakaran, dan aktivitas industri, kemudian dibawa angin dan turun kembali bersama hujan.

Proses ini dikenal sebagai atmospheric microplastic deposition. Jadi, kata Reza, daur plastik ternyata tidak berhenti atau tenggelam di laut lepas, namun naik ke langit, berkeliling bersama angin, lalu turun lagi ke bumi bersama hujan.

Temuan ini menimbulkan kekhawatiran karena partikel mikroplastik berukuran sangat kecil, bahkan lebih halus dari debu biasa, sehingga dapat terhirup manusia atau masuk ke tubuh melalui air dan makanan. Plastik juga mengandung bahan aditif beracun seperti ftalat, bisfenol A (BPA), dan logam berat yang dapat lepas ke lingkungan ketika terurai menjadi partikel mikro atau nano. Di udara, partikel ini juga bisa mengikat polutan lain seperti hidrokarbon aromatik dari asap kendaraan.

Peneliti BRIN ini menegaskan, yang beracun bukan air hujannya, melainkan partikel mikroplastik yang menyertainya karena mengandung bahan kimia aditif atau menyerap polutan (zat pencemar) lain. Meski penelitian lebih lanjut masih dibutuhkan, studi global menunjukkan bahwa paparan mikroplastik dapat menimbulkan dampak kesehatan serius, seperti stres oksidatif, gangguan hormon, hingga kerusakan jaringan. Dari sisi lingkungan, air hujan bermikroplastik berpotensi mencemari sumber air permukaan dan laut, yang akhirnya masuk ke rantai makanan.

Reza menilai, gaya hidup urban modern menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya mikroplastik di atmosfer. Dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa dan kendaraan mencapai 20 juta unit, Jakarta menghasilkan limbah plastik dalam jumlah besar setiap hari. Menurut ahli pencemaran laut yang meneliti sampah plastik sejak 2007, limbah plastik sekali pakai masih banyak, dan pengelolaannya belum ideal. Sebagian dibakar terbuka atau dibawa air hujan ke sungai.

Untuk mengatasi persoalan ini, BRIN mendorong langkah konkret lintas sektor. Pertama, memperkuat riset dan pemantauan kualitas udara dan air hujan secara rutin di kota-kota besar. Kedua, memperbaiki pengelolaan limbah plastik di hulu, termasuk pengurangan plastik sekali pakai dan peningkatan fasilitas daur ulang. Ketiga, mendorong industri tekstil agar menerapkan sistem filtrasi pada mesin cuci guna menahan pelepasan serat sintetis.

Selain itu, edukasi publik menjadi kunci penting. Reza mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik, memilah sampah, dan tidak membakar limbah sembarangan. Ia berharap pula kesadaran masyarakat bisa menekan polusi mikroplastik secara signifikan.

Reza juga mengemukakan, hujan yang kini mengandung partikel plastik adalah cermin dari perilaku manusia terhadap bumi. Langit Jakarta, kata Reza, sebenarnya sedang memantulkan perilaku manusia di bawahnya. Plastik yang kita buang sembarangan, asap yang kita biarkan mengepul, sampah yang kita bakar karena malas memilah semuanya kembali pada kita dalam bentuk yang lebih halus, lebih senyap, tapi jauh lebih berbahaya.

Terlebih lagi, Reza juga mengungkapkan sebenarnya BRIN menemukan mikroplastik yang menyertai air hujan di 18 kota Indonesia yang mewakili kawasan ekologi (ecoregion) seluruh pulau di Indonesia. Kita dapat memaklumi, kota-kota itu berada di pesisir, jumlahnya sekitar separuh dari 38 provinsi Indonesia.

Mikroplastik dan nanoplastik adalah partikel atau bagian plastik sangat kecil yang mencemari lingkungan. Perbedaan utama keduanya terletak pada ukuran, yang juga mempengaruhi tingkat bahaya dan cara berdampak pada makhluk hidup. Dari ukurannya, mikroplastik berbentuk partikel padat yang tidak larut dalam air dengan ukuran antara 1 mikrometer (mikrometer atau sepersejuta meter) hingga 5 milimeter (mm). Partikel ini bisa dihasilkan dari penguraian plastik yang lebih besar atau diproduksi langsung untuk produk tertentu. Misalnya manik-manik hiasan yang menjadi campuran dalam kosmetik.

Sedangkan nanoplastik ukurannya jauh lebih kecil, um-

derhana seperti membawa tumbler (botol air minum), mengurangi penggunaan kantong plastik, dan memilih wadah non-plastik dapat menjadi titik awal perubahan.

Menurut Annisa, kita bisa mulai dari hal kecil seperti membawa botol minum sendiri atau menghindari kantong plastik saat berbelanja. Upaya kecil ini, menurut dia, berkontribusi besar dalam menekan akumulasi mikroplastik di lingkungan.

Toh perlu pula penjelasan ilmiah yang objektif bahwa mikroplastik dan nanoplastik sudah sampai ke makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Baik makanan atau minuman kemasan yang menggunakan plastik, maupun makanan-minuman yang lingkungan asalnya sudah tercemar mikro dan nanoplastik, tak terkecuali sembilan bahan pokok (sembako) yang kita telan. Terlebih jika menyimak dampak negatif mikroplastik dan nanoplastik terhadap organ tubuh manusia hingga mengganggu tingkat kesuburan maupun kecerdasan.

Hingga sejauh ini, dengan membahas serba sedikit mikro-



umnya dirumuskan sebagai kurang dari 1 mikrometer atau antara 1 hingga 1.000 nanometer (nm). Nanoplastik kerap merupakan hasil lanjutan dari penguraian mikroplastik. Alangkah kecilnya.

Dari sisi kesehatan, Dr. Annisa Utami Rauf, S.Pd., Dosen Departemen Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada mengemukakan, tantangan terbesar dalam mengendalikan paparan mikroplastik adalah rendahnya kesadaran dan kebiasaan konsumsi masyarakat. Langkah se-

plastik dan nanoplastik kita juga diajak terbiasa dengan sains, teknologi, engineering, dan matematika (STEM) praktis yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Akhirnya, sebagai muslim, pencemaran mikroplastik dan nanoplastik, kita sudah diingatkan sejak 15 abad lalu lewat surat ke-30 dalam Alquran, Ar-Rum, ayat 41: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." ♦

AGAR EKONOMI SYARIAH TERUS BERGAIRAH

Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mendapat kehormatan sebagai tuan rumah Indonesia Ekonomi Syariah (IES) Forum dan Expo 2025. Gairah ekonomi syariah rupanya terus menyala di sana.

Lebih dari sekadar menyala di Mataram dan NTB, layak pula diharapkan (IES) Forum dan Expo 2025 akan memicu gairah di wilayah lainnya di Indonesia. Namun, seperti apa gambaran gairah ekonomi syariah di Mataram dan NTB umumnya?

Menteri Agama Prof KH Nasaruddin

dan Expo 2025 di Islamic Center Hubbul Wathan, Kota Mataram, Kamis, 23 Oktober 2025.

Selain itu, NTB pun telah dikenal sebagai destinasi wisata halal yang pernah meraih penghargaan internasional pada 2016 silam. Dalam kaitan itu, IES Forum dan Expo 2025 yang berlangsung hingga

produk halal unggulan NTB dan daerah lain dari seluruh Indonesia, juga forum diskusi panel, seminar, serta talkshow. Tercatat pula agenda penampilan kekayaan budaya lokal, termasuk musik dari beberapa artis seperti Batas Senja, Amtenar, Ghea Indrawari, dan Pasha Ungu.

Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti



Umar mengungkapkan beberapa tandatanya. Saat menyampaikan sambutan pembukaan IES Forum dan Expo 2025, ia mengemukakan alasan pemilihan NTB sebagai lokasi pelaksanaan IES Forum dan Expo tahun ini.

"Provinsi NTB adalah daerah yang paling berani mengedepankan ekonomi dan perbankan syariah. Bank Pembangunan Daerah NTB bahkan menjadi salah satu yang tercepat bertransformasi menjadi bank syariah penuh. Karena itu, sangat relevan bila starting point IES kita mulai dari NTB," ungkap Menag Nasaruddin dalam sambutan pembukaan IES Forum

Minggu, 26 Oktober 2025 ini telah merancang sejumlah kegiatan bagi para peserta termasuk NTB Halal Tourism Tour - City tour ke destinasi wisata halal unggulan NTB seperti Mandalika dan Desa Wisata di provinsi berjuluk Tanah Seribu Masjid ini.

Kegiatan lainnya adalah Halal Culinary & Creative Expo - Festival kuliner halal dan pameran fashion modest, Business Matching & Forum Investasi - Mempertemukan investor, perbankan, dan pelaku industri, dan Awarding Night - Malam penghargaan bagi pelaku wisata halal terbaik nasional. Tak ketinggalan pula Pameran Ekonomi Syariah & UMKM Halal yang menampilkan

Putri dalam sambutannya sebagai tuan rumah mengemukakan bahwa Indonesia Ekonomi Syariah Forum dan Expo 2025 merupakan forum strategis yang mempertemukan pelaku ekonomi syariah, akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan dari seluruh Indonesia. "IES bukan sekadar acara, tapi momentum untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta menjadi inspirasi dalam pengembangan ekonomi syariah yang inklusif, inovatif, dan penuh keberkahan. Keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan, tetapi dari keberkahan dan manfaat sosial yang dirasakan masyarakat," ujarnya.

Wagub Indah juga menegaskan komitmen NTB untuk menjadi pusat ekonomi syariah di kawasan Indonesia timur melalui berbagai program konkret. “Kami terus memberdayakan ekonomi pesantren dan santripreneur agar menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Kami juga mendorong pengembangan produk halal, UMKM berdaya saing global, inovasi keuangan syariah, serta optimalisasi zakat, infak, dan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Menurut Indah, kebangkitan ekonomi syariah tidak bisa berdiri sendiri tanpa sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Karena itu, NTB terus menguatkan kolaborasi lintas sektor untuk memperluas dampak ekonomi halal sekaligus menjadikannya sumber kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan posisi geografis dan komitmen sosial yang kuat, NTB diharapkan menjadi pionir penggerak ekonomi syariah daerah yang berkontribusi terhadap cita-cita besar Indonesia sebagai pusat ekonomi halal dunia.

Nah, dengan rangkaian kegiatannya, IES Forum dan Expo yang bertema Santri Berdaya Ekonomi Syariah mendunia kali ini menyasar beberapa target, antara lain rekomendasi kebijakan nasional terkait penguatan ekosistem ekonomi syariah. Selain itu, dari rangkaian acara, penyelenggara mengharapkan akan terbentuk model implementasi daerah untuk pengembangan industri halal dan ekonomi pesantren, program pemberdayaan pesantren dan santri berbasis kewirausahaan dan keuangan syariah, serta inovasi industri halal untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Menag mengemukakan, penguatan ekonomi syariah secara nasional bukan bermaksud melakukan “syariahtisasi” terhadap regulasi negara, melainkan memperluas peluang ekonomi dan investasi halal yang memiliki potensi besar di tingkat global. “Kita tetap negara Pancasila. Namun, ada prospek besar yang harus kita garap bersama. Inggris, misalnya, menjadi negara yang sangat serius mengembangkan ekonomi syariah, bahkan banyak pakar ekonomi Islam modern belajar ke sana,” ungkap Menag Nasaruddin.

Ia juga mencontohkan sejumlah negara non-muslim yang kini aktif mengembangkan produk halal karena potensi pasar global yang sangat besar. “Thailand dan Jepang berlomba-lomba mengembangkan industri halal. Dulu di Jepang sulit mencari makanan halal, sekarang restoran halal sudah ada di mana-mana,” ungkapnya.

Begitu pula dengan perkembangan ekonomi syariah di Amerika Serikat dan Eropa yang berbudaya Barat. “Amerika Serikat dan negara-negara Eropa pun berkompetisi menciptakan produk halal karena sadar umat Islam, dengan populasi 1,3 miliar jiwa, adalah pasar ekonomi yang luar biasa besar,” ujar Menag Nasaruddin.

Menurut dia, Indonesia layak optimis-tis karena memiliki kombinasi antara sta-

bahwa Indonesia Ekonomi Syariah (IES) merupakan gerakan untuk menghidupkan kembali potensi dana umat — zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, hingga fidyah — yang selama ini belum dikelola secara optimal. “Kami menyebutnya raksasa besar yang sedang tidur. Potensi dana umat kita sangat besar, dan bila dikelola secara profesional akan menjadi kekuatan ekonomi baru. Masjid di masa Rasulullah SAW bu-



bilitas politik, ekonomi, dan kemajemukan masyarakat yang moderat. “Ada negara yang gagal, tak sanggup membayar pegawainya dan mengalami krisis berat. Namun Indonesia justru menunjukkan hal sebaliknya: kebijakan yang berpihak kepada rakyat, seperti program makan bergizi gratis bagi siswa dan pemberdayaan nelayan. Ini capaian yang luar biasa,” ungkap Menag di hadapan hadirin.

Lebih lanjut, Menag menjelaskan

kan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat ekonomi dan pemberdayaan umat. NTB akan menjadi percontohan awal atau pilot project untuk mengembangkan konsep ini,” tandas Menag.

Akhirnya, semoga IES Forum dan Expo 2025 berhasil menjadi titik temu kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri juga UMKM untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional dan meningkatkan perannya di pasar global. Insha Allah. ♦

5 SELEBRITI INDONESIA BATAL NAIK HAJI 2025 TERKENDALA VISA?

Sejumlah selebriti Indonesia gagal menjalankan Rukun Islam kelima, yaitu menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci pada 2025 (1446 H). Mereka yang gagal menunaikan ibadah haji ini, rata-rata adalah mereka yang tercatat mendaftar melalui jalur haji furoda, skema haji non-kuota yang diberikan Arab Saudi melalui undangan khusus atau visa mujamalah.

Tahun ini, pemerintah Arab Saudi diketahui tidak menerbitkan visa haji Furoda, sehingga para calon jamaah telah mendaftar, termasuk dari kalangan selebriti, tidak dapat melaksanakan niatnya untuk beribadah haji ke Tanah Suci.

Haji furoda merupakan jalur alternatif di luar kuota resmi pemerintah Indonesia yang memungkinkan jamaah berangkat lebih cepat, tanpa melalui proses antrean Panjang, seperti halnya haji reguler. Karena visa mujamalah yang digunakan dalam program ini, diberikan langsung oleh otoritas Arab Saudi sebagai bentuk penghargaan atau kedekatan hubungan antar negara.

Meski diakui secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, pelaksanaan haji Furoda berada di luar pengawasan langsung Kementerian Agama (Kemenag) RI, yang mengurus penyelenggaraan ibadah haji dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Tahun 2025 ini, tercatat lebih dari 1.000 calon jamaah haji Furoda yang gagal melak-

Berangkat Haji Tahun 2025:

1. Teuku Wisnu

Teuku Wisnu termasuk calon jamaah haji yang batal menunaikan ibadah haji di tahun ini. Ia berencana menunaikan ibadah haji melalui jalur haji Furoda. Setelah semua telah dipersiapkan, visa yang ditunggu-tunggu tidak muncul, karena juga harus membatalkan ibadah tersebut akibat kebijakan Kerajaan Arab Saudi. Ia mengaku seharusnya dijadwalkan berangkat pada 27 Mei, namun hingga waktu yang telah ditentukan, kepastian tentang visanya tak kunjung datang, akhirnya gagal berangkat ke Arab Saudi.

Teuku Wisnu pun kemudian mengaku, akan menempuh alternatif lain jika gagal pergi sebagai jamaah haji Furoda.

"Allahu alam info kapan kabarnya enggak tahu, cuma kalau misal dibilang berangkatnya rencana kan tanggal 27 Mei, insyaallah harusnya, tapi kan belum ada kabar sampai sekarang," kata Teuku Wisnu, seperti dilansir dari alowarta.com

"Kalau memang fix enggak dapat, ya kita nanti pakai plan B lah," tambahnya.

Atas keagalannya ini, Teuku Wisnu menjadi salah satu artis yang batal berangkat ibadah haji tahun ini.

2. Shiren Sungkar

Tak sendiri, selain Teuku Wisnu, sang istri, aktris Shireen Sungkar juga termasuk selebriti yang gagal berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji tahun 2025 ini.

Keduanya, pasangan suami-istri ini, mengalami nasib serupa, yakni sama-sama gagal berangkat karena visa Furoda belum juga keluar hingga tanggal keberangkatan pada 27 Mei 2025.

Dengan demikian, pasangan ini pun terpaksa harus menunda keinginan mereka untuk menunaikan ibadah haji.

3. Ruben Onsu

Setelah resmi menjadi mualaf, tak perlu waktu lama bagi selebriti Ruben Onsu untuk menyempurnakannya dengan melaksanakan Rukun Islam kelima yaitu menunaikan ibadah haji, yang ia rencanakan akan berangkat tahun 2025 ini.

Ruben berencana menunaikan ibadah haji, melalui haji Furoda, yakni haji undangan khusus dari pemerintah Arab Saudi, yang



sanakan ibadah haji. Sejumlah perusahaan travel juga telah dimintai pertanggungjawaban atas kasus ini. Solusi terbaiknya adalah menyiapkan keberangkatan ulang di musim haji berikutnya.

Lantas, siapa saja selebriti Indonesia yang gagal berangkat haji ke Tanah Suci tahun ini?

Berikut 5 Selebriti Indonesia yang Batal

setiap tahun diberikan oleh Arab Saudi.

Namun ia bisa berencana, namun Allah-lah yang menentukan. Rencana mulia Ruben Onsu itu pun harus tertunda, karena visa Furoda yang diharapkannya tidak diberikan oleh pemerintah Arab Saudi.

Ruben pun sempat membahas masalah ini dalam siaran langsung di TikTok.

"Kapan berangkat haji? Harusnya hari ini, tapi kan berita tentang semua visa furoda itu kan lumayan jadi isu besar ya. Jadi kalau aku sebagai orang yang baru dan masih terus belajar, ya saya menikmati semuanya yang Allah mau," kata Ruben Onsu.

Seperti halnya Teuku Wisnu, Ruben Onsu juga menjadi salah satu artis yang batal berangkat haji tahun ini. Dalam sebuah siaran langsung di TikTok, Ruben sempat memberikan pernyataan mengenai rencana ibadah haji yang akan dilakukannya tahun ini.

"Harusnya aku (berangkat) tadi malam tanggal 30. Tapi, dari pihak travel masih bilang tunggu sampai tanggal 1. Rencana Allah lebih indah lah ya," ungkap Ruben dalam siaran langsung Tiktok, 30 Mei 2025.

Ruben pun akhirnya menerima semua keputusan ini dengan lapang dada dan penuh kesabaran.

4. Wendi Cagur

Komedian Wendi Cagur beserta istri, Revti Ayu Natasha, juga termasuk selebriti yang mengalami pembatalan keberangkatan ibadah haji tahun ini.

Wendi pun secara terbuka menyatakan pembatalan keberangkatannya ke Tanah Suci, melalui unggahan di media sosial bersama sang istri, Revti Ayu Natasya.

Pasangan ini, menyatakan bahwa mereka belum diizinkan pergi ke Makkah tahun ini, meski sudah berikhtiar dan berdoa, dan juga telah mempersiapkan diri, namun hasilnya tetap berada di tangan Allah.

"Indahnya cara Allah SWT mencintai kami. Kami berdua belum diizinkan untuk berangkat haji tahun ini," tulis @revtiayunatasya dan @wendicagur dalam unggahan Instagram mereka.

Mereka pun

merasa sangat sedih, meski begitu, mereka yakin bahwa Allah tak pernah salah Alamat.

"Sedih iya, tapi Allah yang paling tahu yang terbaik untuk kami. Kami yakin pang-

Furoda. Ia mengungkapkan, bahwa rencana tersebut gagal, karena visa haji Furoda tak kunjung diterimanya.

Kimberly pun akhirnya mengurungkan



gilan menjadi tamu Allah ke Baitullah tidak pernah salah alamat. Selamat menunaikan ibadah haji teman-teman tersayang wahai tamu Allah," tulisnya.

5. Kimberly Ryder

Aktris Kimberly Ryder juga termasuk salah satu selebriti yang batal berangkat haji melalui h a j i

niat berangkat haji tahun ini, dan mengalihkannya fokus menjalankan hari raya Idul Adha di Indonesia, termasuk dengan berkurban.

Melalui unggahan di media sosial, Kimberly mengungkapkan kekecewaannya karena gagal berangkat haji tahun ini.

"Tadinya kan mau pergi naik haji ya, tapi akhirnya kan enggak jadi. Karena memang visa Furoda sampai saat ini belum pada turun. Jadi agak stressful, ya sudah deh. Buat tahun depan saja deh insyaallah," kata Kimberly Ryder, di akun pribadinya.

Dia juga menambahkan bahwa proses visa Furoda cukup rumit, bahkan hingga kini masih ada yang belum mendapatkan kepastian. Kendatig agal berangkat haji tahun ini, namun ia tetap menyimpan harapan besar untuk ibadah hajinya tahun berikutnya.

Ia pun berharap bisa memanjatkan doa-doa terbaik bagi keluarganya di Makkah nanti. ♦



GUBERNUR HERMAN DERU: ANGKA 5,42 PERSEN ITU NYATA!

Bangga Ekonomi Sumsel Tumbuh dari UMKM, Apresiasi BI

Gubernur Dr Herman Deru SH MM menegaskan bahwa angka pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan (Sumsel) sebesar 5,42 persen merupakan capaian yang nyata, berkualitas, dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur saat membuka festival Semarak UMKM Sriwijaya 2025, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang Indah Mall, Sabtu, 25 Oktober 2025.

"Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan ini bukan hanya karena sektor industri atau pertambangan. Angka 5,42 persen ini nyata karena dihasilkan dari kerja kolaboratif antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan yang memberikan stimulan langsung kepada pelaku usaha," katanya.

Pada ekonomi dengan pertumbuhan yang hanya ditopang oleh sektor besar seperti tambang atau minyak dan gas (migas), sering kali tidak berdampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumsel fokus mendorong

pertumbuhan ekonomi inklusif dan otentik dengan memperkuat sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

Gubernur pun mengapresiasi peningkatan jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yang kini semakin banyak menjadi nasabah perbankan. Ini merupakan bukti meningkatnya literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

"Data terakhir menunjukkan ada sekitar 600 ribu pelaku UMKM di Sumsel. Tantangan kita sekarang adalah memperluas dan memperkuat basis pelaku usaha ini agar lebih produktif," kata Gubernur Deru.

Gubernur juga mendorong agar kolaborasi lintas sektor tidak berhenti di hulu, tetapi terus berlanjut hingga tahap pengolahan produk hilir, termasuk sektor rempah yang memiliki nilai historis dan ekonomi tinggi.

"Belanda dan Portugis datang ke Indonesia karena rempah. Artinya, kita punya

kekayaan luar biasa yang harus kita kelola agar bernilai tambah tinggi," tegasnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasinya kepada Bank Indonesia dan seluruh mitra perbankan atas dukungannya terhadap penguatan UMKM di daerah.

Hj Feby Deru Mitra Kerja Terkolaboratif BI

Gubernur Herman Deru menyerahkan penghargaan GSMP Award yang diberikan kepada masyarakat yang telah menyelenggarakan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) 2025 untuk berbagai kategori.

Di antara para penerima award ada nama Ketua TP PKK Provinsi Sumsel Hj. Feby Deru, yang dianugerahi penghargaan kategori Mitra Kerja Terkolaboratif dari Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Bambang Pramono, menegaskan komitmen BI untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sumsel yang inklusif dan berkelanjutan.

"Berdasarkan data terkini, perekonomian Sumatera Selatan masih mampu tumbuh sebesar 5,42 persen, sebuah capaian yang patut diapresiasi di bawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru," ujar Bambang.

Ia menilai, berbagai inovasi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil menjaga daya tahan ekonomi, terutama melalui penguatan sektor pertanian, perkebunan, dan industri olahan.

"Kita sering lupa bahwa rempah-rempah yang menjadi alasan bangsa lain datang ke negeri ini selama ratusan tahun adalah potensi besar yang kita miliki. Kini saatnya kita kelola dengan lebih baik," tambahnya.

Untuk memperkuat peran UMKM, BI Sumsel menginisiasi gerakan 'Seribu Sultan UMKM Sumatera Selatan' guna melahirkan pelaku usaha lokal yang naik kelas dan menjadi penggerak ekonomi baru. Salah satu produk unggulan yang diangkat adalah kopi Semendo, yang memiliki potensi besar namun belum dimanfaatkan optimal.

Selain itu, BI Sumsel menghadirkan 39 pelaku UMKM unggulan hasil kurasi daerah yang menampilkan berbagai produk wastra dan kuliner lokal, sebagai bentuk nyata dukungan terhadap peningkatan daya saing dan pengembangan ekonomi hijau.

"Kami ingin agar UMKM Sumsel juga

mengembangkan produk ramah lingkungan, baik dari bahan baku alami maupun proses produksinya," jelas Bambang.

Ia menambahkan, Bank Indonesia akan terus menjalankan kebijakan moneter dan

UMKM. Kami mengajak seluruh perbankan untuk berperan aktif memperkuat perekonomian daerah," katanya.

Turut hadir Anggota DPR RI Komisi XI Bertu Merlas, Ketua Dekranasda Provinsi



makroprudensial yang akomodatif untuk mendukung pembiayaan sektor produktif.

"Penurunan suku bunga dan berbagai insentif bagi perbankan diharapkan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku

Sumsel sekaligus Ketua TP PKK Provinsi Sumsel Hj. Feby Herman Deru, Ketua TP PKK Kota Palembang, Hj. Dewi Sastrani Ratu Dewa dan para Kepala OPD Provinsi Sumsel. ♦

Festival Rempah Sumatera Selatan 2025

GOVERNOR: LIFT WEALTH OF SUMSEL TO NATIONAL STAGE

Gubernur Herman Deru membuka Festival Rempah Sumatera Selatan 2025 yang diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK Provinsi Sumsel. Festival Rempah ini berlangsung selama tiga hari, mulai 24 hingga 26 Oktober 2025, dan menjadi ajang memperkenalkan sekaligus merayakan kekayaan rempah khas dari berbagai daerah di Bumi Sriwijaya. Festival kembali diselenggarakan di Palembang Trade Centerl (PTC) Mall dan dibuka Gubernur pada Jumat, 24 Oktober 2025.

Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas terselenggaranya Festival Rempah Sumatera Selatan 2025. Karena menurutnya, rempah-rempah bukan hanya bagian dari warisan budaya, tetapi juga potensi ekonomi yang besar bagi masyarakat di provinsi ini.

"Festival Rempah Sumsel 2025 ini menjadi momentum bagi para Bupati dan Wali Kota di Sumatera Selatan untuk lebih melek terhadap kekayaan rempah yang kita miliki. Jadikan daerah kita sebagai penghasil dan penggerak komoditas

rempah. Banyak manfaat dari rempah, baik untuk kebutuhan sendiri maupun sebagai produk unggulan yang bisa menarik pasar luar," ujar Gubernur.

Gubernur Herman Deru juga mengajak seluruh masyarakat untuk lebih mencintai dan memberdayakan kekayaan alam Sumsel.

"Mari kita dayagunakan sumber daya kita yang melimpah. Jangan sampai kekayaan ini tidak dimanfaatkan. Rempah bukan hanya soal rasa, tapi juga identitas daerah dan peluang ekonomi," tambahnya.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Selatan Hj Feby Deru dalam kesempatan yang sama menyampaikan, bahwa Festival Rempah tidak sekadar menjadi ajang pameran. Festival Rempah Sumsel 2025 sekaligus bentuk nyata kebanggaan akan hasil bumi Sumatera Selatan.

"Kami di PKK tidak hanya ingin membantu memasarkan rempah, tetapi juga menanamkan rasa bangga terhadap hasil rempah yang merupakan identitas daerah kita. Tahun ini kami juga melibatkan ICSB dan para pelaku UMKM kuliner dengan tema Asian Food agar potensi



rempah kita bisa dikemas lebih modern dan menarik," katanya.

Festival Rempah Sumsel 2025 dimeriahkan oleh stand-stand dari TP PKK Kabupaten dan Kota se-Provinsi Sumsel. Di samping itu hadir pula berbagai tenant UMKM dari ICSB Sumatera Selatan, yang menampilkan beragam olahan rempah, mulai dari bumbu masakan tradisional



hingga produk inovatif berbasis herbal.

Acara pembukaan juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, di antaranya Wali Kota Lubuk Linggau Rachmat Hidayat, Bupati Muara Enim Edison, Bupati Banyuasin Askolani, Walikota Prabumulih H. Arlan, Bupati OKU Teddy Meilwansyah, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad, Bupati OKI Muchendi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel Rachmat Wibowo, para Ketua TP PKK kabupaten/kota se-Sumsel, serta Koordinator ICSB Sumsel Samanta Tivani HD.

Dengan semangat kebersamaan dan rasa bangga terhadap kekayaan daerah, Festival Rempah 2025 menjadi wujud nyata kolaborasi antara pemerintah, PKK, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mengangkat rempah Sumatera Selatan ke tingkat yang lebih tinggi — bukan hanya sebagai bahan dapur, tetapi juga simbol identitas dan daya saing daerah.

Festival Rempah Sumatera Selatan 2025 resmi ditutup pada Minggu (26/10/2025) di halaman PTC Mall Palembang. Festival yang menjadi puncak rangkaian Jambore TP PKK Sumsel 2025 ini mengusung tema "Bersama Kader PKK, Kita Perkuat Semangat Kebersamaan, Kreativitas, dan Motivasi dalam Membangun Keluarga Berdaya dan Sejahtera untuk Sumsel Maju Menuju Indonesia Emas 2045." ADV



Groundbreaking Duplikat Jembatan Tanah Kering

GUBERNUR: JEMBATAN INI SANGAT STRATEGIS, PENGHUBUNG 3 KECAMATAN DAN 29 DESA

Gubernur Sumatera Selatan Dr Herman Deru SH MM, secara resmi melakukan Groundbreaking Pembangunan Duplikat Jembatan Tanah Kering dan Peningkatan Jalan Poros Pulau Rimau, Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin. Acara groundbreaking dilaksanakan di Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, Kamis, 23 Oktober 2025.

Jembatan yang berlokasi di Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau ini akan menjadi penghubung strategis.

"Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pembangunan Duplikat Jembatan Tanah Kering dan Peningkatan Jalan Poros Pulau Rimau - Selat Penuguan, Saya nyatakan resmi dimulai", ucap Gubernur.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa Jabatan politik yang dip-

ilih oleh rakyat, seperti presiden, gubernur, memiliki tanggung jawab untuk melayani dan mewakili kepentingan rakyat. Seperti halnya groundbreaking pembangunan jembatan dan Peningkatan jalan ini merupakan bentuk melayani pada rakyat.

Ditambahkan Gubernur, Kabupaten Banyuasin ini sangat luas sama luasnya dengan Provinsi Gorontalo. Pemprov Sumsel telah memberikan Bantuan sebesar Rp176 miliar untuk Kabupaten Banyuasin, dan uang tersebut adalah uang

rakyat yang salah satunya didapat dari pembayaran pajak.

"Untuk itulah mari kita bersama sama disiplin membayar pajak, jangan kita termasuk yang menikmati segala infrastruktur sementara kita tidak membayar pajak. Contohnya saja jumlah kendaraan di Sumsel ini ada 4 juta, sementara yang membayar pajak hanya 1 juta", ajaknya.

Gubernur juga menjelaskan meskipun kondisi keuangan kita saat ini terbatas tetapi tidak mengurangi pelayanan pada



masyarakat.

"Mengenai pemotongan keuangan ke daerah saya berupaya tenang dan berpikir bagaimana mencari solusi agar masyarakat dapat sejahtera," ujarnya.

Momen Bersejarah bagi Pulau Rimau

Sementara itu, Bupati Banyuasin Askolani Jasi dalam sambutannya menegaskan bahwa hari groundbreaking ini merupakan momen sangat bersejarah bagi masyarakat Pulau Rimau.

"Tidak ada kata yang banyak saya ucapkan hanya mengucapkan ribuan terimakasih kepada Bapak Gubernur Sumsel yang telah memberikan bantuan pada Kabupaten Banyuasin. Tahun ini melalui dana bantuan khusus Gubernur, Banyuasin mendapatkan Bantuan Gubernur Rp176 miliar lebih, yang terdiri dari 25 poros jalan, dan 2 untuk jembatan" jelasnya.

Ditambahkan Bupati Askolani bahwa jembatan ini melintasi 3 kecamatan 29 Desa, Nilai kontrak kurang lebih 25.000.000.000,- (Dua puluh lima miliar rupiah) Yang bersumber dari Bantuan Gubernur Sumsel bersifat khusus dan APBD Banyuasin.

Sementara itu warga Pulau Rimau yang bernama Ishak menyampaikan ucapan rasa syukur dan terimakasih pada gubernur Sumsel dan bupati Banyuasin atas rencana pembangunan jembatan.

"Jembatan ini dibangun tahun 1990,

adalah urat nadi segala aktifitas warga disini. Semoga Bapak semua selalu diberikan kesehatan," tutur Ishak.

Turut hadir Forkompimda Kab Banyuasin, Para Ka. OPD Provinsi Sumsel dan Kabupaten Banyuasin.. ♦ADV





Wagub Cik Ujang Ajak Pemuda Sumsel

PENENTU SEJARAH BANGSA PADA MOMEN HARI SUMPAAH PEMUDA

Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-97 Tahun 2025 di halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan berlangsung khidmat, Selasa (28/10/2025) pagi. Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang tampil sebagai inspektur upacara (Irup) dan menyampaikan amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia, Erick Thohir.

Dalam sambutan yang dibacakannya, Wagub Cik Ujang menyampaikan pesan mendalam dari Menpora sekaligus Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pesan itu menekankan agar para pemuda Indonesia berani bermimpi besar dan tidak takut gagal, karena pemuda bu-

kan pelengkap sejarah, tetapi penentu sejarah berikutnya.

"Pemuda harus punya keberanian menantang zaman. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan," ujar Cik Ujang dalam amanatnya. Ia menegaskan, Indonesia membutuhkan generasi muda yang



tidak hanya bermimpi, tetapi juga berani mewujudkannya dengan tindakan nyata.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa perjuangan generasi muda masa kini tidak lagi menggunakan bambu runcing, melainkan ilmu pengetahuan, kerja keras, dan kejujuran. Meski begitu, semangat juang yang menggelora tetap sama: menjaga Indonesia agar tetap tegak dan tidak kalah menghadapi tantangan global.

Menurut Menpora, generasi muda saat ini menghadapi zaman yang bergerak cepat dan penuh tantangan. Namun, di tengah tekanan itu, masih banyak anak muda Indonesia yang jujur, tangguh, dan berani. Inilah, kata Cik Ujang, kekuatan sejati bangsa Indonesia.

"Kita butuh pemuda yang patriotik, gigih, dan memiliki empati tinggi terhadap sesama. Pemuda yang mencintai tanah air bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata," tegasnya di hadapan peserta upacara yang terdiri dari ASN, pelajar, dan organisasi kepemudaan.

Wagub Cik Ujang juga menyampaikan ucapan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97 atas nama Menpora Republik Indonesia. "Mari kita jaga api perjuangan ini agar tidak padam. Mari kita buktikan bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain," ucapnya lantang.

Momentum peringatan HSP ini, lanjutnya, menjadi pengingat bahwa perjuangan pemuda di masa lalu telah membuka jalan bagi kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Kini, giliran generasi muda untuk meneruskan semangat itu melalui inovasi, kreativitas, dan kolaborasi.

Ia juga berpesan agar pemuda Sumsel menjadi contoh dalam membangun karakter bangsa yang kuat dan bermartabat. "Jangan pernah berhenti belajar dan berbuat baik. Jadilah pemuda yang membawa manfaat bagi masyarakat," tambahanya.

Upacara berjalan lancar dan penuh semangat nasionalisme. Lagu kebangsaan, pembacaan ikrar Sumpah Pemuda, dan pengibaran bendera merah putih berlangsung dengan khidmat. Seluruh peserta tampak antusias mengikuti jalannya upacara.

Turut hadir dalam kesempatan itu sejumlah pejabat Forkopimda Sumsel, di antaranya Brigjen Pol M. Zulkarnain, S.I.K., M.Si yang mewakili Kapolda Sumsel, serta perwakilan dari Pengadilan Tinggi dan Kodam II Sriwijaya. Kehadiran mereka menjadi simbol sinergi antara pemerintah dan lembaga dalam mendukung semangat kepemudaan. ♦ADV





GUBERNUR HERMAN DERU BUKA RETRET LASKAR PANDU SATRIA II

Siapkan Generasi Emas Penerus Sumsel

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru membuka secara resmi Retret Laskar Pandu Satria (LPS) Jilid II Tahun 2025 yang digelar di Bumi Perkemahan Gandus, Palembang, Kamis (6/11/2025). Pada kesempatan tersebut, Gubernur bertindak sebagai Inspektur Upacara Pembukaan.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumsel ini diikuti oleh 100 peserta dari SMA dan SMK perwakilan 17 kabupaten/kota

se-Sumatera Selatan. Para peserta merupakan siswa yang terdaftar dalam program bimbingan konseling di sekolah masing-masing dan telah melalui proses seleksi.

Pembukaan berlangsung khidmat



dengan suasana upacara yang tertib dan penuh semangat. Dalam amanatnya, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa retret ini bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan bagian penting dari pembinaan karakter, kedisiplinan, dan kepemimpinan generasi muda Sumsel.

"Alhamdulillah, kita dapat kembali melaksanakan kegiatan ini. Artinya, pelaksanaan pada jilid pertama memberi manfaat dan dampak positif bagi peserta sebelumnya," ujar Herman Deru.

Menurut Gubernur, pelatihan dan pembinaan melalui Retret LPS menjadi jawaban atas kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tengah dinamika perkembangan zaman. Kegiatan ini juga menggandeng unsur TNI dan Polri untuk memberikan pembinaan fisik dan kedisiplinan secara langsung.

"Retret ini kita laksanakan karena kebutuhan. Di sini peserta mendapat pembinaan karakter, disiplin, dan semangat kepemimpinan. Mereka adalah pemuda-

di lingkungannya. Ini bukti bahwa pembinaan yang benar akan menghasilkan karakter yang kuat," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga berpesan agar para instruktur dan pembimbing menjalankan peran mereka dengan penuh tanggung jawab, ketulusan, dan kesabaran.

"Saya berharap nilai keikhlasan, disiplin,

bangsaan, hingga pembekalan spiritual.

Sementara itu, Ketua Satgas Retret LPS sekaligus Kadisporsu Sumsel Rudi Irawan dalam laporannya menyampaikan bahwa program ini bertujuan menumbuhkan pribadi pemuda yang berkarakter kuat, berjiwa kepemimpinan, bertanggung jawab, dan memiliki semangat kebangsaan.

Turut hadir pada pembukaan kegiatan



pemudi terpilih yang akan menjadi generasi penerus Sumsel," jelasnya.

Lebih jauh, Gubernur menekankan pentingnya mempersiapkan pemuda menghadapi bonus demografi 2045, ketika Indonesia diproyeksikan memiliki sekitar 67 persen penduduk usia produktif.

"Pada 2045 nanti, kalianlah yang menerima estafet kepemimpinan bangsa. Bukan hanya dari segi jumlah, tapi kualitas. Pemuda Sumsel harus siap bersaing," kata Herman Deru.

Ia menyebutkan bahwa keunggulan SDM akan menjadi kunci kemajuan suatu daerah. Karena itu, penanaman karakter, wawasan kebangsaan, ilmu pengetahuan, dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi harus digalakkan sejak dini.

"Saya optimis, pemuda Sumsel tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelopor kemajuan," ujarnya.

Gubernur juga mengapresiasi peserta Retret LPS Jilid I yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif di sekolah dan lingkungannya. Menurutnya, hal itu menjadi bukti nyata efektivitas program.

"Senior kalian berhasil menjadi contoh

dan pantang menyerah benar-benar ditanamkan kepada para peserta. Mereka harus siap menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks," pesannya.

Retret Laskar Pandu Satria Jilid II digelar selama 10 hari, mulai 5 hingga 14 November 2025. Kegiatan meliputi pembinaan fisik, mental, kepemimpinan, wawasan ke-

tersebut Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang, Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian, Ketua Komisi V DPRD Sumsel Alwis Gani, Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Dr. Haryo Sughiartono, Ketua Kwarda Pramuka Sumsel H. Riza Fahlevi, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel. ♦ ADV

PMI SUMSEL DAN PWNu KOLABORASI GELAR DONOR DARAH DI PONPES AULIA CENDEKIA

Dalam semangat kolaborasi antara lembaga keagamaan dan kemanusiaan, Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sumatera Selatan bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNu) Sumsel menggelar kegiatan donor darah di Pondok Pesantren Aulia Cendekia, Senin (27/10/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua PMI Sumsel, Hj. Feby Deru, sebagai bagian dari program jemput bola untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya donor darah. Program tersebut menjadi strategi efektif dalam menjaga ketersediaan stok darah di PMI dan rumah sakit.

Menurut Feby, pelaksanaan donor darah di lingkungan ponpes menjadi langkah strategis karena pesantren memiliki komunitas besar yang solid dan penuh semangat gotong royong. "Kita tidak hanya menunggu masyarakat datang, tapi mendekatkan PMI ke mereka," ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan semacam ini juga menjadi bentuk edukasi bahwa mendonorkan darah bukanlah hal menakutkan, melainkan tindakan mulia yang dapat menyelamatkan nyawa orang lain.

"Setetes darah yang kita berikan, sangat berarti bagi yang membutuhkan. Ini bukan sekadar donor, tapi bentuk kepedulian yang nyata," kata Feby.

PMI Sumsel juga memperkenalkan program donor darah pemuda yang menyasar kalangan pelajar dan mahasiswa. Program ini dirancang untuk membentuk generasi

muda yang sadar pentingnya donor darah secara rutin.

"Anak muda perlu dibekali rasa tanggung jawab sosial. Melalui donor darah, mereka belajar berbagi dan peduli," jelasnya.



Setetes darah yang kita berikan, sangat berarti bagi yang membutuhkan. Ini bukan sekadar donor, tapi bentuk kepedulian yang nyata.

Kegiatan di Ponpes Aulia Cendekia disambut hangat oleh para santri dan warga sekitar. Antusiasme tampak dari banyaknya peserta yang ikut mendonorkan darah. PMI Sumsel pun menyiapkan tenaga medis dan fasilitas yang memadai.

Ketua PWNu Sumsel, KH Hendra Zainuddin, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif yang digagas PMI Sumsel. Menurutnya, kerja sama antara organisasi kemanusiaan dan keagamaan seperti ini harus



terus diperkuat.

"PMI dan NU memiliki semangat yang sama, yaitu membantu sesama tanpa pamrih. Kami berterima kasih kepada Ibu Feby dan jajaran PMI atas kerja sama yang terus terjalin," ujarnya.

Kegiatan donor darah ini juga diharapkan dapat menjadi agenda rutin di lingkungan pesantren. Dengan semangat kolaborasi, PMI dan PWNU berkomitmen memperluas kegiatan serupa ke ponpes lain di seluruh Sumsel.

Sinergi antara PMI Sumsel dan PWNU menjadi contoh konkret bahwa nilai-nilai kemanusiaan dapat berjalan seiring dengan nilai keagamaan, menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat luas. ♦





Sumsel Peringkat 2 Nasional Lembaga Pendidikan Pesantren 2025 **GUBERNUR BERIKAN DUKUNGAN BOS BAGI PESANTREN ALIYAH**

Gubernur Dr Herman Deru SH MM mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas capaian Provinsi Sumatera Selatan, yang berhasil menempati Peringkat Kedua Nasional dalam Penilaian Lembaga Pendidikan Pesantren.

Menurut Gubernur, capaian tersebut merupakan bukti nyata bahwa pesantren di Sumatera Selatan telah berperan aktif dan diakui dalam sistem pendidikan formal nasional.

"Menjadi nomor dua nasional berarti kita berhasil mengungguli banyak provinsi besar lainnya, termasuk di Pulau Jawa. Ini bukti bahwa pesantren kita sudah dikenal dan diakui," ujar Gubernur saat menerima audiensi Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan di Ruang Rapat Gubernur, Rabu, 29 Oktober 2025.

Terkait hal tersebut, Gubernur meminta agar capaian ini turut disebarluaskan di seluruh pesantren di Sumsel melalui publikasi dan pemasangan spanduk penghargaan tersebut.

"Penghargaan ini tidak mungkin diraih tanpa kerja keras para petugas lapangan dan pengelola pesantren di setiap daerah, maka dari itu saya harap ini dapat dipublikasikan di setiap Ponpes di Sumatera Se-

latan" tegasnya.

Lebih lanjut Gubernur mengatakan bahwa pondok pesantren kini telah menjadi bagian dari pendidikan formal yang harus mendapatkan perhatian setara dengan lembaga pendidikan lainnya. Ia juga menyoroti pentingnya dukungan BOS Daerah (Bantuan Operasional Sekolah) bagi pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal, terutama pada jenjang Aliyah.

"Saya ingin mulai tahun 2026, data santri Aliyah bisa masuk untuk diberikan bantuan per siswa per bulan, secara by name by institution. Ini bentuk keseriusan Pemprov Sumsel dalam mengakui pesantren sebagai institusi pendidikan formal," jelasnya.

Gubernur juga mendorong agar pesantren mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi informasi (IT) agar dapat mengikuti perkembangan jaman dan meningkatkan daya saing para santri.

"Di era digital ini, kalau santri tidak menguasai teknologi, maka akan sulit bersa-



ing. Pesantren juga harus adaptif terhadap perkembangan zaman," ungkapnya.

Doa Seribu Santri di Griya Agung

Sementara itu, Pimpinan Ponpes Aulia Cendikia Palembang KH. Hendra Zainuddin Al Qodiri mengatakan pihaknya berencana menggelar Doa Seribu Santri di Griya Agung sebagai bentuk syukur atas penghargaan nasional yang diterima oleh

Gubernur Sumsel.

Selain itu, Ustadz Hendra juga menyampaikan beberapa aspirasi dari Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Selatan. Di antaranya adalah permintaan rehabilitasi berat Kantor PWNU, Penandatanganan Prasasti kantor baru, serta Bantuan mobil operasional.

Ia juga mengundang Gubernur Herman Deru untuk hadir

dan membuka kegiatan Seminar Pesantren Ramah Anak dan Pelatihan Santri Terampil yang akan digelar pada 8 November 2025.

Pada kesempatan yang sama sekaligus digelar pembacaan doa syukuran atas Anugerah Ponpes Award yang diperoleh

Gubernur Sumsel Herman Deru atas kepedulian dan perhatian besarnya terhadap dunia pesantren di Sumatera Selatan.

Menanggapi itu, Gubernur Herman Deru pun meminta agar Kegiatan Syukuran yang direncanakan dapat dirangkaikan dengan Penyerahan Bantuan BOS Daerah kepada Seluruh Pondok Pesantren dan Launching Program GSMP Goes To Pondok Pesantren. ♦





JELAJAHI DESTINASI WISATA UZBEKISTAN EKONOMIS, HALAL & MENGESANKAN

Uzbekistan memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata religi dan sejarah yang sangat menarik bagi wisatawan Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini, aktif melakukan berbagai langkah untuk menarik minat wisatawan dari Indonesia, salah satunya dengan menambah jumlah penerbangan langsung dari Indonesia ke Uzbekistan.



Registan Square Samarkand

Uzbekistan sendiri merupakan salah satu negara di Asia Tengah, yang dikenal memiliki warisan sejarah dan religi yang kaya. Kota-kota seperti Bukhara dan Samarkand menjadi destinasi paling populer, karena menyimpan jejak peradaban masa lalu yang berharga bagi umat Islam.

Contohnya di Bukhara, pengunjung dapat menemukan berbagai gedung bersejarah yang pada masanya menjadi pusat kedudayaan dan pendidikan Islam.

Kota Bukhara juga dikenal sebagai tempat kelahiran cendekiawan muslim ternama, Ibnu Sina atau yang dikenal sebagai Avicenna di dunia barat, yang diju-luki sebagai bapak kedokteran modern. Selain itu, Bukhara juga menjadi tempat lahir Imam Bukhari, salah satu perawi hadits yang sangat dihormati dan populer dalam Islam.

Sementara itu, di Samarkand, wisa-

tawan juga dapat mengunjungi makam Amir Temur, seorang penguasa Islam keturunan Turki-Mongol, yang dikenal gagah perkasa. Amir Temur berhasil menguasai hampir seluruh Asia Tengah, Asia Barat, dan Asia Selatan pada masanya, dan makamnya kini menjadi salah satu situs sejarah yang ramai diziarahi.

Dengan lokasi-lokasi yang bersejarah ini, Uzbekistan kini mulai dilirik sebagai destinasi wisata religi bagi umat Muslim, bersaing ketat dengan Turki. Negara ini, bahkan menawarkan paket wisata religi yang dapat disinergikan dengan perjalanan umrah.

Wisata ke Uzbekistan Tanpa Visa

Uzbekistan berada di kawasan Asia Tengah, dan memiliki tempat-tempat tujuan wisata religi yang menarik bagi para peziarah, khususnya dari Indonesia. Mulai dari Tashkent, Samarkand, Bukhara,

hingga Khiva.

"Pertama, Uzbekistan sangat menarik bagi Indonesia, negara ini bebas visa untuk warga Indonesia. Kedua, penerbangan sekarang sudah tersedia. Juga Uzbekistan adalah tempat paling menarik untuk situs ziarah Islam karena merupakan bumi asal ilmuwan Islam seperti Al Bukhari, At Tirmidzi, Naqshabandi, dan lain-lain dilahirkan," kata Azimkhon Khodjaev, selaku Manager Uzbekistan Airways Indonesia, seperti dikutip dari suara muslim.net.

Menurut Azimkhon Khodjaev, selain peziarah dapat berkunjung ke monumen Imam Al Bukhari ada banyak destinasi menarik lainnya di Uzbekistan.

"Bahkan di kota Tashkent, Anda memiliki banyak tempat, ada empat Quran tertua di dunia. Salah satunya adalah di Tashkent. Quran tertua adalah Quran Utsman di Tashkent. Jadi Anda dapat mengunjungi itu dan Anda dapat mengunjungi Bukhara, Samarqan, Syiva. Banyak kota kuno dengan museum terbuka. Anda tahu Anda harus pergi ke museum (berjalan-jalan)," tambahnya.

Dalam sejarah, sejumlah tokoh muslim terkenal berasal dari Uzbekistan, antara lain Imam Al Bukhari, Khwaja Bahaiddin Naqshabandi, Abu Isa Muhammad at-Tirmidzi, Muhammad Abu Mansur al-Maturidi, Amir Temur, dan Abu Ali Ibn Sina.

Selain itu, negara tersebut juga memiliki warisan budaya yang telah berusia ratusan tahun.

Transportasi ke Uzbekistan

Dalam upaya untuk memudahkan para pengunjung berwisata ke Uzbekistan, pihak Uzbekistan Airways telah membicarakan kerja sama pengembangan ke depan dengan Garuda Indonesia berdasarkan nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani sejak 1995.

"Akan ada kesepakatan (kontrak) antara Uzbekistan Airways dan Garuda Indonesia untuk menyediakan penerbangan bagi penumpang dari Surabaya ke Jakarta lalu dilanjutkan (disambungkan) dengan penerbangannya MR Azim ke Taskent secara viceversa/ sebaliknya (hanya butuh satu tiket saja)," kata Azimkhon dalam Launching Uzbekistan Airways Direct Flight di Surabaya.

Dalam kesempatan itu, Uzbekistan Airways juga merilis Touress.com. sebagai aplikasi kemudahan untuk pelancong.

"Touress.com memiliki destinasi Uzbekistan dan travel agent dengan mudah membuat paket wisata sendiri melalui login dan mendapatkan informasi secara



instant serta fast respon. Touress.com sebagai B to B Online Destination Management Company berpartisipasi dalam agenda ini," kata Dedi, selaku Regional Manager Touress.com.

Touress merupakan perusahaan internasional dengan kantor di Indonesia, Timur Tengah, Eropa dan Asia Tengah.

Sebuah Permata yang Tersembunyi

Uzbekistan, merupakan sebuah permata tersembunyi di jantung Asia Tengah, bukan hanya sekadar lanskap indah dengan arsitektur megah. Tanah ini adalah saksi bisu dari sejarah peradaban Islam yang gemilang.

Karena di sinilah lahir dan bersemi para cendekiawan dan ulama besar yang



Makam Imam Bukhari



Charvak Lake Tashkent

cahaya ilmunya menerangi dunia. Salah satunya adalah Imam Bukhari, seorang ulama hadis legendaris yang menjadi tiang utama dalam ilmu pengetahuan Islam.

Lahir di Bukhara, Uzbekistan, Imam Bukhari mendedikasikan hidupnya untuk mencari dan mengumpulkan hadits-hadits Rasulullah SAW. Karyanya yang paling monumental adalah, Sahih Bukhari, yang menjadi salah satu rujukan utama dan paling sahih bagi umat Muslim di seluruh dunia. Setiap lembar kitabnya adalah bukti ketelitian dan keteguhannya dalam menjaga kemurnian ajaran Islam.

Selain melahirkan tokoh Islam dunia, seperti Imam Bukhari, Uzbekistan juga memiliki tokoh Islam lainnya, seperti Ibnu Sina, Amir Timur dan banyak lagi. Sementara itu, Uzbekistan juga memiliki tempat-tempat bersejarah yang pernah menjadi tempat untuk menuntut ilmu dan melahirkan budaya Islam.

Berikut Tempat-tempat Wisata Religi di Uzbekistan, Di antaranya Adalah:

1. Tashkent: Pintu Gerbang Modern Uzbekistan

- Pegunungan Chimgan (Amirsoy Resort) & Cable Car: Menikmati pemandangan spektakuler pegunungan yang diselimuti salju dan rasakan keseruannya dengan menaiki cable car.
- Charvak Lake: Menyaksikan danau buatan dengan air yang jernih, dikelilingi oleh pegunungan indah.
- Amir Timur Square: Pusat kota yang megah dengan patung pahlawan nasional Amir Timur.
- Kompleks Imam Khasti: Kunjungi pusat keagamaan yang menjadi tempat penyimpanan Al-Quran kuno Utsman Mushaf, salah satu Al-Quran tertua di dunia.

2. Bukhara: Kota Sejarah Kelahiran Imam Bukhari

- Masjid Bolo Hauz: Masjid bersejarah dengan arsitektur menawan yang dijuluki "Masjid 40 Pilar".
 - Bukhara Citadel Ark: Benteng kuno yang menyimpan kisah kejayaan para penguasa Bukhara.
3. Samarkand: Mutiara Jalur Sutra dan Kota Peristirahatan Terakhir Imam Bukhari
- Gijduvan: Kunjungi pusat kerajinan keramik tradisional yang terkenal.
 - Registan Square: Alun-alun paling

- ikonik di Asia Tengah, dikelilingi oleh tiga madrasah yang megah.
- Shakhi Zindeh: Kompleks makam raja-raja dan bangsawan dengan arsitektur mozaik yang memukau.
- Makam Gur Emir: Mausoleum megah tempat peristirahatan terakhir Amir Timur dan keluarganya.
- Masjid Bibi Khanum: Salah satu masjid terbesar dan termegah di Asia Tengah, dibangun untuk istri kesayangan Amir Timur.
- Kompleks Makam Imam Bukhari: Puncak dari perjalanan spiritual ini. Berziarah sambil merenungi kebesaran Imam Bukhari di tempat peristirahatan terakhirnya, merasakan kedamaian dan keberkahan yang terpancar dari makam sang ulama besar.

4. Khiva

- Kota tua yang seperti museum terbuka, jalan-jalan berbatu, dinding tanah

liat.

- Menara-menara cantik.
- Wisata Kuliner Halal yang Kaya Sejarah dan Budaya

Uzbekistan memang belum sepopuler Turki atau Arab Saudi, atau bahkan Dubai dalam urusan wisata halal, tapi negara ini menyimpan pesona luar biasa yang membuat banyak pengunjung merasa penasaran.

Uzbekistan tidak hanya kaya akan sejarah dan tempat-tempat suci, namun juga menawarkan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Salah satunya adalah Plov, hidangan nasi khas Uzbekistan, yang merupakan salah satu contoh kekayaan kulinernya.

Di balik setiap suapan plov, tersimpan cerita tentang peradaban Timurid dan pengaruh Budaya Persia. Selain plov, pengunjung juga bisa mencicipi lezatnya shashlik (Sate Kambing) sambil menikmati suasana bazaar yang semarak.



Pegunungan Chimgan Area Ski



Khiva Kalta Minor



Amir Temur Square

Uzbekistan Terkenal Apanya Sih?

Uzbekistan dikenal sebagai rumah dari kota-kota bersejarah yang pernah menjadi pusat peradaban Islam dan jalur perdagangan jalur sutra. Negara ini juga menawarkan banyak spot, yang bisa untuk mengabadikannya dalam foto-foto yang menarik. Selain itu, Uzbekistan juga terkenal dengan kain ikat, karpet buatan tangan.

Negara yang Aman

Uzbekistan termasuk negara yang aman untuk wisatawan, termasuk untuk para peziarah Muslim dari Indonesia. Pemerintah setempat cukup aktif men-



jaga stabilitas dan kenyamanan wisatawan, apalagi pariwisata jadi salah satu fokus utama negara ini.

Warga lokalnya juga terkenal ramah dan suka membantu, terutama terhadap wisatawan Muslim. Jadi, jika berjalan-jalan atau berwisata ke Uzbekistan, itu akan merasa seperti di rumah sendiri karena nilai-nilai budaya dan agama mereka cukup mirip dengan umat Islam di Indonesia.

Perkiraan Biaya

Biaya wisata ke Uzbekistan bervariasi, mulai dari sekitar Rp 21 juta hingga lebih dari Rp 40 juta, tergantung pada paket wisata yang dipilih, lama perjalanan, dan

tingkat kenyamanan (seperti jenis akomodasi dan fasilitas).

Paket tur standar umumnya mulai dari sekitar Rp 21 juta-an hingga Rp 28,5 juta untuk 7-9 hari dengan akomodasi hotel bintang 3-4. Sementara paket premium bisa mencapai Rp 35 juta-Rp 40 juta dengan fasilitas eksklusif.

Tips Keamanan Pribadi:

- Selalu simpan salinan paspor dan tiket di tempat terpisah.
- Hindari bepergian larut malam sendirian di area sepi.
- Gunakan aplikasi transportasi lokal atau pesan dari hotel/penyedia perjalanan resmi. ♦



Uzbekistan kini mulai dilirik sebagai destinasi wisata religi bagi umat Muslim, bersaing ketat dengan Turki.



Presiden Prabowo Restui Pembentukan Ditjen Pesantren.

Momen Hari Santri

PRESIDEN SETUJUI PEMBENTUKAN DITJEN PESANTREN

Bertepatan dengan peringatan Hari Santri 2025, Presiden RI, Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar bersyukur atas kabar yang membahagiakan ini. Ia pun mengapresiasi para pihak yang telah mengawal terbitnya izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren, khususnya Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo Muhammad Syafi'i.

"Wabil khusus Wamenag telah memperjuangkannya sesegera mungkin," ujar Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, usai memimpin Apel Hari Santri 2025 di halaman Kantor Kementerian Agama, seperti dikutip dari laman Kemenag, Rabu (22/10/2025).

Menurut Menag, usul pembentukan Ditjen Pesantren ini sebenarnya sudah berlangsung sejak 2019, saat era Menag Lukman Hakim Saifuddin. Usulan Kemenag ke Kemenpan dan RB kembali diajukan pada 2021 dan 2023 pada era Menag

Yaqut Cholil Qoumas. Terakhir, usulan itu kembali diajukan ke Kemenpan dan RB pada 2024, di era Menag Nasaruddin Umar.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo Muhammad Syafi'i menyampaikan lebih detail terkait terbitnya izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren.

"Alhamdulillah, saya baru saja menerima kabar dari Kementerian Sekretariat Negara tentang terbitnya Persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama," kata Wamenag.

Melalui surat nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tertanggal 21 Oktober 2025, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi memerintahkan agar segera dibentuk Ditjen Pesantren di

lingkungan Kementerian Agama.

"Dengan surat ini, saya ingin menyampaikan bahwa Presiden telah menyetujui pembentukan Ditjen Pesantren. Pembentukan ini bertujuan agar perhatian terhadap pesantren semakin besar, baik dari sisi personalia, pendanaan, maupun program, sehingga pemerintah semakin hadir dalam mendukung perkembangan pesantren di seluruh Indonesia," tambahnya.

Romo Syafi'i menambahkan, bahwa kehadiran Ditjen Pesantren akan memperkuat fungsi pesantren dalam tiga ranah utama: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

"Semoga dengan adanya Ditjen ini, pesantren ke depan dapat semakin berdaya dan berkontribusi besar bagi bangsa," ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo, jajaran Kabinet

Merah Putih, serta seluruh insan Kemenag yang sejak 2019 konsisten memperjuangkan lahirnya Ditjen Pesantren.

Menag Tegaskan Komitmen

Menag Nasaruddin Umar mengungkapkan, Ditjen Pesantren ini, nantinya akan melakukan konsolidasi pondok pesantren secara nasional. Selama ini, mungkin ada pesantren yang belum terdata atau belum terjangkau bantuan pemerintah.

"Dengan adanya Ditjen, hal-hal tersebut bisa tertangani dengan lebih baik karena ada perangkat kerja yang lebih luas dan sistem yang lebih terkoordinasi," ungkap Menag.

Menag menegaskan, bahwa keberadaan Ditjen Pesantren akan membantu pemerintah memastikan seluruh pesantren dapat menjalankan peran strategisnya dengan baik.

"Dengan Ditjen ini, kita bisa memanfaatkan seluruh pesantren dalam arti positif. Pemerintah ingin memastikan semua pesantren benar-benar menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat secara optimal," ujar Menag tegas.

Menurutnya, kehadiran Ditjen Pesantren juga akan memperkuat kontribusi Kemenag dalam menciptakan kerukunan umat, sekaligus membangun generasi santri yang kuat, cerdas, dan berakhlak mulia.

"Harapan kita, Hari Santri menjadi momentum kebangkitan semangat santri untuk menjawab tantangan zaman," imbuh Menag.

Lebih lanjut, Menag menyatakan bahwa sistem pendataan dan sertifikasi pesantren akan diintensifkan agar data menjadi lebih valid dan pelaksanaan program semakin tertib.

"Selama ini sertifikasi sudah berjalan, tapi ke depan akan lebih diperkuat agar data pesantren semakin valid dan program-program pembinaannya lebih tepat sasaran," tutup Menag.

Restu Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto merestui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di bawah Kementerian Agama. Restu tersebut disampaikan Presiden dalam pidatonya pada Malam Bakti Santri untuk Negeri, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

Menurut Presiden Prabowo, langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memperkuat ekosistem pendidikan pesantren sebagai pilar penting pembangunan nasional.

"Saya menyampaikan bahwa saya telah

merestui usulan dibentuknya Direktorat Jenderal Pesantren. Ini menunjukkan prioritas strategis pemerintah untuk semakin memperhatikan, melindungi, memperkuat, dan meningkatkan kesejahteraan pondok pesantren," kata Presiden Prabowo, dalam tayangan video pada momen Malam Bakti Santri di TMM, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Pengakuan Negara terhadap Santri

Presiden Prabowo telah merestui pembentukan Ditjen Pesantren, bertepatan dengan momentum Hari Santri sebagai simbol pengakuan negara atas peran besar pesantren dalam perjalanan bangsa.

"Hari Santri adalah momentum menggenang semangat juang para santri yang dengan ilmu, iman, takwa, dan cinta Tanah



Menteri Agama, Nasaruddin Umar.



Air turut merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia,” kata Presiden Prabowo.

Dalam momen yang merupakan rangkaian akhir peringatan Hari Santri 2025 ini, Presiden Prabowo juga menyinggung Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang digelorkan KH Hasyim Asy’ari sebagai tonggak sejarah penting. Menurutnya, semangat jihad itu tetap relevan di masa kini: menjaga keutuhan bangsa dengan ilmu dan keimanan.

Santri Pelopor Kemajuan Bangsa

Presiden menilai, santri masa kini tidak hanya menjadi penjaga moral bangsa, tetapi juga pelopor kemajuan. Tema Hari

Mengakhiri sambutannya, Presiden Prabowo mengajak seluruh santri dan masyarakat Indonesia untuk terus mengawal kemerdekaan menuju peradaban yang berkeadilan, berakhlak, dan bermartabat.

“Sekali lagi, Selamat Hari Santri Nasional 1447 Hijriah. Semoga Allah SWT senantiasa meridai para santri, para kiai dan nyai, serta seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Presiden.

Menag Ungkap Pesantren Sebagai Jantung Peradaban Bangsa

Pesantren memiliki peran fundamental dalam membangun peradaban bangsa Indonesia. Wajah Indonesia yang santun

tidak hanya cerdas pikirannya, tetapi juga bersih hatinya,” kata Menag Nasaruddin Umar, di Aula H.M. Rasjidi, Kantor Kemenag Thamrin, Senin (20/10/25).

Menag menambahkan, bahwa pesantren adalah lembaga yang mengajarkan ilmu yang bersumber dari Allah, bukan sekadar dari guru.

“Guru hanya perantara. Ilmu itu bukan milik manusia, tetapi milik Allah yang dititipkan kepada mereka yang menjaga kebersihan hati,” tambah Menag.

Menag juga menegaskan, bahwa keberkahan ilmu tidak hanya diukur dari kecerdasan, tetapi dari akhlak dan penghormatan santri kepada guru.

“Ilmu tidak akan masuk ke hati yang ko-



Daftar Pemenang Pesantren Awards 2025.

Santri tahun ini, “Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Dunia”, kata Presiden Prabowo, mencerminkan tekad santri untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional dan global.

“Saya percaya, santri hari ini bukan hanya penjaga moral bangsa, tetapi juga pelopor kemajuan yang berakhlak, berilmu, dan berdaya saing,” kata Prabowo.

Dengan restu Presiden terhadap pembentukan Ditjen Pesantren, Kementerian Agama kini tengah menyiapkan langkah percepatan agar lembaga baru tersebut segera terbentuk. Prakarsa Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara telah dikirim ke Kementerian PAN-RB untuk proses finalisasi.

dan berakhlak, juga tidak lepas dari peran pesantren sebagai pusat spiritualitas, ilmu, dan keadaban.

Hal tersebut diungkapkan Menag Nasaruddin Umar, dalam sambutannya pada acara Malam Anugerah Pesantren Award 2025 di Jakarta. Acara ini menjadi puncak penghargaan bagi pesantren, santri, dan tokoh bangsa yang berkontribusi besar dalam penguatan pendidikan Islam dan pemberdayaan masyarakat.

Acara ini juga merupakan rangkaian gelaran dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2025.

“Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi jantung peradaban bangsa. Dari pesantren lahir generasi yang

tor. Hormat kepada guru adalah kunci keberkahan pengetahuan,” ungkap Menag.

Menag pun mengaitkan tradisi pesantren dengan kisah Nabi Musa dan Khidir dalam Surah Al-Kahfi. Ia menyatakan bahwa pertemuan keduanya menggambarkan pertemuan antara dua sumber ilmu, yaitu nalar dan intuisi.

“Di Barat, ilmu berkembang dari logika. Di Timur, ilmu tumbuh dari rasa. Pesantren adalah sintesis keduanya, tempat di mana akal dan spiritualitas berjalan seimbang,” ujar Menag.

Menurut Menag, keunggulan pesantren terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara rasionalitas modern dan nilai-nilai ilahiah. Karena itu, pesantren

menjadi benteng moral di tengah tantangan globalisasi dan digitalisasi.

Lebih lanjut, Menag memaparkan gambaran terkini mengenai ekosistem pendidikan pesantren di Indonesia yang semakin berkembang pesat. Secara keseluruhan, Indonesia saat ini memiliki lebih dari 12,6 juta santri yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, dengan lebih dari 42 ribu pondok pesantren dan lebih dari 100 ribu madrasah, sebuah potensi besar yang bukan hanya mencerminkan kekuatan pendidikan Islam, tetapi juga daya spiritual dan sosial bangsa.

“Ini bukan hanya angka statistik, tetapi kekuatan sosial dan spiritual yang luar biasa besar. Jika seluruh santri bergerak bersama, Indonesia akan menjadi bangsa yang tak hanya maju, tapi juga bermartabat,” jelas Menag.

Selain itu, Menag juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh penerima penghargaan Pesantren Award 2025, mulai dari santri inspiratif, pesantren transformatif, kepala daerah peduli pesantren, hingga tokoh Lifetime Achievement.

Menag menegaskan bahwa para penerima penghargaan tersebut adalah representasi nyata dari peran pesantren dalam membangun bangsa.

“Mereka adalah bukti hidup bahwa pesantren tidak hanya melahirkan ulama, tetapi juga intelektual, inovator, dan penggerak kemanusiaan,” ujar Menag.

Menag pun berpesan, agar dunia pesantren terus menjadi sumber inspirasi dan cahaya ilmu.

“Kesantunan publik yang kita rasakan hari ini lahir dari pesantren. Mari kita jaga tradisi itu, agar cahaya pesantren tetap menerangi Indonesia dan dunia,” Pungkas Menag.

Daftar Pemenang Pesantren Award 2025

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno menyampaikan, bahwa Pesantren Award 2025 merupakan penyelenggaraan perdana yang telah dipersiapkan melalui proses panjang dan ketat sejak 7 Juli 2025.

“Pesantren Award bukan sekadar ajang penghargaan, tetapi ruang apresiasi bagi dedikasi panjang pesantren dalam mencetak generasi berilmu, berakhlak, dan berdaya saing. Kita ingin dunia pesantren semakin mendapat tempat dalam pembangunan nasional,” kata Dirjen Pendis, Amien Suyitno, di Aula H.M. Rasjidi, Kantor Kemenag Thamrin, Senin (20/10/25).

Amien Suyitno juga mengapresiasi kerja keras dewan juri yang terdiri dari tokoh

lintas bidang, di antaranya Alissa Wahid selaku Ketua Dewan Juri, bersama jajaran juri lainnya.

“Saya menyaksikan langsung bagaimana para juri berdiskusi dengan penuh integritas untuk memastikan penghargaan ini diberikan kepada mereka yang benar-benar berkontribusi bagi dunia pesantren,” tambah Amien.

Acara yang juga dihadiri oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag, Kamaruddin Amin, jajaran pejabat Kementerian Agama dan juga tokoh-tokoh pesantren nasional ini, menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri Nasional 2025, yang jatuh pada 22 Oktober 2025.



Menag Nasaruddin Umar dan Wamenag Romo Muhammad Syafii.

Dirjen Pendidikan Islam melaporkan, penghargaan diberikan dalam empat kategori utama:

1. Santri Inspiratif,
2. Pesantren Transformatif,
3. Kepala Daerah Peduli Pesantren, dan
4. Lifetime Achievement.

Berikut Daftar Peraih Penghargaan Pesantren Award 2025:

I. Santri Inspiratif

- 1). Khoirul Adib, Pondok Pesantren Darul Ilmi, Meteseh, Semarang
- 2). Qatratus Nadia, Pondok Pesantren Fadlun Minallah, Bantul
- 3). Tsuroiyah Hamidah, Pondok Pesantren Sunan Drajat, Lamongan

II. Pesantren Transformatif

- 1). Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut
- 2). Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman
- 3). Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah,

Sukorejo – Situbondo

III. Kepala Daerah Peduli Pesantren

Subkategori: Mendukung Program Pesantren

- 1). Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru
 - 2). Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari
 - 3). Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir
 - 4). Bupati Bantaeng, Fathul Fauzy Nurdin
- Subkategori: Mendukung 3 Fungsi Pesantren (Pendidikan, Dakwah, dan Pemberdayaan Masyarakat)

- 1). Gubernur Jawa Timur, Khofifah
- 2). Gubernur Aceh, Muzakir Manaf

III. Lifetime Achievement

- 1). KH. A. Sahal Mahfudz
- 2). KH. Achmad Shiddiq

3). KH. Imam Zarkasyi

4). KH. Ali Yafie

5). KH. AR. Fachruddin

6). KH. Ahmad Azhar Basyir

7). KH. Ambo Dalle

8). Nyai Hj. Sholihah Wahid

Ketua Dewan Juri, Alissa Wahid, menyampaikan bahwa seluruh tokoh tersebut telah meninggalkan jejak luar biasa dalam pendidikan pesantren dan pembangunan bangsa.

“Dari ketulusan mereka, lahirlah keabadian. Mereka bukan hanya guru bagi santri, tetapi juga inspirasi bagi kemanusiaan,” kata Alissa Wahid.

Acara ditutup dengan peresmian Gerakan Wakaf Santri Nusantara oleh Menag, Sekjen Kemenag, Dirjen Pendis, dan Direktur Pesantren, Basnang Said. Momen ini menjadi penanda penting dalam sejarah pesantren Indonesia, sebuah langkah monumental yang menggabungkan spir-

itualitas pesantren, teknologi modern, dan semangat partisipasi nasional.

Gerakan ini diinisiasi untuk menggerakkan potensi ekonomi syariah produktif berbasis pesantren, dengan santri sebagai motor utamanya. Aksi simbolis yang dilakukan dalam peresmian tersebut menandai kebangkitan ekonomi syariah produktif yang digerakkan oleh santri di seluruh Indonesia.

Terkait Dirjen Pesantren, Sekjen Kemenag: Diusulkan Menteri, Ditentukan Presiden

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Sekjen Kemenag), Kamaruddin Amin, menegaskan bahwa penentuan calon Direktur Jenderal (Dirjen) Pesantren sepenuhnya akan menjadi kewenangan Presiden. Kementerian Agama, hanya akan mengusulkan nama sesuai mekanisme yang berlaku.

Jenderal Pesantren saat ini terus berjalan. Ia mengatakan, bahwa izin prakarsa dari Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara telah terbit, dan kini prosesnya sedang berlanjut di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

"Presiden dan Mensesneg sudah mengeluarkan prakarsanya, sudah dikirim ke MenPAN. Tinggal tunggu waktu untuk segera menyelesaikan. InsyaAllah tidak menyebangkan tahun," ujar Kamaruddin optimistis.

Dengan terbentuknya Ditjen Pesantren nantinya, Sekjen Kemenag berharap kehadiran negara dalam pembinaan dan pemberdayaan pesantren akan semakin kuat, tanpa menghilangkan jati diri dan kemandirian pesantren sebagai lembaga pendidikan khas Indonesia.

"Dengan kelembagaan yang lebih besar, tentu harapan kita afirmasi kehadiran

"Ya, kami mohon doa dan dukungannya dari seluruh masyarakat. InsyaAllah ke depan, pesantren bisa lebih baik lagi," imbuhnya.

Dari Polemik Jadi Pembelajaran Bersama

Sempat muncul polemik di ruang publik mengenai isu pesantren. Terkait hal tersebut, Sekjen Kemenag menilainya sebagai momentum refleksi bersama. Ia mengatakan, pentingnya menjaga etika dan keadaban publik dalam setiap pernyataan di ruang terbuka.

"Itu cukup menjadi pembelajaran kita semua. Bahwa di ruang publik kita harus berhati-hati, ada keadaban publik yang sama-sama harus dijunjung. Saya kira semua pihak harus melakukan konsesi," ungkapnya.

Meski demikian, Kamaruddin melihat sisi positif dari dinamika yang terjadi.



Sekjen Kemenag-Kamaruddin Amin.

"Kalau Dirjen, nanti diusulkan Menteri dan ditentukan oleh Presiden. Jadi itu ranahnya Presiden. Siapa yang diusulkan dan siapa yang ditentukan? Tunggu saja. Kita belum tahu," kata Sekjen Kemenag, Kamaruddin Amin, di Jakarta, seperti dilansir dari laman Kemenag, Jumat (24/10/2025).

Izin Prakarsa Sudah Terbit

Kamaruddin Amin juga memastikan bahwa proses pembentukan Direktorat

negara pasti lebih besar. Tapi kemandirian pesantren tetap kita jaga dan rawat," tambah Sekjen Kamaruddin Amin.

Ia juga mengatakan, bahwa pemerintah juga akan bekerja agar stigma-stigma negatif yang selama ini muncul bisa berkurang.

Sekjen juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat pesantren sebagai pilar pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan umat.

"Bagi kami di dunia pesantren, ini hikmahnya. Blessing in disguise, semua pihak kini mendukung pondok pesantren. Masyarakat menaruh perhatian besar, dan itu produktif," katanya.

Ditjen Pesantren Direstui Presiden, Menag Apresiasi Perjuangan Romo Syafi'i

Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi kepada Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo

Muhammad Syafi'i atas kerja kerasnya dalam mengakselerasi proses pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren.

Apresiasi disampaikan secara khusus, saat menyampaikan sambutan selaku Pembina Apel Hari Santri 2025. Apel ini berlangsung di halaman kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta.

Ada yang menraik dari pelaksanaan Apel Hari Santri 2025 ini, dimana para petugas Apel Hari Santri adalah para pejabat eselon I. Dirjen Bimas Katolik Suparman, bertindak sebagai Komandan Apel. Dirjen Bimas Hindu, I Nengah Duija, sebagai pembaca naskah Pancasila, sementara Dirjen Bimas Buddha, Supriyadi, sebagai pembaca Naskah Pembukaan UUD 1944.

Sementara Dirjen Pendidikan Islam, Amien Suyitno dan Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM, M Ali Ramdhani, berbagi tugas membacakan Resolusi Jihad dan Ikrar Santri. Dan bagian akhir, doa dipanjatkan oleh Dirjen Bimas Islam, Abu Rokhmad.

Sedangkan untuk pembawa acara, Dirjen Bimas Kristen, Jeane Marie Tulung. Hadir juga, paduan suara Ditjen Bimas Kristen. Apel Hari Santri juga dihadiri para pejabat Eselon II, ASN Kemenag dan ratusan santri.

Wamenag Dukung Santri Film Festival yang Digagas Kemenbud

Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo Muhammad Syafii sangat mendukung penyelenggaraan Santri Film Festival (Sanffest) 2025 sebagai bentuk dakwah kultural, sekaligus penguatan ekonomi kreatif di lingkungan pesantren. Hal ini disampaikan Romo Syafi'i saat menerima audiensi Tenaga Ahli Menteri Kebudayaan, Neno Warisman dan tim-nya di Jakarta.

"Pesantren itu tidak hanya tempat pendidikan dan dakwah, tapi juga punya fungsi pemudayaan masyarakat," kata Wamenag Romo Muhammad Syafii, di Jakarta, seperti dilansir dari laman Kemenag, Senin (27/10/2025).

Wamenag menambahkan, dengan Santri Film Festival ini, para santri yang memiliki minat dan bakat bisa berkreasi di bidang digital dan sinema. Film yang dibuat tidak hanya hiburan dan informasi, tapi juga berisi nilai-nilai ketauhidan.

Menurut Romo Syafii, Santri Film Festival menjadi sarana strategis bagi santri untuk mengembangkan potensi kreatif sekaligus menanamkan nilai-nilai keislaman melalui karya sinema.

"Film bisa menjadi medium dakwah yang halus dan modern. Kalau dikelola baik, ia bukan hanya alat dakwah, tapi juga

sumber ekonomi kreatif pesantren," ungkapnya.

Sanffest mengusung tiga fokus utama, yaitu dakwah kultural, literasi sinema, dan ekosistem kreatif pesantren. Programnya mencakup pelatihan film, workshop nasional, kompetisi film pendek, dan malam penganugerahan yang akan digelar pada Desember 2025.

Sanffest 2025 menargetkan jangkauan ke 42.000 pesantren melalui jaringan Direktorat Jenderal Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag, dengan partisipasi 1.800 santri aktif dari seluruh provinsi. Sebanyak 120 film pendek tema-

punya kreativitas. Ke depan, mereka bisa berdaya di bidang digital dan sinema," ujar Wamenag Romo Muhammad Syafii.

Sementara itu, Neno Warisman berterima kasih atas dukungan Wamenag Romo Muhammad Syafi'i.

"Alhamdulillah, Romo Syafi'i dalam posisi mengayomi rencana besar untuk putra-putri kita di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Insyaallah akan diundang untuk mengikuti festival film santri yang segera dilakukan workshop-nya pada tanggal 1, 2, 8, dan 9 November," kata Neno Warisman, Tenaga Ahli Menteri Kebudayaan.



Wamenag Romo Muhammad Syafii dan Neno Warisman.



Wamenag Romo Muhammad Syafii Menerima Kunjungan Neno Warisman.

tik akan diproduksi, mengangkat tema Islam, budaya, dan sosial.

Rangkaian kegiatan ini, juga akan melibatkan Balai Akademi Sanffest, wadah pelatihan dan inkubasi santri kreatif.

"Saya apresiasi langkah Kementerian Kebudayaan yang menggagas Sanffest. Kalau ini berhasil, insya Allah bisa jadi kalender tahunan agar anak-anak kita

Menurut Neno, program ini tidak hanya menghadirkan festival film, tetapi juga mencakup pengembangan kapasitas santri dalam bidang perfilman dan digital. "Kita ingin melangkah untuk membuat edukasi dalam hal perfilman dan digital profesional. Mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah SWT," tambahnya. ♦

PERHATIAN PRABOWO UNTUK JEPANG DAN KOREA

Jepang dan Korea Selatan mendapat catatan khusus Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN. Kemitraan ASEAN dengan Jepang dan Korea penting untuk kemajuan bersama.

Kehadiran Sanae Takaichi, wanita pertama yang menjadi Perdana Menteri Jepang mendapat sambutan hangat dari para kepala negara lain yang hadir pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Namun, Presiden Prabowo Subianto malah mendapat balasan berupa tawa lepas dari Takaichi yang baru beberapa hari sebelumnya dilantik sebagai PM Jepang.

Menjelang pembukaan KTT, PM Takaichi didampingi oleh PM Malaysia Anwar Ibrahim sebagai tuan rumah berkeliling memperkenalkan diri dengan kepala negara lain yang hadir di Kuala Lumpur, pada Senin, 27 Oktober 2025 itu. Nah, saat berbincang sejenak dengan Presiden Prabowo itulah tawa lepas PM Takaichi terekam jelas.

Kepada PM Takaichi ia menegaskan komitmen kerjasama ekonomi. "Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang, saya menegaskan komitmen Indonesia

dan ASEAN untuk terus memperkuat kerja sama ekonomi yang adaptif terhadap perubahan zaman," ungkap Prabowo.

Ia juga menekankan pentingnya transisi energi sebagai salah satu prioritas strategis, serta mendorong kemitraan yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia agar dunia dapat melahirkan generasi pemimpin yang cerdas, tangguh, dan berdaya saing tinggi.

Dalam forum yang menjadi bagian dari rangkaian KTT Ke-47 ASEAN itu, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya kemitraan strategis antara negara-negara ASEAN dan Jepang. Menurut dia, hubungan yang telah terjalin selama lebih dari lima dekade tersebut menjadi landasan kuat bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

"ASEAN dan Jepang telah lama menjadi mitra dalam memajukan perdamaian, kemakmuran, dan konektivitas di kawasan Indo-Pasifik. Di tengah dunia yang semakin penuh ketidakpastian, kerja sama kita

tetap menjadi jangkar yang kokoh bagi perdamaian dan stabilitas kawasan," ujar Prabowo dalam konteks 28th ASEAN-Japan Summit yang serangkaian dengan KTT ke-47 ASEAN.

Selain menyoroti aspek geopolitik, Presiden Prabowo juga menekankan perlunya memperkuat kerja sama ekonomi yang inklusif melalui implementasi efektif ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Ia turut mendorong perluasan kolaborasi di bidang ekonomi digital serta konektivitas keuangan antara kedua pihak. "Sekarang adalah saatnya untuk mewujudkan prinsip-prinsip bersama kita melalui kerja sama yang bermakna dan benar-benar memberi manfaat bagi rakyat kita. Hubungan ekonomi antara ASEAN dan Jepang terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika zaman," ujar Prabowo menambahkan.

"Sementara itu, bersama Presiden Korea



Selatan, kami menegaskan kembali komitmen ASEAN untuk menjaga perekonomian yang terbuka, terhubung, dan inklusif, sekaligus memanfaatkan potensi bersama untuk mendorong kemajuan di bidang infrastruktur digital, pengembangan talenta, dan tata kelola kecerdasan buatan demi mewujudkan masa depan global yang lebih sejahtera dan berkelanjutan,” ungkap Prabowo.

Pada pidato resmi, Prabowo menegaskan pentingnya penguatan kemitraan ASEAN dengan Republik Korea (ROK), Korea Selatan, dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. “Kami berharap dapat memajukan Kemitraan Strategis Komprehensif ASEAN-ROK, menghadapi tantangan yang mendesak dan semakin kompleks,” kata Prabowo dalam konteks ASEAN-Korea Summit ke-26.

“Dalam lanskap yang dinamis ini, sangat penting bagi ASEAN dan ROK untuk bekerja sama menjaga ekonomi kita tetap terbuka, terhubung, dan inklusif. Hal ini memungkinkan kita untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan menciptakan peluang nyata bagi kesejahteraan bersama,” sambungnya.

Prabowo menekankan, penguatan mekanisme kerja sama ekonomi menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut dia, kemitraan ekonomi komprehensif regional perlu diimplementasikan sepenuhnya dan kawasan perdagangan bebas ASEAN dan Republik Korea perlu

ditingkatkan.

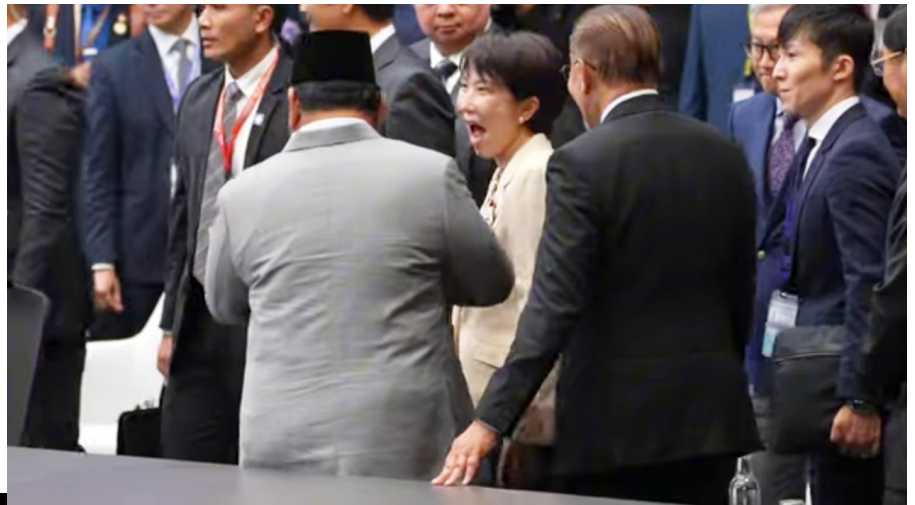
“Rantai pasokan regional harus diperkuat. ASEAN berada di jalur yang tepat untuk menjadi salah satu pasar digital paling dinamis di dunia. Nilai barang dagangan bruto digital kawasan ini diproyeksikan mencapai USD1 triliun pada 2030,” ucap dia.

Lebih lanjut, Prabowo menilai sinergi antara potensi digital ASEAN dan kekuatan teknologi Republik Korea dapat menjadi motor penggerak transformasi kawasan. Dia meyakini ASEAN dan Republik Korea dapat memanfaatkan kekuatan yang saling melengkapi untuk mendorong kemajuan dalam infrastruktur digital, pengembangan talenta, dan tata kelola AI, membentuk masa depan digital yang berkelanjutan dan inklusif. “Kami ber-

cita-cita agar ASEAN berkembang pesat sebagai mesin vital pertumbuhan global,” ujarnya.

Meski demikian, Prabowo mengingatkan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas sebagai fondasi bagi pembangunan ekonomi. Ia pun menegaskan dukungan Indonesia terhadap peran konstruktif Korea Selatan dalam menjaga perdamaian dunia.

“Indonesia mendukung upaya Korea Selatan untuk menjadi mitra bagi perdamaian dan keamanan, meredakan ketegangan, mendorong dialog, dan membangun keterlibatan yang konstruktif karena kemitraan kawasan-Korea Selatan harus menjadi kekuatan untuk kebaikan yang membawa perdamaian dan kesejahteraan bagi semua,” tandas Prabowo. ♦





Spektakuler Pembukaan Porprov XV di Muba Berlangsung Meriah BUPATI TOHA TOHET : SELAMAT BERJUANG PARA ATLET UNTUK MERAIH KEMENANGAN SEJATI

Malam spektakuler menyelimuti Stadion Serasan Sekate Sekayu saat upacara Pembukaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XV Sumatera Selatan Tahun 2025 resmi digelar di Kabupaten Muba.

Acara ini dihadiri secara langsung Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, Bupati Muba HM Toha Tohet, Wakil Bupati Muba Kyai Abdur Rohman Husen, Forkopimda Kabupaten Muba, Sekretaris Daerah Muba Dr H Apriyadi MSi, Ketua TP. PKK Muba Hj Patimah Toha, Seluruh Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota ataupun yang mewakili dari 17 Kabupaten/Kota yang ada di Sumsel.

Upacara pembukaan ini dimeriahkan oleh berbagai pertunjukan seni dan budaya dari Kabupaten Muba. Serta defile yang menampilkan semangat dan kebersamaan para atlet dari berbagai kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan. Porprov XV ini menjadi ajang kompetisi yang sangat dinantikan, tidak hanya sebagai ajang untuk menunjukkan prestasi olahraga, tetapi

juga sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi dan sportivitas antar daerah.

"Dengan penuh semangat dan kebanggaan, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan seluruh masyarakat atas kerja keras dan dedikasi dalam menyukseskan pelaksanaan Porprov ke-15 di Kabupaten Musi Banyuasin. Malam ini, kita akan menyaksikan pembukaan yang spektakuler, dan saya percaya bahwa event ini akan menjadi momentum untuk meningkatkan prestasi olahraga di Sumatera Selatan," kata Gubernur Herman Deru.

Gubernur Sumsel juga mengajak seluruh atlet untuk menjaga sportivitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai fair play.

"Kepada juri dan wasit, saya berpesan untuk mengawasi dan memutuskan den-

gan adil dan teliti. Mari kita dukung para atlet muda kita untuk menjadi yang terbaik dan mengharumkan nama Sumatera Selatan di kancah nasional dan internasional," pesan Deru.

Bupati Muba HM Toha Tohet mengatakan, atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami sebagai tuan rumah pada ajang Porprov ini.

"Saya percaya bahwa kerjasama dan sinergi antar semua pihak merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama dan bahu-membahu dalam mendukung kesuksesan event ini," tuturnya.

Lanjut Bupati Muba, penyelenggaraan



Porprov ini tidak hanya membawa dampak ekonomi yang baik, tetapi juga meningkatkan kualitas infrastruktur fasilitas olahraga, menciptakan lapangan kerja, dan mempromosikan ekonomi lokal.

"Saya berharap seluruh peserta dapat bertanding dengan menjunjung tinggi sportivitas, berjuang untuk meraih kemenangan yang sejati, dan membawa nama baik daerah dan keluarga. Bagi yang berhasil, janganlah bersikap sombong, dan bagi yang belum berhasil, janganlah kecil

orang. Kemudian Panpel dari KONI Sum-sel 811 orang

"Dengan total keseluruhan peserta, termasuk kontingen dan panitia, jumlah yang hadir di Muba dipastikan mencapai 8.059 orang, belum termasuk pendukung lainnya," urai Kadispopar.

"Terdapat ribuan para atlet yang akan bertanding dan berjuang untuk membawa nama baik daerahnya masing-

masing. Namun, Porprov ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga tentang semangat kebersamaan dan sportivitas. Saya percaya bahwa melalui event ini, kita dapat mempererat tali persaudaraan antar daerah dan meningkatkan prestasi olahraga di Sumatera Selatan. Dengan semangat yang sama semoga event ini bisa berjalan sesuai dengan harapan bersama," tandasnya. ♦



hati. Teruslah berlatih dan berdoa, insyaallah kemenangan akan menyertai langkah kalian di masa mendatang," katanya.

Kadispopar Muba Dr. M. Fariz, SsTP., MM menjelaskan, kontingen dari 17 Kabupaten/Kota Se-sumsel sebanyak 7.248





MUBA JADI PERCONTOHAN TATA KELOLA ENERGI RAKYAT BERKELANJUTAN

Bupati Muba H M Toha Tohet SH bersama jajaran Forkopimda Muba menyambut kunjungan kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru, di Kecamatan Keluang.

Turut hadir dalam rombongan tersebut Dirjen Migas Laode Sulaeman, Plt Dirjen Ketenagalistrikan Tri Winarno, Kepala SKK Migas Joko Siswanto, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius, serta Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo.

Rangkaian kunjungan kerja dimulai dengan peninjauan pangkalan LPG 3 kilogram milik warga Desa Sidorejo, dilanjutkan dengan kunjungan ke sumur minyak rakyat di Desa Mekar Sari, Kecamatan Keluang, dan diakhiri dengan peninjauan pelaksanaan program pembangunan listrik desa di Dusun Napal Putih, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu.

Dalam kunjungan itu, Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru menerangkan Kabupaten Muba memiliki potensi besar

dalam pengelolaan sumber daya energi rakyat. Ia menilai terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi masyarakat agar dapat mengelola sumur minyak secara legal dan aman.

"Selama ini banyak masyarakat kita bekerja di sektor ini tanpa pembinaan dan menghadapi risiko keselamatan. Dengan Permen ini, kita ingin masyarakat bisa bekerja secara aman dan berdaya, serta mendapatkan legalitas," ujar Herman Deru.

Ia juga mengapresiasi langkah Pemkab Muba yang berhasil menekan angka kemiskinan hingga satu digit di bawah kepemimpinan Bupati H M Toha Tohet. "Ini bukti nyata kemajuan daerah. Dengan adanya legalisasi sumur rakyat, dampak ekonomi di Muba akan semakin besar,"

tambahnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah ingin memastikan pengelolaan sumber daya alam benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33.

"Sumur-sumur minyak rakyat ini sudah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sekarang tugas negara adalah menata dan mengelolanya dengan baik agar masyarakat tidak lagi khawatir melanggar aturan," kata Bahlil.

Ia menjelaskan, Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 menjadi dasar hukum bagi legalisasi dan penataan sumur rakyat. Pemerintah memberikan izin kepada koperasi, BUMD, dan UMKM untuk mengelola sumur tersebut dengan pembinaan dari SKK Migas dan Pertamina.

"Kita ingin rakyat bisa berusaha dengan aman dan produktif. Keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan adalah prioritas utama. Kalau standar ini tidak terpenuhi, izinnya bisa kita evaluasi," tegas Bahlil.

Menurutnya, minyak yang dihasilkan masyarakat akan dibeli oleh Pertamina dengan harga 80 persen dari harga minyak mentah dunia (ICP).

"Targetnya, akhir November sudah mulai berjalan. Ini bentuk kehadiran negara dalam mengelola kekayaan alam dengan adil dan berpihak pada rakyat," ujarnya.

Selain meninjau sumur minyak rakyat, Menteri ESDM juga meninjau program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di wilayah Muba.

"Presiden menargetkan seluruh desa di Indonesia sudah teraliri listrik pada 2029-2030. Saat ini masih ada 5.700 desa dan 400 dusun yang belum memiliki listrik," ungkap Bahlil.

Di Kabupaten Muba, PLN melaksanakan pembangunan jaringan listrik di tujuh lokasi dengan total anggaran mencapai Rp 45 miliar.

Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin HM Toha Tohet SH sangat terima kasih atas perhatian pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM, terhadap masyarakat Muba. Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah yang nyata bisa menghadirkan keadilan bagi masyarakat daerah penghasil migas.

"Ini adalah bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Selama ini, aktivitas sumur rakyat menjadi sumber penghidupan banyak keluarga, dan sekarang mereka bisa bekerja secara legal dan aman," kata Bupati Toha.

Lanjut, ia menyatakan Pemkab Muba siap bersinergi dengan Kementerian ESDM, SKK Migas, Pertamina, dan PLN untuk mempercepat pelaksanaan program energi berkeadilan.

"Muba siap menjadi daerah percontohan dalam tata kelola energi rakyat yang berkelanjutan. Kami akan dorong agar BUMD dan koperasi daerah ikut aktif, sehingga manfaat ekonomi bisa langsung dirasakan oleh warga," tegasnya.

Sementara itu, Warga Desa Mekar Sari, Joko Wilyono, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah atas terbitnya regulasi baru tersebut.

"Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah. Dulu kami bekerja dengan kekhawatiran, sekarang kami punya kepastian hukum dan bisa bekerja dengan tenang. Ini harapan besar bagi kami penambang rakyat," pungkasnya. ♦





AKHIRNYA TERCAPAI KESEPAKATAN

Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah telah menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 sebesar Rp 87.409.365 per jamaah untuk jamaah haji reguler. Jumlah tersebut turun sekitar Rp 2,89 juta dibandingkan dengan BPIH tahun 2025.

"Komisi VIII DPR RI dan Menteri Haji Umrah Republik Indonesia sepakat bahwa besaran rata-rata BPIH tahun 2026 M per jamaah reguler sebesar Rp 87.409.365. Turun sebesar Rp2.893.000 dibanding dengan BPIH tahun 2025 M yang sebesar Rp89.410.258 per jamaah," kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dilansir dari NU Online, Rabu (29/10/2025).

Menurut hasil pembahasan antara pemerintah dan DPR RI, penurunan biaya haji tahun 2026 ini, diputuskan setelah melalui serangkaian rapat panitia kerja (panja).

Kementerian Haji dan Umrah, pada awalnya mengusulkan BPIH tahun 2026 sebesar Rp 88 juta, namun setelah dilakukan penyesuaian, akhirnya disepakati angka akhir turun menjadi Rp 87.409.365, dan turun sekitar Rp2,8 juta dari tahun sebelumnya.

Dan dari total BPIH 2026, yang sebesar Rp 87.409.365,- itu, setiap jamaah haji reguler akan mendapat subsidi dari Pemerintah sebesar Rp33.215.558,- atau 38 persen, yang berasal dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji. Dana ini digunakan untuk menutupi biaya penyelenggaraan haji, baik di Arab Saudi maupun di dalam negeri.

Sementara itu, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang menjadi tanggungan langsung jamaah haji ditetapkan sebesar Rp54.193.806, atau sekitar 62 persen dari total BPIH 2026.

"Dan dialokasikan untuk biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi Makkah, sebagian biaya akomodasi Madinah, dan biaya hidup living cost, dan Bipih tahun 2026 turun sebesar Rp1.237.944,20 dibandingkan dengan tahun 2025 sebesar Rp55.431.750,78," tambah Marwan Dasopang.

Selain menetapkan besaran biaya, rapat kerja juga memastikan bahwa kuota haji Indonesia tahun 2026 tetap seperti tahun-tahun sebelumnya, sebanyak 221.000 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 203.320 jamaah haji reguler, termasuk petugas haji daerah dan pembimbing, serta 17.680 jamaah haji khusus.

Sebelum kesepakatan tercapai, pemerintah dan DPR RI juga menelaah sejumlah aspek teknis lain, seperti komponen syaria, biaya penerbangan, dan pengadaan layanan selama penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam rapat tersebut, disepakati pula bahwa penurunan biaya haji sebagian besar akan langsung dirasakan calon jamaah melalui pengurangan Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji).

"Dari Rp 2 juta itu, Bipih yang dirasakan masyarakat sekitar Rp 1 juta koma sekian. Sisanya meng-cover komponen lain, sep-

erti transportasi, konsumsi, dan akomodasi," lanjut Marwan.

DPR Nilai Penurunan Biaya Haji 2026 Masih Minim

Dengan keputusan penetapan BPIH sebesar Rp 87.409.365,-, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menilai, bahwa Kementerian Haji dan Umrah belum menunjukkan langkah terobosan yang berarti, meski telah mengumumkan penurunan biaya haji 2026 hanya sebesar Rp1 juta dibanding tahun sebelumnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut, tidak jauh berbeda dengan pola yang pernah diterapkan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama.

Hal tersebut disampaikan Marwan Dasopang dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Haji dan Umrah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (28/10/2025).

Menurut Marwan, gagasan serupa bahkan pernah disampaikan oleh Dirjen PHU dalam rapat sebelumnya. Karena itu, ia berharap kementerian baru tersebut dapat menghadirkan pembaruan yang lebih nyata dalam kebijakan dan tata kelola penyelenggaraan haji.

"Tentu sebagai Kementerian baru harus punya terobosan yang baru dibanding Dirjen PHU yang lalu," kata Marwan Dasopang, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, seperti dikutip dari kanal TVR Parlemen, Selasa (28/10/2025).

Sementara itu, dalam rapat tersebut, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan usulan biaya haji 2026 sebesar Rp88,4 juta per jamaah. Dari jumlah tersebut, calon jamaah akan menanggung Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp54,9 juta atau 62 persen dari total, sementara sisanya ditutup dari nilai manfaat dana haji.

Usulan itu berarti hanya menurunkan biaya sebesar Rp1 juta dibanding tahun 2025. Marwan menganggap penurunan sebesar itu, masih terlalu kecil dan belum mencerminkan upaya efisiensi yang maksimal. Ia bahkan mengingatkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan biaya, jika efisiensi tidak dilakukan lebih serius.

"Ini turunnya baru Rp1 juta, Pak Wakil Menteri. Ini belum masuk angka-angka bancakan. Kalau kita masukkan angka bancakan, harus turun Rp5 Triliun dari Rp17 Triliun," ujar Marwan.

Menurut Marwan, seharusnya total biaya penyelenggaraan haji bisa ditekan hingga Rp 6 Triliun, bukan hanya sekadar penyesuaian kecil. Kecilnya penurunan

ini, menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen Kementerian Haji dan Umrah dalam memperbaiki tata kelola haji, yang selama ini dinilai masih bermasalah.

Marwan juga mengingatkan bahwa perbaikan layanan dan penurunan komponen biaya merupakan dua hal utama yang perlu dijawab oleh kementerian haji dan umrah tersebut. Menurutnya, komponen biaya yang terus naik berpotensi menjadi area penyimpangan.

"Dua-dua ini harus terjawab di Kementerian Haji. Kalau tidak, ya artinya sama

kata Dahnil.

Ia pun kemudian merinci, besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau dana yang ditanggung langsung oleh jamaah mencapai Rp54.924.000 atau 62 persen dari total, sedangkan nilai manfaat optimalisasi dana haji sebesar Rp33.485.365 atau 38 persen.

Dahnil menjelaskan bahwa besaran biaya tersebut, dihitung dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.

"Dalam menentukan komponen BPIH,



saja," tambahnya.

Sementara itu, pemerintah memastikan biaya haji tahun depan (2026) akan turun dibanding tahun 2025. Dalam paparannya, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, bahwa pemerintah mengusulkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 atau 1447 Hijrah sebesar Rp88.409.365 per jamaah.

"Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah sebesar Rp 88.409.365,"

sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik dengan biaya yang wajar," ungkapnya.

Meski begitu, ia menambahkan bahwa pemerintah masih terus menyisir seluruh komponen biaya, agar penurunan bisa dilakukan lebih jauh tanpa mengorbankan kualitas layanan bagi jamaah.

"Pemerintah masih mencari peluang agar BPIH 2026 bisa lebih turun dari asumsi awal," pungkas Dahnil. ♦



KEMENDAGRI DORONG SINERGI PEMDA WUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN

Dukung Program Kopdeskel dan Penguatan UMKM

Pemerintah RI terus memperkuat kolaborasi antara pusat dan daerah untuk mempercepat pemerataan ekonomi melalui koperasi dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini dibahas Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2025 yang digelar di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (28/10/2025).

Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kem UKM) Henra Saragih dalam paparannya menjelaskan bahwa Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih merupakan program strategis yang menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Program ini disebut menjadi salah satu agenda pri-

oritas Presiden Prabowo Subianto, selain program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program Kopdeskel Merah Putih bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja, memperpendek rantai pasok, serta memperkuat inklusi keuangan di tingkat lokal. Saat ini, sebanyak 82 ribu Kopdeskel Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia.

"Pak Presiden menginginkan ini bukan hanya sebagai proyek, hanya sebagai kegiatan, tapi Pak Presiden ingin ini sebagai gerakan, movement, tidak hanya di satu atau seratus atau seribu, tapi di seluruh desa, seluruh kelurahan itu harus ada koperasi," ujar Henra.

Pelaksanaan program ini kini difokuskan pada tahap operasionalisasi, termasuk pen-

dirian gudang dan gerai koperasi desa di seluruh wilayah. Langkah ini diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 yang menugaskan berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat pembangunan fasilitas tersebut.

"Pak Menteri meminta pemerintah daerah segera mendata dan menginventarisir lahan-lahan yang bisa dijadikan sebagai gudang Koperasi Desa dan Kelurahan," katanya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Reghi Perdana menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ekosistem UMKM. Menurutnya, sektor UMKM telah terbukti menjadi tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi mencapai 60,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja.

"Ketika Covid, ketika krismon (krisis moneter), siapa yang kemudian gagah tampil menopang perekonomian kita? Tentu teman-teman UMKM. Bener banget kan teman-teman UMKM," ungkap Reghi.

Pemerintah telah menetapkan sejumlah arah kebijakan dan delapan program prioritas untuk memperkuat daya saing UMKM. Salah satunya melalui Super App Sahabat UMKM, platform terpadu yang akan memfasilitasi berbagai layanan dan bantuan agar lebih tepat sasaran. Selain itu, program Kartu Usaha Produktif dan Holding UMKM juga dikembangkan untuk memperluas akses pembiayaan serta membangun kemitraan antarpelaku usaha.

"Tahun 2025 pemerintah mengalokasikan 300 triliun untuk KUR (Kredit Usaha Rakyat), di tahun 2026 ya angkanya akan sekitar segituan," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan UMKM dalam mendukung program MBG. Ia menilai, UMKM dapat berperan sebagai pemasok bahan pangan lokal seperti telur, sayur, dan ikan yang secara langsung berdampak pada penyerapan tenaga kerja di daerah.

"Satu SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) satu dapur itu berapa supplier yang terlibat, telurnya, sayurnya, ikannya. Dan itu bisa disuplai oleh UMKM. UMKM kita dorong Pak untuk bisa menjadi supplier dari MBG," jelas Reghi.

Wujudkan Ekonomi Kerakyatan, Mendagri Pacu Pemda Dukung Program Kopdeskel Merah Putih

Menteri Dalam Negeri (Mendagri)

Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda), termasuk para sekretaris daerah (Sekda), untuk mendukung berbagai program yang digalakkan Presiden RI Prabowo Subianto. Program tersebut seperti Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, Swasembada Pangan, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG). Berbagai inisiatif tersebut dinilai sejalan dengan paradigma ekonomi kerakyatan yang diusung Presiden Prabowo.

"Nah, ini perlu dipahami betul oleh kita. Pemikiran-pemikiran beliau (Presiden Prabowo) artinya kalau sudah bicara untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan [dengan] meningkatkan hajat hidup rakyat kecil, beliau berada di depan," ujar Mendagri.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar

khususnya daerah. Ia meyakini, apabila program tersebut dijalankan sesuai aturan dan rencana, secara tidak langsung bakal mendorong terwujudnya ekonomi kerakyatan. Selain itu, program tersebut juga akan menghasilkan multiplier effect bagi masyarakat berupa penyediaan lapangan kerja, memacu perputaran ekonomi lokal, menghapus praktik tengkulak, hingga melahirkan sistem keuangan yang inklusif. Dengan demikian, kesejahteraan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Nah, keuangan inklusif artinya semua orang tahu, bisa punya akses dan mengerti cara memanfaatkan sistem keuangan modern, yang tidak bergantung kepada sistem tradisional, [seperti] rentenir, tengkulak, dan lain-lain," ujarnya.

Dalam pelaksanaannya Kopdeskel



(UUD) 1945 telah mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada konteks ini, Mendagri mengajak Sekda yang merupakan pejabat birokrat tertinggi di daerah untuk memahami dengan baik aturan tersebut dalam upaya memakmurkan rakyat. Terlebih, Sekda memiliki peran sebagai jembatan antara kepala daerah dengan jajaran staf di bawahnya.

Mendagri berharap program Kopdeskel Merah Putih dapat diimplementasikan dengan baik oleh semua pihak,

Merah Putih bakal dilengkapi dengan penyediaan barang/jasa, seperti penyediaan gas, obat-obatan apotek, hingga keperluan komoditas pangan. Selain itu, koperasi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan stabilisasi harga pangan, melalui intervensi harga beras, jagung, dan yang lainnya.

Mendagri mengapresiasi jajaran Pemda yang secara aktif telah mendukung pelaksanaan program tersebut.

"Oleh karena itu, rekan-rekan daerah, saya berterima kasih rekan-rekan sudah mendorong, sehingga terbentuknya secara badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," tandasnya. ♦

KEMENDAGRI MINTA PEMDA WUJUDKAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL MENYELURUH

Juga, Sinergi Penguatan Industri Olahraga di Tanah Air

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan mendorong pemerintah daerah (Pemda) memperkuat sinergi dalam memperluas cakupan jaminan sosial bagi masyarakat.

Dorongan itu disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dan Deputi Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Hendra Nopriansyah dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Forum ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menekankan bahwa jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara. Menurutnya, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bentuk nyata perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin agar memiliki

luran (PBI). Sementara Pemda dapat menambah cakupan bagi masyarakatnya sesuai kemampuan fiskal.

Tanggung jawab penyediaan fasilitas kesehatan berada pada pemerintah pusat dan daerah, bukan pada BPJS. Pihaknya hanya menjamin akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Ia pun mengingatkan agar rumah sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) tidak mendiskriminasi peserta BPJS. Selain itu, ia juga mengajak Pemda berperan aktif mengedukasi masyarakat tentang hak mereka atas jaminan kesehatan.

"Dulu orang miskin dilarang sakit, sekarang orang miskin dilarang bayar kalau sakit, asal menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan," jelasnya.

Sementara itu, Deputi Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Hendra Nopriansyah menegaskan pentingnya peran Pemda dalam mempercepat tercapainya Universal Coverage (UC) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). "Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, salah satu peran penting adalah pekerja. Jika pekerja sejahtera dan bahagia, Asta Cita Bapak Presiden dan Indonesia Emas 2045 akan cepat tercapai," kata Hendra.

Cakupan BPJS Ketenagakerjaan saat ini baru mencapai 37 persen, jauh di bawah BPJS Kesehatan yang telah menembus 98 persen. Padahal, Jamsostek merupakan hak asasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Jadi kalau kita pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum memenuhi hak asasi, artinya ada PR yang belum ditunaikan untuk kepentingan dari rakyat Indonesia," tegasnya.

Hendra mengapresiasi peran sejumlah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap Jamsostek. Hingga September 2025, tercatat 3,2 juta pekerja miskin dan miskin ekstrem telah mendapatkan perlindungan dari Pemda. Namun, masih ada sekitar 27 juta pekerja yang belum terlindungi.

Manfaat Jamsostek tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga berdampak sosial-ekonomi. Berdasarkan catatannya, tak sedikit penerima manfaat yang menggunakan jaminan tersebut



akses terhadap layanan kesehatan.

"Tentu kami berharap Bapak-Ibu sekalian ikut memfasilitasi masyarakat di daerahnya masing-masing untuk tahu haknya ini," ujarnya di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/10/2025).

Ia menjelaskan, hingga kini program JKN telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Pemerintah pusat tercatat telah menanggung iuran 96,8 juta peserta melalui skema Penerima Bantuan

untuk biaya sekolah anak, membuka usaha, dan membayar utang.

Percepatan perluasan Jamsostek dapat dilakukan tanpa membebani APBD. Hal ini misalnya melalui optimalisasi proyek jasa konstruksi yang mewajibkan pemberi proyek menanggung perlindungan bagi pekerjaanya.

"Saya yakin peran penting dari Sekda dan Bappeda sangat penting untuk memenuhi perlindungan jaminan sosial dan hak asasi seluruh pekerja di Indonesia," tandasnya.

Ketika Mendagri Tito dan Menpora Erick Bertemu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mu-

akan lebih optimal.

Menpora Erick juga mengundang Mendagri untuk mendukung pelaksanaan Sport Summit. Acara tersebut direncanakan bakal digelar pada bulan Desember 2025 dengan tujuan menjadi katalis kolaborasi antar-pemangku kepentingan di bidang olahraga. Selain itu, ajang tersebut juga menjadi wadah pertemuan para penggerak perubahan di industri olahraga.

Mendagri dapat menekankan kembali mengenai skema kemitraan aset Pemda dengan pihak swasta, utamanya dalam pengembangan industri olahraga. Pengembangan tersebut dinilai penting lantaran dapat menjadi peluang bagi

menyambut baik upaya pengembangan olahraga di daerah. Dan akan mendorong Pemda dengan APBD tinggi untuk terlibat aktif dalam memajukan ekosistem olahraga di daerah masing-masing. Ia meminta agar daerah yang memiliki aset tidak produktif (idle) di bidang olahraga untuk mendorong pengelolaannya secara profesional. Caranya dapat melalui mekanisme kerja sama dengan dunia usaha, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU), Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta stakeholder lainnya.

"Kerja sama untuk aset-aset di daerah yang bisa digunakan untuk fasilitas olah-



hammad Tito Karnavian menerima kunjungan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (29/10/2025), membahas penguatan industri olahraga di Tanah Air.

Mendagri banyak menyimak penjelasan Menpora Erick ihwal perkembangan ekosistem olahraga di Indonesia, meliputi pembangunan infrastruktur olahraga di sejumlah daerah, potensi ekonomi dari hasil gelaran olahraga, serta pelibatan pemerintah daerah (Pemda) dalam meningkatkan kualitas olahraga. Menpora menyarankan agar dibentuk tim dari tiga kementerian guna memperkuat kebijakan tersebut, terutama dari sisi regulasi. Dengan begitu, program dapat dilaksan-

Pemda dalam meningkatkan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Dan bagus kan Pemda-Pemda sendiri kan dia akan coba meningkatkan APBD-nya dan lain-lain, Pak. Dengan entrepreneurship [di bidang olahraga]," ujar Menpora Erick.

Dalam acara Sport Summit mendatang, pihaknya juga akan mengundang jajaran pejabat terkait di Kementerian/Lembaga (K/L). Dengan partisipasi tersebut diharapkan ekosistem olahraga di Indonesia dapat terus dimaksimalkan, baik dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), inovasi, maupun dampak ekonomi yang dihasilkan.

Merespons inisiatif tersebut, Mendagri

raga. Nah, ini kalau bisa dikelola profesional juga bagus juga untuk olahraga," ungkapnya.

Secara khusus, Mendagri menugaskan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus untuk menindaklanjuti koordinasi teknis bersama Kemenpora, Kementerian UMKM, Kementerian PU, termasuk juga dengan Pemda.

Turut hadir pada pertemuan itu Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Gunawan Suswantoro, serta pejabat terkait lainnya. ♦

MENKOMDIGI PASTIKAN, 90 JUTA PELUANG KERJA BARU TERBUKA LEWAT AI

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa kecerdasan artifisial (AI) adalah peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, bukan ancaman bagi tenaga kerja manusia.

"Dikabarkan kecerdasan artifisial akan menggantikan sekitar 85 juta pekerjaan di dunia pada tahun 2025. Namun, pada saat yang bersamaan, AI juga berpotensi menciptakan 90 juta pekerjaan baru di berbagai bidang. Karena itu, AI perlu diwaspadai, tetapi tidak perlu ditakuti," ujar Meutya dalam acara kumparan AI for Indonesia di The Ballroom Djakarta Theater, Kamis (23/10/2025).

Indonesia termasuk salah satu negara paling optimistis di dunia dalam menghadapi perkembangan AI. Masyarakat menunjukkan kesiapan tinggi dalam menerima teknologi baru tanpa rasa takut berlebihan.

"Berdasarkan berbagai survei, Indone-

sia dinilai sebagai negara yang mampu menerima AI dengan baik, tidak takut, dan itu merupakan pertanda yang baik. AI harus diposisikan untuk memperkuat kemampuan manusia, bukan menggantikannya. Kita coba melihat dan membicarakan AI dari perspektif yang berbeda. Bukan sekadar data dan angka, melainkan bagaimana AI bisa dimaknai sebagai alat bantu yang memperkuat manusia," tuturnya

Pemerintah tengah menyusun Peta Jalan Nasional AI sebagai panduan strategis lintas sektor. Regulasi ini diharapkan terbit pada awal 2026 melalui Peraturan Presiden.

"Insyaallah pada awal tahun 2026, Peraturan Presiden tentang peta jalan ini sudah dapat diterbitkan dan menjadi





pedoman bagi kita semua," jelasnya.

Selain menyiapkan regulasi, pemerintah juga berfokus pada pemerataan akses digital agar seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat AI.

"Yang juga penting adalah bagaimana membuat AI berikutnya menjadi inklusif. Kami juga telah melelang frekuensi 1,4 GHz untuk menghadirkan internet yang lebih murah dan merata," kata Meutya.

Menkomdigi menutup paparannya dengan ajakan agar semua pihak memanfaatkan AI secara bijak dan bertanggung jawab.

"Ketika pemanfaatannya dilakukan dengan baik, AI akan membawa kebaikan. Demokrasi teknologi menuntut tanggung jawab bersama, dan kita semua memiliki peran yang sama penting dalam menentukan arah perkembangan AI ke depan," katanya.

Bonus Demografi Disambut dengan Kecakapan AI

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan di tengah terjadinya bonus demografi, kecakapan sumber daya manusia, terutama di bidang teknologi kecerdasan artifisial (AI), memegang peranan penting agar Indonesia siap menghadapi tantangan zaman.

"Ini PR besar kita semua untuk membangun sumber daya manusia yang cakap, yang siap menghadapi tantangan



Insyaallah pada awal tahun 2026, Peraturan Presiden tentang peta jalan ini sudah dapat diterbitkan dan menjadi pedoman bagi kita semua.

baru di dunia yang penuh ketidakpastian," kata Wamen Nezar Patria dalam Reuni dan Seminar Nasional Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAA PPMI) di Auditorium Universitas Brawijaya, Kota Malang, Sabtu (25/10/2025).

AI menjadi teknologi penting yang perlu dikuasai karena adopsinya meningkat pesat sejalan dengan semakin populernya platform generative AI.

Indonesia membutuhkan talenta-talenta digital di bidang AI yang mampu mengembangkan teknologi AI secara mandiri sesuai dengan budaya bangsa.

"Negara yang berada di global south selalu memakai produk-produk yang dari luar, nilai-nilai yang ada disana kemungkinan tidak sejalan. Itulah mengapa kemandirian teknologi menjadi penting," tuturnya.

Angkatan kerja produktif Indonesia yang berusia 16 s.d. 65 tahun mencapai 70 persen demografi pada 2035 sehingga perlu langkah-langkah konkret agar para generasi muda menghadapi masa bonus demografi tersebut.

"Ini adalah kekuatan produktif yang luar biasa, dan kita hanya bisa menikmati itu sampai dengan 2035 di puncak 70 persen itu, setelah itu dia menyusut, dan selanjutnya sampai 2045 mungkin sekitar 60 persen atau di bawah itu," jelasnya.

Saat ini Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, diantaranya rendahnya lulusan perguruan tinggi serta perkembangan geopolitik dunia yang dinamis membuat Indonesia harus menyesuaikan diri.

Oleh karena itu, pemerintah saat ini tengah melaksanakan berbagai program prioritas untuk mempersiapkan generasi yang akan datang demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat sesuai visi Indonesia Emas 2045. ♦

MASYARAKAT DIINGATKAN; KEGIATAN FOTOGRAFI DI RUANG PUBLIK WAJIB PATUHI UU PDP

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengingatkan seluruh lapisan masyarakat agar berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan media sosial ataupun ruang publik lainnya. Semua harus tunduk dan mematuhi ketentuan-ketentuan ataupun rambu-rambu hukum. Termasuk di antaranya pengambilan gambar atau aktivitas fotografi di ruang publik.

Sinyalemen ini disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi Alexander Sabar pada 29 Oktober 2025. Ia menegaskan kegiatan pengam-

bilan gambar atau aktivitas fotografi yang dilakukan di ruang publik wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Ditekankan, bahwa setiap pemotretan dan publikasi foto harus memperhatikan aspek hukum dan etika pelindungan data pribadi.

"Foto seseorang, terutama yang me-



nampilkan wajah atau ciri khas individu, termasuk kategori data pribadi karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara spesifik. Foto yang menampilkan wajah seseorang termasuk data pribadi dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin,” tanda Dirjen di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat.

Setiap bentuk pemrosesan data pribadi, mulai dari pengambilan, penyimpanan, hingga penyebarluasan, harus memiliki dasar hukum yang jelas, misalnya melalui persetujuan eksplisit dari subjek data.

Dirjen Alexander juga mengingatkan bahwa fotografer wajib menghormati hak cipta dan hak atas citra diri. Tidak boleh ada pengkomersialan hasil foto tanpa persetujuan dari subjek yang difoto.

“Masyarakat memiliki hak untuk menggugat pihak yang melanggar atau menyalahgunakan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP dan UU Nomor 1 Ta-

hun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” tegasnya.

Ke depan, Kementerian Komdigi akan mengundang perwakilan fotografer dan asosiasi profesi seperti Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia (APFI) serta Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terkait untuk memperkuat pemahaman tentang kewajiban hukum dan etika fotografi di ruang digital.

“Kami ingin memastikan para pelaku kreatif memahami batasan hukum dan etika dalam memotret, mengolah, dan menyebarkan karya digital. Ini bagian dari tanggung jawab bersama untuk menjaga ruang digital tetap aman dan beradab,” jelas Alexander.

Kementerian Komdigi juga terus meningkatkan literasi digital masyarakat, termasuk pemahaman tentang perlindungan data pribadi dan etika penggunaan teknologi, baik di bidang fotografi maupun kecerdasan buatan generatif.

Upaya ini menjadi bagian dari komitmen dalam membangun ekosistem digital yang aman, beretika, dan berkeadilan, serta memperkuat pengawasan aktif dan

mengembangkan teknologi kecerdasan artifisial (AI) sangat tinggi. Karena minat mereka yang memang tinggi, terlihat dari banyaknya perusahaan rintisan (startup) asal Indonesia yang bergerak di bidang AI.

“Banyak inisiatif baru yang lahir dalam lima tahun terakhir ini. Kita memiliki sekitar 2.800 startup yang sedang mengembangkan teknologi AI,” ujar Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria dalam Forum Tri Hita Karana G20 Bali Global Blended Finance Alliance Dialogue di Tsinghua Southeast Asia Center, Bali, Kamis (23/10/2025).

Indonesia juga telah menyelesaikan Readiness Assessment Methodology (RAM) AI UNESCO yang menunjukkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perkembangan AI. Indonesia jadi negara Asia Tenggara pertama yang menyelesaikan RAM AI UNESCO dalam empat bulan. Ini menunjukkan kesiapan Indonesia menjadi pemimpin dalam pengembangan AI di kawasan Asia Tenggara.

Saat ini, pemerintah juga tengah mempersiapkan Perpres sebagai dasar hukum penerapan Peta Jalan AI Nasional dan Perpres Etika AI. Dua peraturan tersebut akan menjadi dasar pengembangan ekosistem AI yang etis dan bertanggung jawab.



responsif terhadap dugaan pelanggaran UU PDP.

Perpres Peta Jalan AI Nasional dan Perpres Etika AI

Sementara itu, Kementerian Komdigi mendorong generasi muda Indonesia

“Sejalan dengan visi ini, salah satu prinsip panduannya adalah keberlanjutan. AI harus dikembangkan dengan memperhatikan dampaknya terhadap manusia, lingkungan, dan semua makhluk hidup, untuk memastikan bahwa AI berkontribusi pada kesejahteraan jangka panjang,” jelasnya. ♦

WAMENSOS: MARI SAMA-SAMA KITA PERANGI SERAKAHNOMICS

Mensos: 300 Ribu KPM Naik Kelas Tahun 202

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyerukan seluruh elemen bangsa bersatu melawan serakah-nomic atau sistem ekonomi serakah yang disinyalir menjadi akar masalah ketimpangan sosial di Indonesia.

Hal itu disampaikan Agus Jabo saat menjadi pembicara utama dalam acara Diskusi Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Universitas Bina Bangsa (Uniba), Serang, Banten, Rabu (29/10/2025).

"Kalau Indonesia mau maju, adil, dan makmur, ya kita harus bersatu, bergotong-royong, mengenyahkan Serakahnomic ini," kata Agus Jabo.

Hadir dalam acara ini Wakil Walikota Serang Nur Agis Aulia, Rektor Universitas Bina Bangsa Prof. Bambang Dwi Suseno dan para mahasiswa Uniba.

Agus Jabo mamaparkan bahwa serakahnomic terdiri dari tiga unsur utama yang saling menguatkan. Yakni imperialisme, oligarki, dan birokrasi korup. Ketiganya, kata dia, menjadi penghalang utama bagi terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur.

la menegaskan, satu-satunya jalan keluar dari belenggu Serakahnomic adalah dengan menjalankan Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten. Prinsip pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, menurutnya, harus kembali menjadi pijakan utama pembangunan nasional.

"Apa yang menjadi sumber daya alam Indonesia itu, betul-betul mulai sekarang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk kemakmuran segelitik orang. Dan harus dikelola untuk kepentingan bangsa, bukan kepentingan yang kapitalistik," jelas Agus Jabo.

Sehubungan dengan hal ini dia mengapresiasi semangat mahasiswa yang mulai mengkaji isu serakahnomic secara kritis.

"Saya mengapresiasi teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa Uniba. Tadi juga ada unsur yang terlibat di sini,



ada LMND, ada Prima. Maju terus, mari kita bersatu dan enyahkan Serakahnomic,” katanya.

Agus Jabo menutup pernyataannya dengan optimisme. Ia meyakini, bila bangsa Indonesia mampu menghapus praktik Serakahnomic, maka cita-cita keadilan sosial sebagaimana diamanatkan para pendiri bangsa akan terwujud.

“Kalau serakahnomic bisa dihilangkan (maka rakyat) bisa tersenyum seperti yang diinginkan Pak Presiden. Indonesia akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja,” katanya.

Selaras dengan hal itu, Kemensos terus memperkuat keberpihakan kepada wong cilik, sesuai arah kebijakan kerakyatan Presiden Prabowo Subianto. Melalui program Sekolah Rakyat, Program Keluarga Harapan (PKH)-Sembako dan bantuan sosial berbasis pemberdayaan.

300 Ribu Lebih PKM Graduasi pada 2026

Sementara itu Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, pemerintah menargetkan sejumlah 300 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) bisa graduasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2026, sehingga mereka tidak lagi bergan-

tung pada pemberian bantuan sosial (Bansos).

“Tahun depan kita punya target kira-kira di atas 300 ribu keluarga penerima manfaat yang mudah-mudahan nanti bisa naik



Pada tahun ini, tercatat ada sejumlah 77 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah graduasi dari program bantuan sosial tersebut.

kelas,” kata Mensos.

Pada tahun ini, tercatat ada sejumlah 77 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah graduasi dari program bantuan sosial

tersebut. “Pada tahun ini sebanyak 77 ribu keluarga yang sudah graduasi, naik kelas,” kata Saifullah Yusuf.

Menurut Mensos, keluarga yang telah graduasi dari program bansos, selanjutnya akan mengikuti program pemberdayaan yang akan diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Tujuannya untuk mencetak mereka menjadi keluarga yang mandiri dan berdaya.

Pemerintah berkomitmen untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem pada 2026 dan menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi lima persen pada 2029. Upaya tersebut dilakukan lewat kolaborasi lintas kementerian dan sejumlah pemangku kepentingan.

Saat ini tercatat sekitar 8,4 juta keluarga miskin dan rentan telah menerima perlindungan sosial, sementara 1,3 juta keluarga miskin menerima BLT Dana Desa. Kemudian ada lebih dari 96 juta warga kini dapat berobat gratis melalui BPJS Kesehatan.

Di sektor ekonomi rakyat, sekitar 3,7 juta pedagang kecil, warung, dan pengusaha rintisan memperoleh pembiayaan, serta lebih dari 12 juta pelaku ekonomi kreatif, koperasi, pekerja migran, dan UMKM mendapatkan akses peningkatan kapasitas untuk naik kelas. ♦



WAKIL RAKYAT SOROTI BIAYA HAJI HANYA TURUN RP1 JUTA

Penyelenggaraan Haji 2026 mulai menjadi pembahasan resmi Kementerian Haji dan Umrah dengan Komisi VIII DPR. Kementerian Haji mengusulkan penurunan biaya haji hingga Rp1 juta per jamaah. Wakil Rakyat ingin lebih dari itu.

Upaya menurunkan biaya haji sudah terbukti. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2026 atau 1447 H senilai Rp 88.409.365 per jamaah. Rinciannya, dari BPIH sebesar Rp 88.409.365 tadi, calon jamaah haji akan menanggung biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) sebesar Rp 54.924.000 atau 62 persen dari total pembiayaan.

Sisanya, 38 persen biaya setara dengan Rp33 juta akan menjadi tanggungan pemerintah. Begitulah seperti disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di hadapan para wakil rakyat dalam rapat di DPR.

"Singkatnya nilai yang kami ajukan terkait dengan Bipih turun sebesar Rp1 juta dibandingkan dengan tahun yang

lalu," kata Wamen Dahnil dalam rapat panitia kerja (Panja) BPIH bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Oktober 2025 yang juga disiarkan dalam jaringan (daring) saluran YouTube DPR RI.

Nah, rapat kali ini menandai pembahasan awal penentuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk keberangkatan haji 2026. Berlangsung di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Senin, 27 Oktober 2025, pimpinan Rapat adalah Ketua Komisi VII DPR Marwan Dasopang.

Marwan mengatakan rapat di masa reses digelar setelah mendapat persetujuan pimpinan DPR. Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf serta Wamen Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak hadir dalam rapat tersebut.

"Sesuai dengan hasil keputusan rapat





pimpinan DPR, pada tanggal 1 Oktober 2025, pimpinan DPR menyetujui rapat Komisi VIII dalam rangka pembahasan mengenai BPIH tahun 2026 dilaksanakan dalam masa reses pada persidangan I tahun 2025-2026," kata Marwan dalam rapat.

Wamen Dahnil mengatakan pemerintah berupaya menurunkan BPIH sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan rancangan BPIH harus segera dituntaskan sebagai persiapan haji 2026. "Hari ini mau bahas rancangan BPIH jadi fokusnya persiapan penentuan, singkatnya untuk publik itu pengkos naik haji gitu, hari ini BPIH. Yang jelas perintah presiden harus diturunkan kita akan berusaha pada poin itu," ujar Dahnil sebelum rapat.

"Kalau kemarin kita tahu sebenarnya kan Rp 96.000.000, cuma dipotong daripada bantuan subsidi di BPKH menjadi Rp 54.000.000 sekian, dengan penurunan Rp 4.500.000 per jemaah," ujarnya.

Menurut Dahnil BPIH harus dituntaskan lebih awal. Dia mengatakan hal itu penting agar calon jemaah haji berhak berangkat bisa segera melakukan pelunasan. "Harus diselesaikan lebih awal adalah selain BPIH, kementerian haji di umrah segera melakukan rekrutmen, sekarang sudah berjalan ya, kementerian-kementerian haji, baik yang ada di

pusat maupun di daerah. Karena ini kan menentukan bagaimana akan melakukan pendaftaran, melakukan pelunasan," kata dia.

Menurut Dahnil, usulan penentuan besaran biaya haji 2026 sudah mempertimbangkan berbagai hal. "Pemerintah mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam menentukan komponen BPIH sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik dengan biaya yang wajar," ujarnya.

Kementerian Haji dan Umrah, lanjut Wamen Dahnil, menggunakan asumsi nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap Rupiah sebesar Rp 16.500, serta nilai tukar riyal sebesar Rp 4.400 per SAR (Saudi Arabia Riyal). "Pembayaran akan dilakukan dalam bentuk SAR dengan pertimbangan untuk melindungi jemaah haji dari fluktuasi besar dalam nilai tukar yang diterapkan oleh perusahaan penukaran uang," ungkapnya.

Untuk komponen biaya yang dibebankan langsung kepada jemaah haji dengan rata-rata biaya Bipi Rp 54,9 juta adalah sebagai berikut:

Biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi PP sebesar Rp33.100.000
 ▶ Akomodasi Makkah Rp14.652.000
 ▶ Akomodasi Madinah Rp3.872.000
 ▶ Living Cost sebesar Rp3.300.000
 Sedangkan komponen yang dibe-

bankan kepada dana nilai manfaat atau optimalisasi adalah sebesar Rp33,4 juta terdiri dari:

- ▶ Pelayanan Akomodasi Rp5.517.000
- ▶ Pelayanan Konsumsi Rp6 juta
- ▶ Layanan Transportasi Rp3 juta
- ▶ Pelayanan di Arafah, Musdalifah dan Mina Rp15 juta
- ▶ Perlindungan Rp846 ribu
- ▶ Pelayanan embarkasi/ demarkasi Rp89 ribu
- ▶ Dokumen perjalanan Rp214ribu
- ▶ Perlengkapan jemaah haji Rp30ribu
- ▶ Pembinaan jemaah haji di tanah air dan Arab Saudi Rp782 ribu
- ▶ Pelayanan umum dalam negeri dan Arab Saudi Rp517ribu
- ▶ Pengelolaan BPIH Rp96 ribu

Toh sejak awal pembahasan, penurunan biaya haji sudah mendapat tanggapan dari para wakil rakyat. Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, misalnya, mengemukakan, angka penurunan biaya haji itu harus lebih dari Rp1 juta per jemaah.

"Ini turunnya baru Rp1 juta, Pak Wakil Menteri. Ini belum masuk angka-angka bancakan. Kalau kita masukkan angka bancakan, harus turun Rp 5 triliun dari Rp 17 triliun," kata Marwan.

Marwan pun mempertanyakan kualitas layanan yang akan diterima jemaah pada penyelenggaraan haji 2026. "Ump-



amanya, layanan kita itu sebetulnya kelasnya kelas apa? Jangan-jangan paket C minus. Dolarnya naik, sarana naik, tapi turun Rp1 juta,” jelas Marwan.

Dengan penurunan Rp1 juta per jamaah, total penurunan hitung-hitungannya akan mencapai Rp221 miliar. Nominal Rp221 miliar ini berasal dari kuota 221 ribu jamaah dikalikan Rp1 juta. Menurut Marwan, angka ini terlalu kecil karena biaya haji 2026 bisa ditekan hingga Rp6 triliun.

Ia menjelaskan, rancangan biaya haji yang diusulkan Kementerian Haji dan Umrah masih sama seperti dengan usulan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag). Menurut Marwan seharusnya Kemenhaj memiliki terobosan baru. “Tentu sebagai Kementerian baru harus punya terobosan yang baru dibanding Dirjen PHU yang lalu,” tambah Marwan.

Dia mengingatkan Komisi VIII DPR RI mengkritisi kinerja Ditjen PHU Kementerian Agama yang kewenangannya dialihkan pada Kementerian Haji dan Umrah. Menurut dia, ada dua persoalan pada periode sebelumnya, yaitu menyangkut

pelayanan amburadul dan kenaikan komponen biaya haji yang diduga menjadi bancakan.

“Dua-dua ini (pelayanan dan komponen biaya) harus terjawab di Kementerian Haji. Kalau tidak, ya artinya sama saja,” ujar Marwan.

Senada dengan itu, Anggota Komisi VIII DPR RI M Husni mengemukakan, pembahasan ini menjadi tahap penting sebelum penetapan biaya haji dan pelaksanaan penulisan calon jamaah yang ditargetkan selesai paling lambat bulan November. “Disampaikan bahwa biaya haji 2026 memang mengalami penurunan sebesar 1 juta rupiah dari sebelumnya sebesar 88,4 juta. Namun, angkanya tidak memuaskan seharusnya bisa lebih besar,” tuturnya.

Ia menjelaskan, Komisi VIII berharap agar biaya haji tahun depan dapat kembali diturunkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan bagi jamaah. Menurutnya, penyelenggaraan haji 2025 menjadi pelajaran penting setelah muncul berbagai persoalan di lapangan. “Apa yang terjadi pada pelaksanaan haji 2025 menjadi pelajaran dan kami berharap permasalahan yang ada dilapangan tidak terulang

kembali di haji 2026,” ungkap Husni.

Di sisi lain ia menilai, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang baru akan membawa perbaikan signifikan dalam manajemen penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. “Ini perdana bagi Kementerian Haji yang akan menyelenggarakan ibadah haji tahun 2026, kami mengharapkan agar pelaksanaannya akan jauh lebih baik,” ujarnya.

Sedangkan Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina menilai penurunan tersebut belum mencerminkan potensi efisiensi yang sebenarnya. “Kalau pengurangan 200 riyal untuk masyair saja bisa setara dengan Rp800 ribu lebih, logikanya penurunan biaya haji seharusnya bisa lebih dari satu juta rupiah,” ungkap Selly.

Legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menyinggung pernyataan dari Kementerian Haji dan Umrah yang sebelumnya menyebut adanya indikasi kerugian hingga Rp5 triliun dalam penyelenggaraan pelayanan haji, khususnya di sektor transportasi dan akomodasi selama di Makkah dan Madinah.

“Kalau memang benar ada kerugian negara sebesar itu, maka seharusnya



anggaran tersebut bisa digunakan untuk mengurangi biaya haji jamaah. Kami ingin data itu dibuka secara transparan, supaya tidak ada yang ditutupi,” ujar Selly.

Selly juga menyoroti ketimpangan biaya antar-embarkasi yang selama ini menjadi pertanyaan para calon jamaah haji di daerah. Menurutnya, jamaah dari Aceh hingga Papua seharusnya membayar biaya yang sama, mengingat seluruh jamaah adalah warga negara yang memiliki hak dan kewajiban setara dalam beribadah.

“Selama ini jamaah selalu bertanya kenapa biaya haji dari Aceh lebih murah dibanding Jawa Barat atau Banjarmasin. Kalau asas keadilan ingin ditegakkan, seharusnya tidak ada perbedaan biaya. Selisih biaya karena avtur misalnya, bisa ditanggung oleh nilai manfaat, bukan dibebankan kepada jamaah,” jelasnya.

Ia pun berharap Kementerian Haji dan Umrah sanggup menerapkan kebijakan biaya haji seragam secara nasional, dengan menanggung perbedaan biaya dari hasil pengelolaan nilai manfaat dana haji.

Dalam rapat kali ini, Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang juga menyoroti proses verifikasi jamaah haji yang dianggap belum jelas. “Kita enggak tahu nih

yang mana yang diverifikasi. Berdasarkan kuota daftar tunggu atau berdasarkan kuota besaran jumlah umat muslim per provinsi? Yang mana sekarang nih yang diverifikasi ini?” katanya.

Lagi pula, kata Marwan, Kemenhaj belum melakukan perhitungan dan negosiasi mendalam, termasuk biaya transportasi udara. “Kami sebetulnya tidak ingin berbicara dengan penerbangan kalau sudah selesai harganya. Kalau Kementerian Haji sudah bisa negosiasi turun, ya kami enggak usah ikut,” ungkapnya.

Di akhir rapat, belum ada kesepakatan berapa biaya haji 2026. Namun, pemerintah bersama DPR sepakat terus mencari peluang menurunkan lagi BPIH 2026. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan bahwa upaya itu dilakukan dengan menyisir satu per satu komponen biaya agar penurunan tidak mengorbankan kualitas layanan jamaah.

“Amanah presiden jelas, ongkos haji harus turun, dan DPR sebagian besar bersepakat untuk menyisir satu per satu komponen biaya yang bisa diturunkan,” ujar Dahnil usai rapat.

Menurut Dahnil, pemerintah dan DPR

memiliki komitmen yang sama untuk menurunkan biaya haji, meskipun terdapat tantangan dari sisi nilai tukar dollar yang kini mencapai sekitar Rp 16.500. “Secara ekonomis harusnya naik karena acuan dollar juga naik. Namun, kita sedang berusaha menghitung komponen per komponen mana yang bisa diefisienkan supaya totalnya bisa kita turunkan,” ucapnya.

Salah satu pos yang sedang dijaiki untuk diefisienkan adalah layanan umum yang dilakukan oleh penyedia (syarikah) di Arab Saudi. “Sebenarnya layanan umum sudah mulai kita negosiasikan, kemungkinan bisa turun. Itu salah satu contoh,” jelas Dahnil.

Ia menegaskan penurunan biaya tidak boleh disertai penurunan kualitas layanan kepada jamaah. Pemerintah hanya akan memangkas pos-pos yang dinilai masih tidak efisien.

“Perintah presiden adalah penurunan itu tidak boleh diikuti dengan penurunan kualitas. Karena itu, kami fokus memastikan komponen biaya mana yang terjadi inefisiensi. Pos-pos mana yang punya potensi inefisiensi, itu yang harus kita turunkan,” tandasnya. ♦

HUKUM BISNIS KEMITRAAN KULINER DALAM KAJIAN FIQIH ISLAM

Bisnis kuliner saat ini sedang berkembang pesat di Indonesia. Sehingga bisnis inipun banyak dirilik oleh para pengusaha muda, khususnya. Dalam berbisnis, meskipun itu bisnis kecil-kecilan, tetap membutuhkan dana sebagai modal awal. Namun tidak semua orang yang ingin berbisnis memiliki modal yang cukup, hingga ia perlu bermitra atau bekerja sama dengan rekan atau teman yang memiliki keinginan yang sama, yaitu sama-sama ingin berbisnis.

Kerja sama ini, umumnya dinamakan sebagai kemitraan usaha kuliner, dimana satu pihak sebagai pemodal dan pihak lain (pihak kedua) yang memiliki keahlian memasak, seperti chef misalnya. Untuk kerja sama ini, di mana untung rugi dibagi Bersama.

Lantas, bagaimana hukum dari bisnis kemitraan kuliner ini menurut kajian fiqih Islam?

Dilansir dari NU Online, merujuk penjelasan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh, syirkah taushiyah basithah, didefinisikan kerja sama bisnis kemitraan ini sebagai suatu syirkah atau kemitraan yang mengikat antara beberapa pihak, yang mana salah satu pihak menjadi pemodal sekaligus pengelola dan pihak lain sebagai pemodal saja.

Dalam konsep dasarnya, pihak yang menjadi pemodal, yang sekaligus juga sebagai pengelola, bertanggung jawab atas pengelolaan usaha dan risiko-risiko yang timbul darinya, seperti utang usaha dan semisalnya.

Sementara bagi pihak yang hanya berperan sebagai pemodal saja, hanya bertanggung jawab menyediakan sebagian modal, tidak bertanggung jawab atas pengelolaan usaha dan risiko-risikonya.

Syekh Wahbah menyatakan, syirkah semacam ini diperbolehkan, karena identik dengan kebolehan mensyaratkan pekerjaan suatu usaha dibebankan kepada salah satu mitra dan hanya menjadi tanggung jawabnya dalam syirkah 'inan.

Syekh Wahbah menjelaskan: "Syirkah atau kemitraan seperti ini diperbolehkan juga, karena para fuqaha kita dalam syirkah 'inan membolehkan persyaratan pelaksanaan usaha dibebankan kepada salah satu pihak dan menjadi tanggung jawabnya, bukan mitra lainnya." (Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, [Beirut, Darul Fikr: 1985], juz IV, halaman 879).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam syirkah juga boleh disyaratkan tambahan laba bagi si pengelola usaha atau gaji tertentu untuknya di luar pembagian laba yang disepakati. Karena pengelola usaha diposisikan sebagai pekerja atau karyawan dalam konteks ini, alias

merangkap.

Syirkah taushiyah basithah dapat dilakukan dengan format pengelola usahanya satu orang atau lebih. Demikian pula pihak yang hanya berperan sebagai pemodal. Yang penting tanggung jawab pengelolaan usaha dan risiko-risikonya ditanggung oleh pihak-pihak yang berperan sebagai pemodal sekaligus pelaksana atau penanggung jawab usaha. (Az-Zuhaili, IV/879).

Menurut Syekh Wahbah, bahwa syirkah taushiyah basithah ini, juga dapat



diidentikkan dengan syirkah mudharabah. Mitra yang mengelola usaha identik dengan mudharib, yang juga mengelola usaha dalam syirkah mudharabah, yang bertanggung jawab atas jalannya usaha dan risiko-risikonya; sementara mitra yang hanya berperan sebagai pemodal, identik dengan rabbul mal atau pemilik modal dalam syirkah mudharabah, yang tidak bertanggung jawab atas jalannya usaha dan risiko-risikonya.

Rabbul Mal ini hanya menanggung kerugian saat usahanya rugi sesuai modalnya saja. Dalam konteks ini, pengelola tidak dapat dituntut dari kerugian usaha yang sewajarnya. Ia bebas menjalankan usaha sebagaimana umumnya.

Bila usaha menghasilkan keuntungan, maka dibagi sesuai kesepakatan seba-

gaimana dalam syirkah mudharabah. Syekh Wahbah menegaskan: "Keuntungan usaha dibagi sesuai perhitungan yang disepakati antara mitra yang terlibat dalam syirkah mudharabah." (Az-Zuhaili, IV/879).

Simpulan Hukum

Kemitraan usaha kuliner antara pemodal dengan mitra yang punya keahlian memasak semisal chef, dapat dirujuk dalam syirkah taushiyah babsithah sebagaimana penjelasan Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dengan empat ketentuan sebagai berikut:

1. Pemodal bertanggung jawab menyediakan modal usaha dan tidak menanggung risiko-risikonya kecuali kerugian sebatas modalnya.
2. Pengelola usaha bertanggung jawab penuh atas jalannya usaha dan risiko-risikonya semisal utang usaha. Selain itu ia bebas menjalankan usaha sewajarnya.
3. Kerugian usaha sebatas modal menjadi tanggung jawab pemodal, sedangkan kerugian usaha lainnya menjadi tanggung jawab penuh pengelola.
4. Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan antara pemodal dan pengelola usaha.

Demikian penjabaran tentang Hukum Bisnis Kemitraan Kuliner dalam kajian Fiqih Islam. Semoga dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat. Semoga usaha yang direncanakan dapat sukses dan membawa keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat. Amin. ♦



ILUSTRASI

BERSUMPAAH ATAS NAMA AL QURAN APAKAH DIBENARKAN DALAM ISLAM?

Sumpah merupakan bentuk dari pembelaan seseorang, semacam tameng moral dan spiritual, bahwa apa yang diucapkannya adalah kebenaran dan bukan kebohongan.

Ketika seseorang mengucapkan sumpah, itu merupakan bentuk penguatan atas pernyataan atau ucapan yang telah diucapkannya.

Hal itu biasanya dilakukan saat ia perlu meyakinkan lawan bicaranya, bahwa apa yang diucapkannya adalah suatu kebenaran.

Dalam ajaran Islam, sumpah bisa dikatakan sah, apabila telah memenuhi beberapa syarat.

Dilansir dari NU Online, Imam Muhammad bin Qasim menjelaskan dalam Fathul Qorib, tentang syarat-sahnya sebuah sumpah: "Sumpah dihukumi sah apabila menyebut Dzat Allah Ta'ala, seperti ucapan seseorang, 'Demi Allah', atau menyebut nama-nama khusus yang hanya digunakan bagi Allah dan tidak untuk selain-Nya, seperti 'Demi Dzat yang menciptakan makhluk', atau menyebut sifat-sifat khusus yang melekat pada Dzat Allah, seperti 'Demi ilmu Allah' atau 'Demi qudrah-Nya'. Adapun yang dianggap bersumpah adalah setiap orang yang mukallaf (baligh dan berakal), tidak dalam paksaan, mampu berbicara, dan memiliki niat untuk bersumpah." (Iman Muhammad bin Qasim, Fathul Qorib Almujiib, [Lebanon: Ibnu Hazim, 2004], jilid I, hlm. 319.)

Dari penjelasan Imam Muhammad bin Qasim tersebut, dapatlah dipahami bahwa sumpah yang sah, dalam Islam wajib disandarkan kepada Allah, baik secara langsung menyebut nama-Nya secara jelas (sharih), maupun melalui sifat-sifat khusus yang hanya dimiliki oleh Allah SWT.

Namun, dalam praktiknya, dalam kejadian sehari-harinya, masyarakat Indonesia, umumnya mengucapkan sumpah dengan mengatas-namakan Al Quran, sebagai bentuk keseriusan dan penegasan bahwa dirinya tidak berbohong.

Misalnya, seseorang itu mengatakan: "Demi Al Quran, saya tidak melakukan itu," atau dalam konteks pembaiatan, "Saya bersumpah dan bersaksi atas nama Al Quran, bahwa saya akan menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai pengurus."

Meskipun Al Quran itu suci dan sebagai pedoman hidup manusia, khususnya umat Muslim, penyebutan "Al Quran" dalam sumpah atau bersumpah atas nama Al Quran tersebut, tidak merujuk pada Allah SWT sebagai pemilik kalam, melainkan lebih kepada mushaf, bentuk fisik dari Al Quran itu sendiri.

Sehingga akhirnya menimbulkan pertanyaan, apakah sumpah atas nama Al Quran dibenarkan dalam Islam? Apakah sah dan memiliki konsekuensi syar'i?

Inilah Pandangan Ulama tentang Sumpah dengan Mengatas-namakan Al Quran

Penjelasan tentang hal ini dapat ditemukan dalam kitab Al-Fiqhu 'Alal Madzahibil Arba'ah karya Syekh Abdurrahman Al-Jaziri: "Sumpah menjadi sah dengan menyebut Kalam Allah, karena ia adalah salah satu sifat Allah Ta'ala. Sumpah juga sah, apabila dilakukan dengan menyebut mushaf (Al



Quran) tanpa makruh, sebab yang dimaksud oleh orang yang bersumpah dengan mushaf adalah isi yang terkandung di dalamnya, yaitu firman Allah. Begitu pula jika bersumpah dengan menyebut Al Quran, salah satu surah, ayat, atau dengan ungkapan 'demi hak Al Quran', maka semuanya dihukumi sebagai sumpah yang sah," (Al-fiqhu 'Alal Madzahibil Arba'ah, [Lebanon, Darul Kutub Al-ilmiyah, 2003], jilid II, hlm. 70-71)

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumpah dengan menyebut nama Al Quran tetap dianggap sah, selama niat orang yang bersumpah itu adalah menyandarkannya kepada firman Allah, bukan sekadar mushaf sebagai benda fisik.

Orang yang bersumpah dengan menyebut nama Al Quran dalam konteks tersebut, akan dikenakan konsekuensi hukum

sumpah: jika ia melanggarnya, maka wajib membayar kafarat, dan jika berdusta, maka berdosa.

Kapan Sumpah Memiliki Konsekuensi?

Perlu dijelaskan bahwa tidak semua sumpah yang menyebut nama Al Quran otomatis dihukumi sah. Masih ada kriteria penting lain yang perlu diperhatikan.

Hal ini dijelaskan oleh Asy-Syekh Ibrahim al-Bajuri dalam Hasyiyatul Baijuri: "Ucapan seseorang seperti 'Demi Kitab Allah', 'Demi Al Quran', atau 'Demi Mushaf' dihukumi sebagai sumpah, selama maksudnya merujuk pada sifat qadim Allah (yakni kalam Allah sebagai salah satu sifat-Nya), bukan sekadar Al Quran sebagai tulisan, bacaan, atau mushaf (benda fisik yang terdiri dari kertas dan sampul). Jika niatnya bukan kepada sifat Allah, maka sumpah itu tidak sah." (Al-Bajuri, Hasy-

iatul Bajuri, [Arab Saudi, Darul Minhaj, 2016], jilid IV, hlm. 426)

Seseorang yang bersumpah dengan menyebut Al Quran baru dianggap bersumpah secara syar'i, jika niatnya tertuju pada kalam Allah sebagai salah satu sifat-Nya. Jika yang dimaksud hanya bentuk fisik mushaf, tulisan, atau bacaan, maka sumpah itu tidak sah.

Namun jika niatnya benar, menyandarkannya kepada sifat Allah, maka sumpah tersebut sah dan membawa konsekuensi hukum kafarat jika dilanggar, serta dosa, jika berbohong dalam sumpahnya.

Maka dari itu, penting bagi setiap Muslim untuk memahami makna dan hukum di balik sumpah, agar tidak sembarangan mengucapkan sumpah, apalagi ketika melibatkan hal-hal yang sakral seperti Al Quran. Wallahu 'alam. ♦





TAZUKE NURIYAKI ALIAS ZAKI SAN TERPIKAT ISLAM DI BANDUNG, KINI KONSISTEN DAKWAH DI JEPANG

Tazuke Nuriyaki, yang lebih dikenal dengan sapaan Zaki San, adalah Ketua Mualaf Center di Jepang. Perjalanan spiritualnya menuju Islam dimulai saat ia bekerja di sebuah perusahaan peternakan di Bandung, Indonesia, yang berafiliasi dengan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Di sana, ia terkesan dengan kegigihan umat Muslim dalam menjalankan agama mereka. Pengalaman ini menjadi motivasi utama Zaki untuk memeluk Islam, sebuah keputusan yang kemudian membawanya untuk lebih terlibat dalam komunitas Muslim, baik di Indonesia maupun Jepang.

Setelah memutuskan untuk memeluk Islam, Zaki mengalami proses adaptasi yang intensif, baik dalam kehidupan pribadinya maupun dalam organisasi yang diikutinya. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi tempat yang ideal baginya untuk belajar dan memahami lebih lanjut tentang budaya dan praktik Islam.

Pengalaman ini memperkuat keinginannya untuk aktif dalam kegiatan keaga-

maan dan memperkenalkan Islam kepada komunitas Jepang, yang menjadi tujuan utama keterlibatannya di Mualaf Center.

Di bawah kepemimpinannya, Mualaf Center di Jepang telah menyelenggarakan berbagai program pembelajaran, baik di Jepang secara umum maupun di Masjid Nusantara. Program-program ini dirancang untuk membantu para mualaf memahami ajaran Islam sekaligus memberikan dukungan moral dan spiritual. Meskipun jumlah mualaf di Jepang masih relatif kecil, Zaki dan timnya terus berupaya memperluas jangkauan dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan keagamaan.

Zaki menyadari bahwa banyak mualaf di Jepang menikah dengan pasangan Muslim. Oleh karena itu, salah satu fokus Mualaf Center adalah menyediakan forum

pembelajaran yang dapat membantu para mualaf memahami Islam lebih dalam, tidak hanya sebagai syarat pernikahan, tetapi juga sebagai iman yang sejati.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan mereka untuk memeluk Islam didasarkan pada pemahaman dan keyakinan pribadi, bukan semata-mata karena alasan eksternal.

"Kami adalah peserta KKN Internasional Jepang 2024, yang terdiri dari Anis Nur Safarina Zaenudin, Annisa Dzakiah, Ghany Fitriamara, Rafifa Naila Putri, dan Yulia Rahma. Kami di sini untuk mengetahui kecenderungan perkembangan Muslim di Jepang, oleh karena itu kami mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan wawancara di Mualaf Center Jepang. Hal ini merupakan pengalaman

yang sangat berharga dalam memahami peran Islam di negeri Sakura dan mengeksplorasi lebih jauh perjalanan spiritual para mualaf di sana,” katanya.

Tantangan Terbesar Atasi Stigma

Zaki San, mengungkap bahwa interaksi sosial dengan komunitas Muslim lainnya juga merupakan bagian penting dari kegiatan Mualaf Center. Ia telah membangun hubungan dengan beberapa masjid di Jepang, seperti Masjid Pakistan dan Bangladesh, dan terus berupaya memperluas jaringannya di luar komunitas Masjid Nusantara Indonesia.

Interaksi ini diharapkan dapat menciptakan komunitas yang lebih inklusif dan mendukung para mualaf dalam perjalanan spiritual mereka.

Meskipun Zaki memiliki banyak hubungan yang telah dibangun di Indonesia, terutama dengan NU, ia tidak luput dari

tantangan dan rintangan setelah memeluk Islam. Salah satu tantangan terbesarnya adalah mengatasi stigma dan keraguan

dari lingkungannya, terutama karena ketakutan akan terorisme yang sering dikaitkan dengan Islam.

Namun, seiring berjalannya waktu, Zaki berhasil membuktikan bahwa Islam adalah agama yang damai, dan ia dengan tekun terus membangun hubungan yang harmonis dengan keluarga dan komunitasnya.

Dalam praktik keagamaannya, Zaki San senantiasa menjaga kedisiplinan dalam beribadah, termasuk salat tepat waktu, mengaji, salat Jumat, dan berbagai kegiatan Mualaf Center lainnya. Ia juga memiliki harapan besar untuk masa depan Mualaf Center, dengan fokus membina para mualaf agar benar-benar memahami Islam.

Zaki juga terus menghadapi tantangan sehari-hari, seperti kesulitan menemukan makanan halal, tetapi ia tetap teguh dalam keyakinannya dan berupaya menciptakan lingkungan yang suportif bagi komunitas Muslim di Jepang. ♦ros



Kami adalah peserta KKN Internasional Jepang 2024, yang terdiri dari Anis Nur Safarina Zaenudin, Annisa Dzakiah, Ghany Fitriamara, Rafifa Naila Putri, dan Yulia Rahma .



Ginno Albert E Rey SE MTh

PENDETA SENIOR YANG BIKIN GEMPAR KARENA PUTUSKAN MUALAF

Keputusan Pendeta Ginno Albert E. Rey, S.E., M.Th untuk mualaf dan mengucapkan Syahadat dibimbing Pemimpin Yayasan Pembina Attauhid Dondy Tan pertengahan 2023 mengejutkan banyak pihak. Terutama karena ia merupakan salah satu pendeta senior dalam sinode gereja Kristen Protestan di Indonesia yakni Gereja Bethel Indonesia (GBI). Kedua, ia berasal dari keluarga besar Kristen yang taat.

Kisah mualaf mantan Pendeta Ginno Albert E Rey, SE, M.Th ini terungkap dari video berdurasi kurang lebih satu jam delapan menit, yang diupload pada 15 Juli 2023 di kanal Youtube @Dondy Tan. Tayangan video itu antara lain berisi tentang Injil yang dikaitkan dengan ajaran Islam antara Ginno Albert dengan Dondy. Hingga pada akhirnya Ginno Albert secara resmi masuk Islam, usai mengucapkan Dua Kalimat Syahadat yang dipandu oleh Dondy Tan.

Video ini viral dan direpost oleh banyak akun di berbagai platform media sosial terutama Facebook dan Instagram. Berbagai tayangan video itu selalu dibanjiri

komentar pro dan kontra para netizen. Komentar-komentar sengit pun tak terelakkan di antara para warga net.

Kembali ke video di Kanal YouTube@DondyTan, barulah setelah Ginno Albert resmi masuk Islam ini, sang Host bertanya. Dondy Tan menanyakan, mengapa seseorang yang sebelumnya pernah menjadi pendeta memutuskan untuk memeluk ajaran Islam.

Ginno Albert sendiri menjelaskan bahwa dirinya berasal dari keluarga pendeta yang taat. Sebelum menjadi pendeta, ia sempat bekerja di perbankan selama beberapa tahun setelah lulus dari kuliah. Ia pun memperdalam ilmunya di bidang agama dengan kuliah S2 dan mendapat

gelar M.Th.

Seiring berjalannya waktu, Ginno pada akhirnya memutuskan untuk menjadi pembantu pendeta di tahun 2006. Sejak saat itu, ia yang sebelumnya di Medan memilih untuk ke Jakarta. Ginno kemudian menceritakan bagaimana awal mula dirinya tertarik pada ajaran Islam. Bahwa sebagai pendeta mendekati tahun 2020, dirinya kerap mengikuti berbagai kanal Youtube yang mengaitkan ajaran Kristiani dengan Islam.

Dari situlah, ia mulai merasa bahwa Agama Islam adalah ajaran yang harus dia ikuti hingga pada akhirnya mulai memutuskan mempelajari Islam sejak tahun 2020-an awal.



Dibimbing oleh Muslimah Taat Beragama

Ginno Albert E Rey yang masih menyangand amanah sebagai pendeta tentu tidak gampang untuk belajar Agama Islam. Karena itu ia sempat mengalami ke-buntuan karena tidak ada sosok yang bisa membimbingnya untuk menjadi mualaf yang beriman secara benar.

Namun rintangan itu tidak membuat Ginno Albert menyurutkan niatnya untuk belajar dan masuk Agama Islam. Ia pun terus berdoa supaya bisa memudahkan jalannya untuk masuk Agama Islam. Doa

yang ia langitkan dengan penuh harap dan kesungguhan itu, tak berselang lama diijabah Allah SWT.

Dalam pencariannya belajar Agama Islam, Ginno Albert pada suatu hari bertemu dengan seorang Muslimah yang taat. Muslimah ini yang sejak pertemuan pertama itu terus membimbingnya untuk menjadi mualaf. Tidak sampai di situ saja. Setelah Ginno beragama Islam, ia pun akhirnya menikah dengan Muslimah yang jadi mentornya itu.

Saat para netizen meributkan mualafn-

Profil Singkat Dondy Tan

- **Latar belakang:** Ia adalah seorang pria keturunan Tionghoa yang lahir di Melbourne, Australia, dan menjadi mualaf pada tahun 2014.
- **Aktivitas:** Aktif di media sosial melalui video, podcast, dan debat antaragama untuk menyebarkan informasi dan edukasi tentang Islam.
- **Fokus:** Sering membahas perbandingan kitab suci agama Kristen dengan Al-Qur'an, serta mengajarkan mualaf cara menjalankan ajaran Islam.

Aktivitas yayasan Dondy Tan

- **Tujuan:** Melindungi akidah umat Islam dari pendangkalan akidah dan pemurtadan, serta melakukan "perang pemikiran" dengan cara yang diajarkan Al-Qur'an, tanpa menghina agama lain.
- **Bantuan untuk mualaf:**
- **Gratis sunat dan bantuan hukum.**
- **Guru privat yang datang ke rumah untuk mengajari mengaji dan salat.**
- **Program belajar membaca Al-Qur'an selama 3 bulan.**
- **Misi:** Mendorong mualaf untuk menjalankan Islam dan berdakwah, serta menyebarkan literasi melalui buku-buku

ya Ginno Albert, tidak demikian dengan keluarga besarnya yang merupakan umat Kristiani yang taat itu. Ginno Albert merasa bahwa keputusannya untuk masuk Islam ini tidak terlalu diambil pusing oleh pihak keluarganya. Sebab menurut mereka, pilihan untuk beragama itu adalah keputusan masing-masing.

Di akhir perbincangan mereka, Dondy Tan menyatakan dirinya bersyukur atas masuknya Islam sang mantan pendeta Ginno Albert E Rey. Ia mengucapkan selamat kepada saudara seimannya yang baru itu.

Dondy Tan sendiri merupakan mualaf yang mendirikan dua yayasan yang bergerak dalam pembinaan mualaf dan dakwah, yaitu Yayasan Pembina Mualaf Attauhidi di Surabaya dan Yayasan Garda Mualaf Indonesia di Jakarta. Kedua yayasan tersebut bertujuan melindungi akidah Islam dan membantu mualaf baru melalui program-program seperti bantuan sunat, guru privat mengaji, bantuan hukum, dan program belajar Al-Qur'an selama 3 bulan. ♦ros



Benarkah Mata Kedutan Pertanda Buruk? **KETAHULAH, INI PENYEBAB DAN CARA MENGHILANGKANNYA**

Mata Kedutan! Setiap orang pasti pernah mengalaminya kan? Sebetulnya, mata kedutan merupakan hal yang memang sering terjadi dalam keseharian setiap orang. Lumrah, dan biasa saja sebetulnya. Hanya saja, mitos yang hidup di masyarakat di seluruh penjuru Indonesia cukup meresahkan sebagian orang. Karena sebagian masyarakat meyakini, mata kedutan merupakan isyarat akan terjadi sesuatu pada orang yang matanya kedutan itu.

Ada mitos bahwa jika mata kanan yang kedutan, maka orang tersebut akan ketiban nasib baik. Tapi jika mata kiri yang kedutan, maka orang itu akan menangis—karena tertimpa hal-hal yang tak diinginkannya, yaitu musibah. Seram sekali kan?

Mengapa mitos sedemikian harus dipercaya? Mata kedutan tidak ada hubungannya dengan nasib. Mata kedutan justru mengindikasikan tubuh seseorang sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Memang umumnya tidak begitu berbahaya. Akan tetapi kita harus mewaspadainya. Untuk itu, dr Valda Garcia dari Klikdokter.com memberikan penjelasan tentang Mata Kedutan, mulai dari penyebab hingga cara menyembuhkannya.

Penyebab Mata Kedutan

Diuraikan dr Valda Garcia, Mata Kedutan dalam dunia kedokteran dikenal seba-

gai myokymia, merupakan kondisi ketika kelopak mata bergerak sendiri tanpa disadari dan berulang-ulang.

Umumnya, mata berkedut tidak mengkhawatirkan karena hanya terjadi sesekali dan berlangsung selama beberapa detik hingga menit saja. Kedutan pada mata juga biasanya tidak menyebabkan sakit dan dapat berhenti dengan sendirinya.

Namun, Anda perlu waspada ketika kedutan mata berlangsung lama, bahkan hingga berbulan-bulan. Di balik mitos yang beredar mengenai mata berkedut, penyebab mata kedutan terus ternyata beragam dari sisi medis.

Berikut ini beberapa penyebab dari mata kedutan yang perlu Anda ketahui:

1. Stres

Ketika stres, tubuh akan menimbulkan reaksi pada organ tertentu, salah satunya kedutan pada mata. Kedutan mata ini tidak

ada yang spesifik sebelah kiri atau kanan, sehingga kedutan mata kiri atas ataupun kedutan mata kanan atas bisa terjadi karena stres. Selain mata kedutan, stres juga sering menyebabkan mata lelah.

Untuk menghindari stres, cobalah melakukan hal-hal yang membuat Anda rileks, seperti melakukan hobi, menghabiskan waktu dengan teman dan keluarga, atau berlibur ke tempat yang belum pernah Anda kunjungi.

2. Mata Lelah

Gangguan penglihatan (misalnya mata minus atau plus) dapat menyebabkan mata Anda bekerja terlalu “berat”. Akibatnya, Anda dapat mengalami mata kedutan.

3. Penggunaan Gawai Berlebih

Selain itu, mata lelah juga bisa disebabkan oleh penggunaan komputer atau ga-



wai berlebihan sehingga dapat menjadi penyebab mata kedutan. Untuk menguranginya, cobalah istirahatkan mata Anda setiap 20 menit.

Artikel Lainnya: Tanda-Tanda Anda Harus Memeriksa Mata di Dokter

4. Konsumsi Asupan Berkafein

Terlalu banyak mengonsumsi minuman atau makanan yang mengandung kafein dapat menimbulkan kedutan pada mata.

Untuk itu, cobalah membatasi atau menghindari konsumsi kopi, teh, cokelat, dan minuman bersoda. Lihat perubahannya dalam 1-2 minggu.

5. Konsumsi Minuman Beralkohol

Selain asupan berkafein, minuman beralkohol juga bisa menjadi penyebab mata kedutan. Bisa dilakukan evaluasi terlebih dahulu dengan menghindari minuman beralkohol, apakah keluhan kedutan pada mata berkurang atau tidak.

6. Mata Kering

Mata yang kering dapat menjadi penyebab mata kedutan. Mata kering sering dialami oleh orang yang sering menggunakan komputer, berusia di atas 50 tahun, dan minum minuman berkafein atau alkohol.

Selain itu, jika Anda lelah atau stres juga bisa meningkatkan risiko mata kering.

7. Konsumsi Obat Tertentu

Memang tidak berkaitan secara langsung. Namun, riwayat mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti antihistamin, anti-depresan, dsb dapat memicu mata kering dan menyebabkan mata berkedut.

8. Lensa Kontak

Sama halnya dengan konsumsi obat, penggunaan lensa kontak juga mungkin tidak menyebabkan keluhan mata berkedut secara langsung.

Meski begitu, efek samping berupa mata kering karena penggunaan lensa kontak dapat meningkatkan risiko keluhan mata berkedut.

Artikel Lainnya: Pentingnya Pemeriksaan Mata secara Rutin

9. Alergi

Seseorang yang memiliki alergi mata biasanya mengalami gatal pada mata, bengkak, mata berair, dan berkedut. Histamin yang dikeluarkan saat kondisi alergi dapat memicu timbulnya kedutan pada mata.

Jika Anda memiliki riwayat alergi tertentu seperti debu, bahan kimia tertentu, bulu

binatang, sebaiknya gunakan pelindung mata sebelum terpapar.

10. Gangguan Nutrisi

Beberapa studi menemukan bahwa kekurangan zat gizi tertentu, seperti magnesium, dapat menjadi penyebab mata kedutan. Untuk itu, pastikan Anda men-



onsumsi makanan yang bergizi seimbang.

Makanan yang tinggi magnesium bisa

- Istirahat cukup
 - Bila perlu, teteskan cairan pengganti air mata (artificial tears) untuk memastikan mata tidak kering
 - Obati infeksi mata bila mata merah
 - Kurangi konsumsi kafein, soda, minuman berenergi dan alkohol
- Artikel Lainnya: Mengenal Teknik 20-20-20 untuk Mencegah Mata Lelah
Kapan Harus ke Dokter?

Pada umumnya, kedutan mata kiri atas ataupun kedutan mata kanan atas bukanlah kondisi serius selama Anda mengalaminya di satu sisi, tidak disertai rasa sakit, dan berlangsung sebentar. Beberapa faktor pemicunya sudah disebutkan di atas.

Bagi sebagian orang gejalanya hanya sebatas kedutan biasa, sementara yang lain kedutan bisa dirasa berat. Selain berlangsung selama beberapa minggu, kedutan ini bisa menyebabkan mata tertutup sendiri.

Salah satu gangguan kesehatan yang terkait dengan mata kedutan adalah benign essential blepharospasm. Ini merupakan kelainan saraf yang menyebabkan spasme dan kontraksi otot di sekitar mata. Jika kondisi ini dibiarkan, dapat terjadi perburukan.



diperoleh dari sayuran hijau seperti bayam, kangkung, dan sebagainya.

Cara Mengatasi Mata Kedutan

Bila mengalami kedutan mata kanan atas ataupun mata sebelah kiri, Anda dapat mengikuti cara mengatasi mata kedutan di bawah ini:

- Memejamkan kelopak mata
- Mengistirahatkan penglihatan sejenak, misalnya mematikan layar komputer/gawai
- Kompres air hangat di kelopak mata
- Berhenti merokok

Jadi, tetaplah waspada, terutama bila mata Anda mengalami kedutan selama lebih dari seminggu. Pada kasus yang berat ini, dibutuhkan tindakan khusus seperti injeksi botoks, tindakan operasi, ataupun deep brain stimulation.

Selain itu, segera konsultasi dengan dokter jika mata kedutan disertai oleh mata merah, mata bengkak, kelopak mata atas turun, kelopak mata benar-benar menutup setiap kali berkedut, dan kedutan terjadi selama beberapa minggu. ♦ros

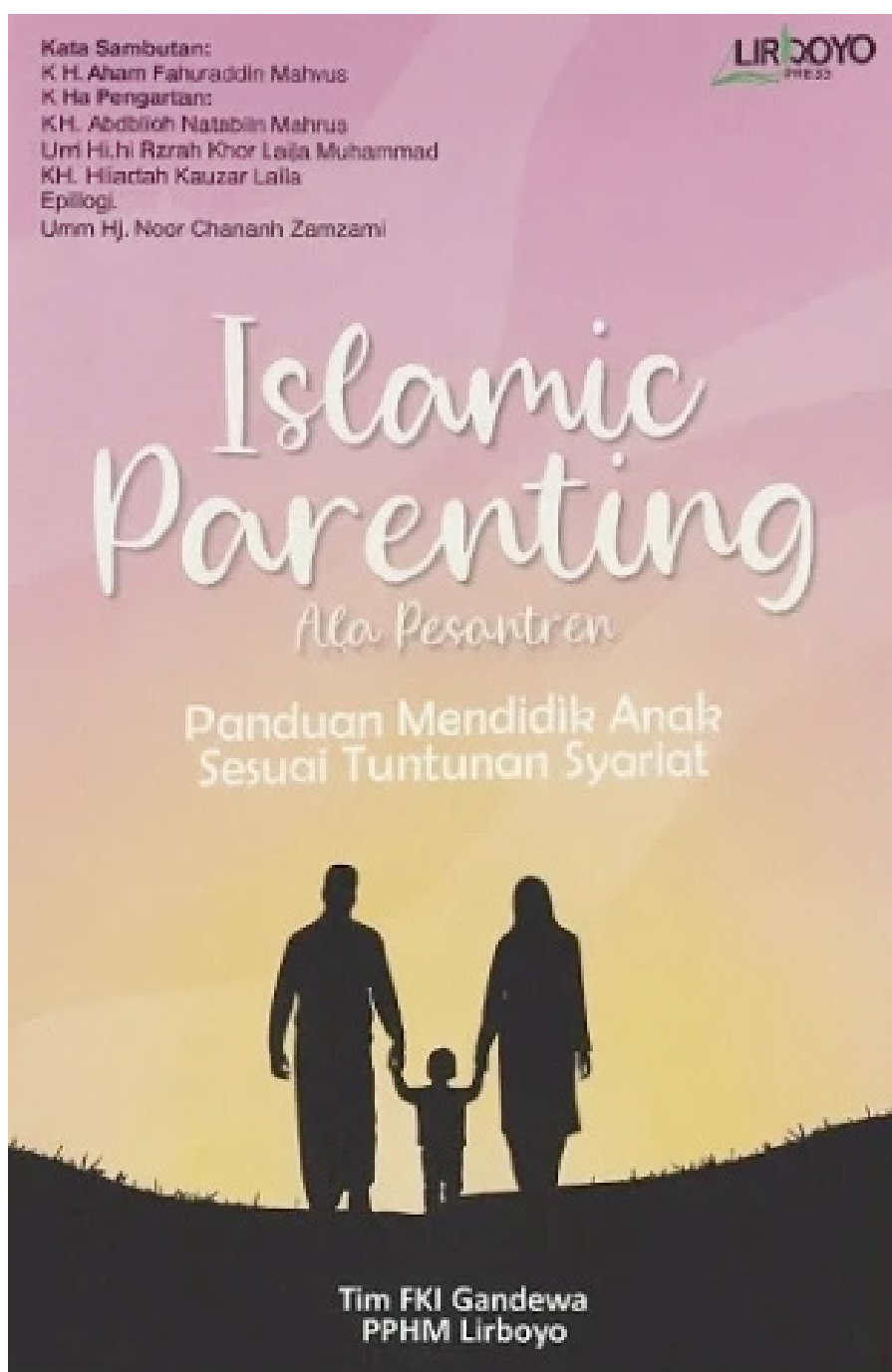
TUNTUNAN BAGI ORANGTUA, PERSIAPAN KAUM MUDA UNTUK JADI AYAH DAN BUNDA

Tuntunan bagi Orangtua, Persiapan Kaum Muda untuk Jadi Ayah dan Bunda

Gendewa PPHM Lirboyoyo menghadirkan buku "Islamic Parenting Ala Pesantren: Panduan Mendidik Anak Sesuai Tuntunan Syariat" sebagai panduan bagi para orangtua dalam mendidik anak dengan pendekatan yang berlandaskan ajaran Islam. Buku ini tidak hanya memuat langkah-langkah praktis dalam

mendidik anak, tetapi juga mengajak pembaca untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Buku Islamic Parenting Ala Pesantren Setidaknya sangat relate dengan kehidupan di era sekarang, terutama bagi kaum muda yang masih berstatus lajang. Tapi juga penting bagi orang-orang yang sudah menyandang status orangtua (Ayah dan Ibu). Karena buku ini memberikan pedoman untuk tiga hal besar yang disa-



JUDUL:

ISLAMIC PARENTING ALA

PESANTREN: PANDUAN MENDIDIK

ANAK SESUAI TUNTUNAN SYARIAT

PENULIS: TIM FKI GENDEWA PPHM

LIRBOYO

PENERBIT:

LIRBOYO PRESS KOTA

TERBIT:

KEDIRI TAHUN TERBIT:

CETAKAN KE-II, MARET 2025 M

TEBAL:

XLVI + 252 HALAMAN I

SBN:

978-634-7163-02-8

jikan dalam topik:

- * Pertama, pernikahan sebagai jembatan kehidupan yang menekankan pentingnya memiliki keturunan.
- * Kedua, tahap perawatan anak, mulai dari masa kehamilan hingga kelahiran.
- * Ketiga, berbagai jenis pendidikan yang dapat diberikan kepada buah hati.

Dalam topik-topik itu dihadirkan berbagai bahasan menarik, termasuk pembahasan tentang etika hubungan intim sesuai syariat, demi memastikan anak lahir mendapatkan perlindungan dan menjadi pribadi berbakti.

Pun diajarkan bagaimana mempersiapkan Generasi Emas, yang perawatannya dilakukan sejak dalam kandungan sampai kelahiran. Dijelaskan bahwa pendidikan anak dimulai dengan stimulasi positif, sebab bayi belum bisa menerima pendidikan secara langsung. Di bagian ini, pembaca disajikan metode stimulasi yang bisa diberikan orangtua, panduan lengkap tentang apa yang wajib dilakukan dan dihindari selama proses kehamilan, hingga saat melahirkan. Selain itu, dilampirkan juga kumpulan doa yang baik dibaca pada periode ini.

Kesimpulan, buku ini penting dibaca oleh para orangtua agar paham cara mendidik anak-anak sesuai ajaran Agama Islam. Buku ini juga penting dibaca kaum remaja atau mereka yang belum menikah, guna mempersiapkan diri untuk menjadi orangtua yang dapat mendidik anak-anak mereka dengan cara yang diridhai Allah SWT. ♦ros



IKLAN 1 HALAMAN FC
Rp50.000.000



IKLAN BACK COVER FC
Rp75.000.000



IKLAN 1/2 HALAMAN FC
Rp25.000.000

Media yang Tepat Untuk Promosi Usaha Anda

MOESLIM CHOICE

- ADVERTORIAL/INFORIAL (FC)
- IKLAN 1/2 CENTERSPEAD (FC)
- IKLAN 1/2 FACING PAGES (FC)
- IKLAN 1/2 HALAMAN (FC),
- IKLAN ADVERTORIA L/INFORIAL (FC)
- IKLAN CENTERSPREAD (FC), DILUAR EDISI KHUSUS
- IKLAN COVER 2 (FC)
- IKLAN COVER 3 (FC)
- IKLAN COVER 4 (FC) 1 HALAMAN
- IKLAN DISPLAY (FC), 1 HALAMAN
- IKLAN HALAMAN 13, 15 & 17 (FC) 1 HALAMAN
- IKLAN HALAMAN 3 (FC) 1 HALAMAN
- IKLAN HALAMAN 5 (FC) 1 HALAMAN

MANFAAT PLUS BERIKLAN DI MAJALAH MOESLIM CHOICE

- Lebih Akurat dengan Target Pesan Iklan Sesuai dengan Topik Bahasan
- Pilihan Halaman Iklan yang mudah disimak Pembaca
- Harga Iklan Bertabur Diskon



IKLAN CENTER SPREAD FC
Rp80.000.000



CONTACT PERSON: NIKEN

021 - 791 96 781
0896 4369 4121

Email: moeslimchoice@gmail.com



KISAH HAKIM YANG MENGUNDURKAN DIRI KARENA MENOLAK SUAP

Pada Zaman dahulu, diki-sahkan, Afyah Al-Qadhi diangkat oleh Khalifah Al-Mahdi untuk menjadi qadhi atau hakim di salah satu daerah yang ada di pinggiran kota Madinatus Salam (Baghdad).

Selain alim, Afyah juga dikenal sebagai sosok ulama yang zuhud. Pada suatu hari, Afyah pergi menemui Khalifah Al-Mahdi di istananya. Tujuan kedatangannya adalah untuk menyampaikan sesuatu yang dianggap sangat penting.

Afyah merasa tidak sanggup lagi mengemban amanah sebagai hakim karena takut tidak bisa berbuat adil. Setelah diizinkan masuk, Afyah yang membawa sebuah tas besar yang berisi sejumlah dokumen kemudian menemui Khalifah Al-Mahdi, yang kebetulan sedang ada waktu luang.

Dalam pertemuan tersebut, Afyah langsung menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu untuk mengajukan pengunduran dirinya sebagai hakim. Tas yang berisi dokumen itu kemudian diserahkan kepada Khalifah Al-Mahdi untuk kemudian diserahkan kepada hakim baru yang akan ditunjuk.

Merasa keputusan Afyah itu mendadak, Khalifah Al-Mahdi kemudian meminta penjelasan pada Afyah. Diduga ada pihak yang melakukan intervensi pada Afyah sampai ia mengajukan pengunduran diri. Afyah pun kemudian meyakinkan khalifah bahwa pengunduran dirinya itu memang atas keinginan sendiri.

"Lalu apa sebenarnya yang terjadi hingga membuatmu mengundurkan diri dari hakim?" tanya Khalifah Al-Mahdi sebagaimana tertulis dalam kitab 'Uyunul Hikayat. (Ibnu Jauzi, 'Uyunul Hikayat, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah: 2019], halaman 273-274)

Afyah pun kemudian menjawab bahwa sekitar dua (2) bulan yang lalu ada kasus sengketa yang melibatkan dua (2) orang kaya terhormat. Afyah menilai, kasus ini cukup rumit, sehingga perlu menelaah secara cermat dan hati-hati atas bukti dan saksi dari masing-masing pihak.

"Saya kemudian meminta mereka berdua agar pulang dulu, berharap keduanya bisa berdamai dan menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan. Harapan lainnya, saya bisa membuat keputusan hukum yang tepat," ungkap Afyah menjelaskan.

Afyah kemudian melanjutkan, terny-

ata, salah satu dari pihak yang bersengketa tersebut, mengetahui bahwa Afyah sangat menyukai kurma sukkar.

"Dia kemudian membawa kurma sukkar terbaik ke rumahku, belum pernah aku melihat kurma sukkar sebegitu itu. Engkau juga mungkin belum pernah melihat kurma terbaik itu," kata Afyah pada Khalifah Al-Mahdi.

Afyah kemudian menjelaskan, salah satu pihak yang bersengketa ini berhasil masuk ke rumahnya dengan cara menyuap sejumlah uang kepada penjaga rumahnya.

"Ketika penjaga rumah masuk membawa nampan berisi kurma itu. Aku langsung marah, mengusir dan menyuruh



dia mengembalikan kurma itu,” ungkap Afiyah menjelaskan.

Hari ini, Afiyah melanjutkan, mereka berdua (yang bersengketa) lalu menemuinya di persidangan untuk melanjutkan kasus yang sebelumnya ditunda.

“Aku sudah tidak bisa melihat mereka dengan sejajar, mereka berdua sudah tidak setara lagi dalam pandangan dan hatiku,” katanya mengungkapkan.

“Padahal sebelumnya, aku sudah menolak dengan tegas kurma itu. Bagaimana jadinya jika saat itu, aku menerima pemberiannya? Aku tidak mau celaka dan mengambil risiko atas agamaku,” ujar Afiyah tegas.

Setelah mendengar penjelasan Afiyah, akhirnya Khalifah Al-Mahdi menerima pengunduran diri Afiyah.

Hikmah yang bisa dipetik dari kisah ini adalah bahwa seorang hakim, harus mempunyai prinsip dan integritas. Hal ini bertujuan, agar supremasi hukum bisa berdiri dengan tegak dan penegak hukum tidak mudah terombang-ambing

oleh pihak-pihak yang mencoba memainkan hukum.

Hakim Ideal Menurut Rasulullah SAW
Hakim bukanlah profesi yang mudah, sebab memiliki tanggung jawab di setiap putusan yang dikeluarkan. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang hakim harus memiliki kriteria dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Rasulullah SAW pun membagi seorang hakim menjadi tiga macam: “Hakim itu ada tiga: dua di neraka dan satu di surga. Hakim yang memutuskan hukum dengan tidak benar, sedangkan ia mengetahuinya, maka ia di neraka. Hakim yang tidak mengetahui kebenaran (jahil), sehingga ia menghilangkan hak orang lain, maka ia pun di neraka. Hakim yang memutuskan hukum dengan kebenaran, maka ia di surga”. (HR. At-Tirmidzi).

Dilansir dari NU Online, Al-Munawi menjelaskan, ancaman yang terdapat dalam hadits di atas, memperingatkan setiap orang yang berprofesi sebagai hakim agar berlaku adil, bekerja semak-

simal mungkin dan berusaha mencapai kesempurnaan dalam memutuskan sesuatu.

Sementara itu, Adz-Dzahabi menambahkan, bahwa orang yang memutuskan suatu perkara, padahal ia tidak begitu memahaminya, bahkan tidak mengetahui ilmunya, maka masuk ke dalam ancaman dalam hadits tersebut.

“Setiap orang yang memutuskan perkara tanpa ilmu, atau bukti yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya, maka dia termasuk kepada golongan yang diancam.” (Al-Munawi, Faydhul Qadir, jilid XIII, hal. 15).

Rasulullah SAW mewanti-wanti umatnya, yang menjadi seorang hakim, bahwa profesi tersebut bukan sembarang profesi. Beliau menggambarkan seseorang yang menjadi hakim seolah dibunuh tanpa menggunakan pisau.

Beliau bersabda: “Siapapun yang diberi jabatan hakim atau diberi kewenangan untuk memutuskan hukum di antara manusia, sungguh ia telah dibunuh tanpa menggunakan pisau.” (HR At-Tirmidzi). ♦



MABIMS, SELAT MELAKA DAN SEJARAH MELAYU



OLEH: M FUAD

Pertemuan Tahunan Tidak Resmi Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) ke-21 tahun 2025 di Melaka Malaysia telah berlangsung dengan sukses dan berkesan di hati para peserta. Pertemuan penting itu didahului dengan agenda SOM MABIMS (Senior Officials Meeting) ke-49, Mesyuarat Jawatan Kuasa Teknikal Halal MABIMS, Halal Summit, dan menampilkan Pavilion empat negara di MITC (Melaka International Trade Centre), dari tanggal 15 sampai dengan 19 Oktober 2025.

Menteri Agama Republik Indonesia Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, MA yang hadir pada pertemuan puncak MABIMS, Minggu 19 Oktober 2025, menyampaikan usulan yang membanggakan dan disepakati seluruh peserta mesyuarat ialah menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat peradaban Islam masa depan. Menurut Nasaruddin Umar, Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura memiliki potensi besar untuk membangun sinergi keilmuan dan peradaban. Asia Tenggara berpotensi menjadi pusat peradaban Islam dunia. Kita perlu memiliki obsesi dan

misi untuk membangun martabat Islam bukan hanya lewat politik dan ekonomi, tetapi juga melalui ilmu pengetahuan dan integrasi peradaban, seperti halnya Bagdad pada masa kejayaan Islam.

Gagasan dan dorongan agar Asia Tenggara menjadi pusat peradaban Islam Dunia perlu diterjemahkan lebih lanjut dengan konsep dan policy brief yang matang, termasuk sarannya. Peran masjid, pesantren dan perguruan tinggi Islam, ekonomi syariah, ekonomi halal, harus lebih memberi sentuhan terhadap misi mewujudkan pusat peradaban Islam yang mencerdaskan dan mensejahterakan umat dan bangsa.

Forum pertemuan atau mesyuarat MABIMS tahun 2025 mengusung tema "MABIMS Memperkukuh Ummah Madani Serantau Menuju Al-Falah" yang dirangkaikan dengan Melaka International Halal Festival.

Suatu kehormatan bagi saya mendapat penugasan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, untuk mengikuti kegiatan MABIMS, sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia pada sesi Mesyuarat Jawatan Kuasa Teknikal Halal MABIMS 2025 di kota yang bersejarah. Keistimewaan yang langka, kota tempat penyelenggaraan pertemuan MABIMS memiliki nilai sejarah yang patut diingat supaya tidak terputus antargenerasi.

Dr. Mohamad Kori bin Jusoh selaku Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia/Timbalan Ketua SOM Malaysia dalam ucapan pembukaan Mesyuarat Jawatan Kuasa Teknikal Halal MABIMS tanggal 17 Oktober 2025 di Ames Hotel mengatakan pemilihan Melaka sebagai lokasi penganjuran adalah amanat bermakna, sebuah bandar raya yang sarat dengan warisan sejarah, pusat perdagangan maritim Nusantara, dan lambang ketamadunan Islam yang gemilang di rantau ini. Melaka bukan sekadar destinasi pelancongan, tetapi simbol kepada kekuatan ukhuwah islamiyah dan semangat perniagaan halal yang telah lama wujud di Nusantara.

Melayu Sepanjang Abad

Melaka dan Aceh merupakan dua daerah penting dalam peta perkembangan Islam periode awal di Asia Tenggara. Seminar Antar Bangsa tentang Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Kepulauan Nusantara yang berlangsung di Aceh pada akhir September 1980 mengambil kesimpulan bahwa Islam pada tahun 173 H atau abad IX M hijriyah telah masuk ke Nusantara lewat Selat Melaka dan mendarat di Tanah Aceh, dari Tanah Aceh, Islam berkembang ke se-

luruh Nusantara.

Islam datang ke Kepulauan Nusantara membawa kecerdasan dan tamaddun (peradaban). Agama ini disiarkan dengan damai, bukan dengan jalan kekerasan. Syed Muhammad Naquib Al-Attas, seorang cendekiawan Muslim Melayu berpendapat bahwa Islam sudah masuk ke bumi Melayu pada abad VII dari Jazirah Arab. Hal itu didukung letak geografis semenanjung yang sangat strategis pada lintas jalur perdagangan Arab-Cina.

Dalam buku *Jejak Islam Di Nusantara* (Adi Teruna Effendi dkk, 2019) diungkapkan sejak abad pertama hijriyah kawasan laut Asia Tenggara khususnya Selat Melaka memiliki kedudukan yang sangat penting, terutama sebagai rute perdagangan internasional yang menghubungkan negeri-negeri di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Barat. Jalur maritim abad VII hingga XIII Masehi terbentang dari Teluk Persia hingga ke Cina melalui Selat Melaka.

Kota Melaka yang saya saksikan beberapa hari, merupakan negara bagian Malaysia yang maju, teratur, bersih, modern dan indah di berbagai sudut kota. Di jalan raya pandangan mata saya tertuju pada bangunan Mahkota Medical Centre dan Melaka Hospital, rumah sakit yang jadi pilihan sebagian warga Indonesia terutama dari Sumatera berobat ke sana karena kualitas pelayanan medis yang nyaman, di samping rumah sakit terbaik di dalam negeri.

Ketika singgah ke Muzium Sejarah dan Etnografi, lokasinya tidak jauh dari Bukit Melaka, di taman belakangnya terdapat monumen patung Laksamana Cheng Ho, seorang muslim, utusan dari Kaisar Cheng Tsu. Ia berlayar dari Tiongkok tahun 1405 dan singgah di Melaka menyerahkannya kepada Kaisar Tiongkok (Cina) kepada Sultan Melaka. Museum bangunan tua di atas bukit tersebut menampilkan diorama penyerahan kuasa dari Portugis kepada Belanda dan tonggak-tonggak kesejarahan lainnya yang perlu dikenang sebagai pelajaran bagi generasi masa kini. Melaka memiliki sosok kepahlawanan legendaris yang bijaksana dan gagah berani yaitu Hang Tuah dan Hang Jebat.

Untuk pertama kali Jumat 17 Oktober 2025 petang hari saya menginjakkan kaki di bangunan replika Istana Kesultanan Melaka. Konstruksi bangunannya berbahan kayu yang kuat dan kokoh dengan arsitektur yang menawan. Saya menyaksikan di istana sultan, gambaran cukup lengkap mengenai adat istiadat, antropologi, akulturasi budaya

Eropa yang tidak bertentangan dengan agama, dan perikehidupan masyarakat agraris yang serupa dengan kultur masyarakat pedesaan di Indonesia.

Di kota Melaka terdapat beberapa museum yang memanggil ingatan kolektif rumpun bangsa Melayu tentang kejayaan peradaban. Museum sekaligus mengingatkan para pengunjung dengan tragedi kejatuhan Melaka di masa silam akibat imperialisme/kapitalisme Barat yang datang untuk menjajah negeri Melayu. Ada Museum Islam Melaka, Museum Rakyat, Museum Sejarah dan Etnografi, dan lain-lain.

Melaka dan daerah sekitarnya direbut oleh Portugis pada tahun 1511. Selat Melaka dahulu merupakan Teluk yang mempersatukan negeri-negeri Melayu di Sumatera. Selat Melaka kemudian menjadi pemisah negeri-negeri Melayu, setelah masuknya penjajahan Portugis, Inggris dan Belanda. Bandar Melaka adalah bumi Nusantara yang pertama jatuh ke tangan orang Barat, dimana D'alburquerque, seorang laksamana Portugis berlayar dari Timur sampai ke Melaka, dengan tujuan menaklukkan kekuasaan Sultan Mahmud Syah hingga menduduki wilayahnya. Jatuhnya Melaka adalah suatu musibah. Namun Prof. Dr. H.M. Rasjidi menyatakan bahwa kejatuhan Melaka adalah suatu blessing in disguise yang mempercepat proses penyebaran Islam di Indonesia dalam skala dan kecepatan lebih besar di masanya.

Dalam buku Sejarah Umat Islam, penerbit Pustaka National PTE LTD Singapura, 1994, Prof. Dr. Hamka menggambarkan keramaian kota Melaka abad XIV M. Hamka menulis, "Kota Melaka ramai, kapal bersilang siur keluar dan masuk negeri, dari Jawa membawa hasil beras, dari Maluku membawa rempah, dari Sulawesi membawa setinggi Makassar yang terkenal, dari Sumatera membawa kapur barus, dari Khurasan, dari India, apalagi dari Tanah Arab."

Tidak bisa dipungkiri bahwa Islam adalah jantung peradaban dan kebudayaan Melayu. Bahkan kini ada organisasi Dunia Melayu Dunia Islam yang secara berkala mengadakan pertemuan. Secara geografis wilayah Melayu mencakup seluruh Malaysia, sebagian besar wilayah Indonesia, wilayah Brunei Darussalam, Singapura, Thailand Selatan dan Filipina Selatan.

Dalam sejarahnya Kerajaan Islam Melayu pertama di Kepulauan Nusantara bahkan di Rantau Asia Tenggara adalah Kerajaan Islam Perlak di Aceh Timur yang diproklamkan tanggal 1 Muharram 225 H/tahun 845 M. Selain itu, Kerajaan Islam Melaka berdiri pada tahun 1400 sebagai kelanjutan dari Kerajaan Islam Pasai. Pendiri dan Sultan Kerajaan Islam Melaka yang pertama ialah Sultan Muhammad Syah. Menurut Buya Hamka, Sul-

tan Muhammad Syah adalah pembangun utama adat istiadat Melayu Islam. Setelah ia mangkat digantikan oleh putranya yakni Sultan Iskandar Syah. Kerajaan Islam Melaka berdiri dalam abad keempat belas dan kelima belas Masehi. Adapun nama Melayu, menurut sejarahnya mulai timbulnya di Pulau Sumatera.

Jembatan Selat Melaka

Saya menyimpan buku Jembatan Selat Melaka karya ulama dan sastrawan terkemuka Aceh, Prof. A. Hasjmy, yang saya peroleh sebagai kenangan-kenangan dari Fachri Hasjmy sewaktu kunjungan ke Perpustakaan dan Museum Ali Hasjmy di Banda Aceh 27 Agustus 2003, setahun sebelum musibah Tsunami Aceh dimana adik Ali Hasjmy itu wafat sebagai syahid. Dalam buku yang diterbitkan oleh Pusat Informasi Sejarah dan Kebudayaan Islam/Perpustakaan dan Museum Yayasan Pendidikan Ali Hasjmy tahun 1997 mengemukakan bahwa setiap orang (1) yang berbahasa Melayu, (2) yang menganut agama Islam dan (3) yang mengikuti adat-istiadat

Melayu adalah orang Melayu

Dalam buku tersebut Ali Hasjmy yang pernah menjabat Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Aceh dari tahun 1957, dan Gubernur Daerah Istimewa Aceh tahun 1959 – 1964 mengutarakan, "Pada awalnya Kebudayaan Melayu belum mempunyai identitas yang kukuh dan tidak mempunyai pengaruh berkesan di Rantau Asia Tenggara, bahkan tidak juga di Dunia Melayu sendiri. Setelah datang Agama Islam barulah ia mendapat kekuatan dan membentuk dirinya dengan wajah yang disinari Nur Ilahi. Dalam perjalanan sejarahnya yang panjang, Melayu telah menjadi satu dengan Islam."

Lebih jauh ditegaskan; Kerajaan Melayu ialah Kerajaan Islam. Gugusan Kepulauan Nusantara yang mempergunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan adalah Dunia Melayu, dan Dunia Melayu identik dengan Dunia Islam. Bahasa Melayu telah dipergunakan sebagai media Dakwah Islamiyah semenjak awal sejarahnya di Nusantara ini, dan sebaliknya Dakwah Islamiyah telah menjadi media pengembangan dan pembinaan bahasa Melayu, sehingga bahasa Melayu menjelma menjadi bahasa antarbangsa, bahasa ilmu pengetahuan dan bahasa seni budaya. Untuk itu Dunia Melayu Raya sebagai kekuatan budaya perlu terus dibina untuk mendukung ASEAN sebagai kekuatan politik dan ekonomi.

Dalam perputaran zaman mengikuti sunatullah, setelah di Singapura, orang Melayu menetap di Melaka. Kota ini berkembang

menjadi Ibukota Kesultanan Melaka. Kesultanan Melaku di masa jayanya meliputi sebagian besar dunia Melayu, bukan saja di Semenanjung Tanah Melayu, tetapi juga wilayah-wilayah tertentu di Sumatera seperti Sumatera Tengah, tutur Ali Hasjmy. Sejarah dan etnografi Melayu mengabadikan nama dan jejak sejumlah kerajaan Islam atau kesultanan rumpun Melayu di bumi Nusantara, setelah kejatuhan Melaka ke dalam penguasaan Portugis.

Dunia Melayu Jantung ASEAN

Dunia Melayu dapat disebut sebagai jantung ASEAN. Dunia Melayu diharapkan memainkan peran dalam merekat persatuan umat Islam, membela harkat-martabat kemanusiaan dan menjaga gawang perdamaian abadi yang berlandaskan kemerdekaan dan keadilan sosial. Setiap konflik di wilayah serumpun ini pasti berisiko kerugian sosial dan kemunduran peradaban.

Energi umat Islam khususnya bangsa Melayu tidak boleh habis termakan persoalan-persoalan remeh-temeh yang tidak prinsipil dan tidak substantif. Bangsa Melayu dan khususnya umat Islam harus terbiasa berpikir strategis dan bekerja kolaboratif dalam mengantisipasi tantangan zaman dan merebut peluang masa depan. Hal itu seperti dicontohkan oleh para bapak bangsa Melayu dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan tanah air masing-masing dari hegemoni penjajahan.

Prof. Dr. Hamka, seorang ulama besar dan pujangga Islam serta Pahlawan Nasional Indonesia yang dihormati dan dicintai di seantero Tanah Melayu dalam buku Kenang-Kenanganku Di Malaya (2019) menyatakan, Indonesia dan Malaya adalah dua nama daripada satu negeri yang dahulunya hanya satu, dan perpecahan itu setelah kota Melaka dirampas Portugas. Buya Hamka mengutip ucapan Hang Tuah, "Bahwa Melayu tidak akan hilang dari dunia!".

Umat Islam dalam mengibarkan panji-panji Dakwah Islamiyah dan membangun masyarakat yang berkeadaban diharapkan saling menolong, saling melengkapi, dan saling mengisi. Jangan yang satu merusak hasil dakwah yang lainnya lantaran kepentingan kelompok yang mengalahkan kepentingan bersama. Syiar agama adalah aspek yang perlu dirawat, tetapi substansi beragama juga sangat penting dan menentukan. Dunia Melayu perlu mewaspadai anasir yang dapat melemahkan agama dan moral generasi bangsa di kawasan ini, seperti narkoba, kerusakan akhlak akibat pergaulan bebas, ekstremisme, kesenjangan ekonomi, dan sebagainya. ♦kemenag.go.id



Sekolah Rakyat

MAJU CEPAT DALAM WAKTU SINGKAT

"Alhamdulillah Sekolah Rakyat. Jadi, anak-anak yang putus sekolah, bisa sekolah. Anak-anak yang tadinya mungkin merasa rendah diri karena orang tuanya sangat susah hidupnya, kita tarik keluar. Kita beri lingkungan yang sebaik-baiknya supaya mereka percaya diri dan dia dapat pendidikan terbaik yang bisa kita berikan." ~Presiden Prabowo Subianto.

Sudah banyak yang mengisahkan Naila, siswi Sekolah Dasar (SD) asal Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang mengilhami Presiden Prabowo Subianto mengembangkan program Sekolah Rakyat. Dari seorang siswi SD yang tinggal di gubuk bersama ibunya dengan penghasilan pas-pasan,

Naila kini sudah menjadi siswi Sekolah Rakyat yang memungkinkannya meraih cita-cita.

Alhasil, Sekolah Rakyat menjadi salah satu program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Pada Senin, 14 Juli 2025, bersamaan dengan dimulainya Tahun Ajaran 2025/2026, berlang-

sunglah Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi para siswa Sekolah Rakyat secara serentak di 63 titik di seluruh Indonesia. Acara pembukaan MPLS dipusatkan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Kabupaten Bogor di Sentra Terpadu Inten Soewono (STIS) Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.



"Ada 63 titik operasional per 14 Juli ini. Ada 13 lokasi di Sumatera, 34 lokasi di Jawa, tiga lokasi di Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan dua lokasi, Sulawesi delapan lokasi, Maluku dua lokasi, dan Papua satu lokasi," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam acara itu.

Turut hadir pembukaan MPLS Sekolah Rakyat, antara lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof Muhammad Nuh, serta pendiri ESQ Corp Ary Ginanjar.

Di awal penyelenggaraannya, total rombongan belajar (rombel) di 63 titik Sekolah Rakyat mencapai 256 rombongan. Tiga rombel tingkat SD, 112 rombel tingkat SMP, dan 141 rombel tingkat SMA. Total siswanya tercatat sebanyak 6.100 orang: 75 siswa tingkat SD, 2.800 siswa tingkat SMP, dan 3.225 siswa tingkat SMA.

Mensos mengemukakan, Sekolah Rakyat merupakan gagasan dan strategi besar Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui

penyediaan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, mengacu pada Desil 1 dan 2 DTSN. Program ini juga menjadi bagian dari upaya untuk menyiapkan generasi penerus yang unggul dan kompetitif menuju Indonesia Emas 2045. "Sekolah Rakyat menyentuh masyarakat lapisan bawah, mereka yang selama ini tertinggal, tidak terbawa dalam proses pembangunan, menjangkau mereka yang tidak mampu bersaing," ujarnya.

Penyelenggaraan Sekolah Rakyat adalah wujud kolaborasi pemerintah baik pu-

sat maupun daerah. Oleh karena itu, Mensos pun menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berperan dalam mewujudkan gagasan Presiden Prabowo ini. "Enam bulan sudah sejak (rencana Sekolah Rakyat) ini dinyatakan ke publik kita sudah bisa memulai pembelajaran di sekolah rintisan tahun 2025/2026. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap para menteri dan jajaran yang punya komitmen luar biasa sehingga meskipun waktunya terbatas tapi kita bisa bekerja dengan baik," tandasnya.

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko



PM) Abdul Muhaimin Iskandar juga mengapresiasi langkah cepat seluruh pihak dalam mewujudkan Sekolah Rakyat. "Ini langkah cepat yang luar biasa dan terbukti semua bisa kita lakukan, semua kementerian terlibat, semua bergerak cepat," ujar Menko PM.

Sekolah Rakyat adalah sekolah yang konsep berasrama dan gratis, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Seluruh siswa Sekolah Rakyat akan mengikuti pelajaran formal di siang hari, dan mendapat penguatan pendidikan karakter pada malam hari. Nilai-nilai agama, kepemimpi-

heatan lain untuk memastikan kesehatan para siswa. Di sekolah ini, para siswa juga akan dapat mengembangkan kapasitas dan kemampuan diri sesuai minat dan bakat masing-masing.

Selain di 63 titik yang telah memulai MPLS, sebanyak 37 titik lainnya memulai MPLS pada akhir Juli 2025. Total 100 titik lokasi rintisan mulai beroperasi di seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2025/2026. Sementara 100 titik tambahan lagi masih dalam proses pematangan dan akan memanfaatkan balai latihan kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kem-



nan, hingga keterampilan hidup menjadi bagian penting dari kurikulum.

Sistem pembelajaran yang digunakan di Sekolah Rakyat mengadopsi fitur learning management system dan mengintegrasikannya dengan modul pembelajaran digital. Dengan demikian sistem ini bisa menjangkau anak-anak di wilayah terpencil, dan area-area lain yang selama ini luput dari akses pendidikan berkualitas.

Sebelum memulai MPLS, para siswa menjalani Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang meliputi pengecekan tekanan darah, mata, telinga, dan berbagai tes kes-

ehatan). Dengan total 200 titik Sekolah Rakyat, maka lebih dari 20 ribu siswa dari keluarga miskin akan mendapat akses pendidikan gratis berasrama dan orang tuanya mendapatkan program pemberdayaan.

Presiden pun sempat mengunjungi salah satu titik Sekolah Rakyat, Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Marga Guna, Jakarta Selatan pada Kamis, 11 September 2025. Dalam kunjungan itu Presiden menyapa dan berbincang dengan para siswa yang sebelumnya menyambutnya dengan yel-yel penuh semangat. "Terima kasih semuanya, belajar

yang baik," kata Presiden Prabowo.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya. Mereka disambut dengan berbagai penampilan, mulai dari tarian Betawi Kembang Jatoh hingga paduan suara siswa yang pernah tampil di Istana Negara.

Seusai bercakap dengan siswa, Presiden meninjau fasilitas olahraga, ruang kelas, asrama dan ruang makan. Di salah satu kamar asrama, Presiden menyempatkan menulis pesan motivasi di buku salah satu siswa: "Belajar yang baik, hormati guru. Cintai ayah dan ibu. Rajin sembahyang, selalu sopan dengan teman," kata Presiden.

Usai meninjau fasilitas sekolah, Presiden berbagi pengalaman pribadinya saat menempuh pendidikan di akademi militer. Ia membandingkan kondisi asrama saat itu dengan asrama Sekolah Rakyat yang menurutnya jauh lebih baik. "Tempat tidurnya bagus. Tiap tiga siswa, tiga siswi, satu kamar mandi. Saya dulu di akademi militer, kita 60 orang, kamar mandi yang los gitu, pakai gayung," kata dia.

Presiden mengemukakan lagi Sekolah Rakyat hadir untuk memberi kesempatan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin. "Alhamdulillah, Sekolah Rakyat jadi (tempat bagi) anak-anak yang putus sekolah, bisa sekolah. Anak-anak yang tadinya mungkin merasa rendah diri karena orang tuanya sangat susah hidupnya, kita tarik keluar. Kita beri lingkungan yang sebaik-baiknya supaya mereka percaya diri dan dia dapat pendidikan terbaik yang bisa kita berikan," ujarnya.

Salah satu siswa, Junior Diah Afifah, 16, asal Setiabudi, Jakarta Selatan, mengaku bahagia bisa bertemu langsung dengan Presiden. "Tadi kan belajar di kelas, kemudian ada pengumuman Presiden mau datang, aku kaget tidak percaya. Tapi aku senang banget ketemu Pak Presiden, soalnya baru pertama kali bertemu," ujar Diah.

Sedangkan Presiden mengemukakan pula rencana memperluas sasaran Sekolah Rakyat untuk kelompok ekonomi desil 2-5, dari yang sebelumnya hanya ditujukan untuk keluarga siswa dengan kelompok ekonomi terbawah, yakni desil 1 dan 2. Ia berencana membangun 500 Sekolah Rakyat di titik wilayah yang paling tertinggal, dari saat ini 100 Sekolah Rakyat yang sudah beroperasi.

"Sasaran kita 500 Sekolah Rakyat di ti-

titik-titik, kantong-kantong rakyat kita yang paling tertinggal, rakyat kita yang paling ekonominya susah. Kalau istilah statistik, desil satu dan dua. Tapi saya sedang juga merencanakan untuk desil 2, 3, 4 dan 5. Ini sedang kita rencanakan,” kata Presiden.

Menurut Presiden, perluasan jangkauan untuk keluarga siswa dari kelompok ekonomi bawah dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan memberi kesempatan anak-anak di Indonesia mengenyam pendidikan dengan fasilitas yang bagus. “Hari ini saya meninjau salah satu sekolah rakyat, hari ini sudah 100 yang beroperasi. Saya dapat laporan akhir September, dua minggu lagi, tiga minggu lagi, akan jadi 165 sekolah rakyat,” kata Presiden.

Presiden menekankan pendidikan di Indonesia tidak boleh tertinggal dari bangsa lain. Hal itulah yang menjadi cita-citanya melalui pembangunan Sekolah Rakyat. “Anak-anak yang putus sekolah, bisa sekolah. Anak-anak yang tadinya mungkin merasa rendah diri karena orang tuanya sangat susah hidupnya, kita tarik keluar, kita beri lingkungan yang sebaik-baiknya,” kata Presiden.

Nah, setelah sekitar 100 hari penyelenggaraan rintisan Sekolah Rakyat, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memutus rantai kemiskinan struktural melalui pembangunan 500 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Terlebih, program ternyata menjadi salah satu capaian strategis pada satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang berfokus pada pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan kesempatan pendidikan.

“Sebanyak 166 Sekolah Rakyat sudah beroperasi. Ini luar biasa. Saya berterima kasih kepada menteri-menteri yang terkait,” ujar Presiden Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.

Presiden menjelaskan, dari target awal 100 sekolah, pemerintah berhasil melampaui capaian dengan 166 Sekolah Rakyat yang kini telah beroperasi dan mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK. Hingga Oktober 2025, program ini telah menampung 15.945 siswa dan siswi dari keluarga miskin ekstrem.

“Mereka berasal dari keluarga ekonomi terbawah, desil 1 dan 2, yang sebelumnya banyak tidak bersekolah sama sekali. Ada yang membantu orang tuanya menjadi pemulung, ada yang hidup di jalanan,” ungkap Prabowo.

Presiden menyampaikan rasa syukur karena kini anak-anak dari keluarga tidak mampu dapat bersekolah gratis, berasrama, dan memperoleh makan bergizi setiap hari. “Anak orang miskin atau cucu orang miskin tidak harus menjadi miskin. Kita harus berani memutus rantai kemiskinan dan tidak menyerah pada keadaan,” tegasnya.

Nah, menurut Presiden, inisiatif pengembangan Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, melainkan juga menjadi strategi pemerataan sosial untuk memastikan anak-anak dari lapisan

siswa. Kalau 500 sekolah berdiri, berarti kita membantu 500 ribu keluarga miskin dan sangat miskin,” jelas Presiden.

Prabowo juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat menjadi simbol keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil, sekaligus langkah konkret membangun keadilan sosial melalui pendidikan. “Kalau tidak bisa membantu banyak orang, bantu beberapa orang. Kalau satu pun tidak bisa, jangan mempersulit orang lain. We must do what we can do. And we can do, if we want to,” tandasnya.

Nah, dari kisah siswi Naila di Makas-



ekonomi terbawah memiliki kesempatan yang sama meraih masa depan lebih baik. “Orang-orang yang paling bawah sering kali tidak terlihat. Sekolah Rakyat hadir agar penderitaan mereka tidak diabaikan,” ujarnya.

Presiden Prabowo optimistis target pembangunan 500 Sekolah Rakyat dapat tercapai hingga akhir masa kepemimpinannya. Program ini diharapkan mampu membantu 500 ribu keluarga miskin dan sangat miskin, sekaligus memperluas lapangan kerja di sektor pendidikan dan logistik pendukung. “Konsep Sekolah Rakyat adalah satu sekolah untuk seribu

sar, Sekolah Rakyat sudah berkembang pesat. Giliran Muhammad Daffa Raasyid, siswa SMRP 2 di Bandung Barat, Jawa Barat mengungkapkannya:

“Terima kasih Bapak Prabowo karena telah membuat sekolah rakyat ini sehingga saya dan teman-teman bisa kembali merasakan bangku sekolah. Sekolah ini yang akan merakit kami menjadi anak-anak yang kreatif, cerdas, dan memiliki jiwa kepemimpinan seperti Bapak. Mungkin sepuluh tahun ke depan kami akan menjadi orang yang sukses dan bisa membangun negara ini. Tunggu kami ya, Pak.” ♦

SEKOLAH RAKYAT UNTUK MASA DEPAN

Seiring dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda kali ini, program Sekolah Rakyat mengarahkan para siswanya lebih paham soal ekonomi dan bisnis, khususnya literasi keuangan.

Selaras belaka dengan upaya mengatasi ketertinggalan sosial dan ekonomi para siswa-siswinya.

Sudah jelas siswa-siswi Sekolah Rakyat adalah generasi muda yang menghadapi kendala sosial dan ekonomi untuk mengenyam pendidikan. Maka, mengajari para siswa sekolah rakyat mengenai literasi keuangan sudah tentu sangat relevan untuk mendidik agar masa depan mereka lebih baik secara sosial dan ekonomi. Bank Indonesia pun membuka pintunya.

Pada kunjungan itu para siswa berkeliling mengunjungi museum dalam kegiatan bertema "Sekolah Rakyat Belajar Bersama Bank Indonesia: Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah". Mensos yang kerap disapa Gus Ipul mengemukakan kunjungan ke Museum BI bukan sekadar wisata, melainkan sebuah "jendela inspirasi" yang berharga bagi para siswa.

Gus Ipul berharap, dengan menapaki lorong-lorong sejarah moneter dan melihat evolusi mata uang Rupiah, anak-anak Sekolah Rakyat memahami pentingnya literasi keuangan. Mereka pun diharapkan juga bisa menumbuhkan semangat dan mental yang kuat untuk merancang

masa depan Indonesia yang makmur dan sejahtera.

"Kita ingin anak-anak ini mendapatkan inspirasi setelah mengunjungi museum ini yang pada intinya mereka belajar," kata Mensos.

Dalam kunjungan ke Museum BI, para siswa Sekolah Rakyat juga mendapat edukasi sejarah keuangan, mengenal uang dari berbagai era, dan belajar mengenali ciri uang asli. Semua dipelajari lewat video interaktif dan tur keliling museum.

Menurut Gus Ipul, kehadiran para siswa di museum BI adalah simbol nyata bahwa setiap anak - tanpa memandang latar belakang - berhak mendapatkan akses dan motivasi untuk menjadi pemimpin hebat, cerdas, berkarakter. Mensos juga menekankan pentingnya melek finansial di tahun-tahun mendatang, sejalan dengan semangat persatuan para pemuda 1928 yang ingin menjadi pintar bersama-sama.

Ia berharap studi tur siswa Sekolah Rakyat ke Museum BI memperkuat literasi keuangan mereka, sehingga para siswa bisa mengelola uang dan berinvestasi



dengan baik di masa depan. Dalam kesempatan itu, Mensos juga sempat berdialog dengan para siswa.

Naira, siswi SRMA 10 Jakarta Selatan mengatakan keinginannya melihat Indonesia yang lebih maju ke depan. "Harapan aku semoga Sekolah Rakyat ini membantu Indonesia lebih maju lagi. Terutama bagi anak-anak yang kurang mampu ya," kata Naira yang bercita-cita ingin menjadi anggota TNI.

Sedangkan Lingga Radiansyah, SRMA 9 Jakarta Timur, Mulya Jaya, berharap Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dan jajarannya tidak pernah lelah berjuang untuk kemajuan bangsa. "Untuk Pak Menteri, jangan pernah capek-capek untuk peduli sama kami semua. Semangat terus pak, kami juga bersemangat," ujarnya.

Linggar juga ditanya tentang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sedang naik daun dengan program-programnya, kebetulan hal itu juga ditanyakan oleh Mensos. Siswa dari Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 9 Mulia Jaya Jakarta itu pun tampil percaya diri di hadapan para peserta upacara untuk menyampaikan pesan ke Purbaya.

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Lingga Radiansyah, aku dari SRMA 9 Jakarta tepatnya di Mulia Jaya," kata Lingga.

Dalam pesannya, Lingga berharap Purbaya terus bersemangat memajukan perekonomian Indonesia. "Untuk pesan-pesan ke Pak Purbaya, Pak Purbaya semoga semangat terus untuk memajukan ekonomi di Indonesia ini, dan Semoga Indonesia menjadi lebih baik ekonomi ke depannya," ujarnya.

Lingga juga mendukung Purbaya agar bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen. "Dan semangat 8 persen ekonomi maju di Indonesia. Terima kasih, Pak Purbaya," kata dia.

Nah, Menteri Keuangan Purbaya memang relevan dengan kesinambungan Sekolah Rakyat. Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang berjalan di bawah koordinasi Kementerian Sosial (Kemensos) yang memerlukan dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan.

Terlebih, Menkeu Purbaya pun pernah mengemukakan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat merupakan upaya untuk memperkuat manfaat pemerataan pembangunan, serta menciptakan stabilitas. "Itu adalah salah satu upaya dari pemerataan manfaat pembangunan. Itu akan menciptakan

stabilitas nasional yang dinamis," kata dia di acara Investor Daily Summit di Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025.

Menurut dia, program tersebut merupakan tindak lanjut dari tiga pilar yang dijalankan dalam memacu ekonomi hingga delapan persen, dengan menysasar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemer-

berbagai program yang ada, sehingga Sekolah Rakyat tidak akan membebani APBN. Semua program Presiden tetap berjalan beriringan," ujar Roni dalam diskusi publik 'APBN 2026: Membangun Generasi Unggul' di Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2025.

Fase awal program, yakni Sekolah



ataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis. Sedangkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, menurut Purbaya sektor swasta hendaknya berperan sebagai mesin utama, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai katalis untuk membangkitkan peran swasta.

Dalam kaitan itu, Analis Madya Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Roni Parasian, menjelaskan bahwa program ini memanfaatkan dan mengoptimalkan anggaran lintas kementerian agar penyelenggaraannya tetap efisien. "Pemerintah mampu mengombinasikan

Rakyat Rintisan, telah dimulai pada tahun ajaran 2025/2026 dengan memanfaatkan fasilitas negara yang direnovasi. Pemerintah menargetkan pembangunan gedung khusus mulai 2026 dan memperluas jangkauan hingga 2029. Saat ini, sudah terdapat 165 sekolah rintisan yang beroperasi di seluruh Indonesia.

Sedangkan Sekjen Kemensos Robben Rico menambahkan, program ini lahir dari kesadaran atas lambatnya penurunan angka kemiskinan dan tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS). Berdasarkan data, di Jawa Timur saja terdapat lebih dari 400 ribu anak usia SMA yang tidak ber-

sekolah. "Sebagian besar putus sekolah karena alasan ekonomi. Program Sekolah Rakyat diharapkan menjawab persoalan tersebut melalui pendidikan gratis berasrama yang komprehensif," jelasnya.

Sementara itu, pengamat pendidikan Ina Liem menilai konsep berasrama merupakan langkah inovatif untuk melindungi anak dari eksploitasi dan kekerasan. "Sekolah reguler tidak cukup. Anak-anak ini perlu lingkungan aman dan terproteksi 24

jam agar bisa fokus belajar," tegasnya.

Kepala SRMA 10 Jakarta, Ratu Mulyaningsih, turut mengapresiasi program ini. Ia menyebut sekolah rakyat hadir sebagai ruang aman bagi remaja dari latar belakang rentan. "Banyak siswa kami korban kekerasan dan berasal dari lingkungan keras. Sekolah ini hadir untuk memutus rantai kemiskinan dan kekerasan," ujarnya.

Dengan semangat kolaborasi lintas

lembaga, pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat Berasrama menjadi instrumen utama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan membangun generasi unggul Indonesia menuju 2045. Tak mengherankan jika siswa Sekolah Rakyat Lingga Radiansyah bagaikan mewakili generasinya yang mendukung Menkeu Purbaya.

Nah, Mensos pun berterima kasih kepada Lingga atas pesan yang disampaikan untuk Menkeu Purbaya. "Terima kasih. Kamu mengikuti dengan baik ya? Terima kasih ya," kata Gus Ipul.

Kegiatan literasi keuangan ditutup dengan makan siang bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan pejabat BI. Setelah itu, seluruh peserta mengikuti upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda dengan penuh semangat.

Yang mengikuti upacara tercatat antara lain para siswa dan siswi dari Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 9 Jakarta Timur, SRMA 10 Jakarta Selatan, juga Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 6 Jakarta Timur. Dengan pakaian upacara lengkap dengan baret merah marun menghiasi kepala, mereka tegak berdiri mengikuti upacara dengan khidmat.

Mensos Saifullah Yusuf bertindak sebagai inspektur atau pembina upacara ini. Dalam amanatnya, ia menyampaikan apresiasi kepada BI yang telah memberi kesempatan anak-anak Sekolah Rakyat untuk mengenal lebih dekat dunia perbankan dan sejarah uang Indonesia. Momen ini dinilai sangat berharga bagi mereka yang kebanyakan baru pertama kali mengunjungi museum BI ini.

Gus Ipul pun mengajak siswa-siswi Sekolah Rakyat mengambil pelajaran penting dari peringatan Hari Sumpah Pemuda ini. Menurut dia, ada pendidikan karakter yang ditanamkan oleh para tokoh pendahulu mengenai perbedaan yang bisa dikesampingkan demi kepentingan Bangsa dan Negara.

"Bagaimana para pemuda-pemuda itu melakukan suatu pertemuan, duduk bersama. Meskipun mereka berbeda-beda, akhirnya sepakat bahwa Indonesia harus lahir, Indonesia harus merdeka," ujar Gus Ipul.

Semangat seperti itu, kata dia, harus diteruskan oleh para pemuda-pemudi saat ini. Sehingga, ke depan bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih gemilang lagi.

"Para pendahulu kita sudah meletakkan dasar-dasar kebersamaan, kerukunan, dan sekarang saatnya kita merancang masa depan," ungkap Mensos Gus Ipul. ♦



DUKUNGAN BANK INDONESIA HINGGA DAERAH

Para siswa Sekolah Rakyat yang berkunjung ke Museum Bank Indonesia pada Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025 itu berkeliling Museum Bank Indonesia untuk mengenal perjalanan sejarah rupiah, simbol-simbol pahlawan nasional, serta unsur pengaman pada uang kertas. Museum BI ini berlokasi di Jl Pintu Besar Utara No. 3, Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat yang juga merupakan bagian dari kawasan wisata Kota Tua Jakarta.

Edukator BI Rivando Almesa yang mendampingi peserta menjelaskan pentingnya memahami ciri keaslian uang dan makna simbol-simbol di dalamnya,

murah,” ujarnya.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso mengatakan bahwa kegiatan edukasi tersebut merupakan bentuk dukungan BI terhadap program Sekolah Rakyat yang dinilai berperan penting dalam membangun karakter dan wawasan kebangsaan generasi muda. Ia menilai semangat para siswa yang mengikuti rangkaian kegiatan di Museum Bank Indonesia mencerminkan optimisme masa depan bangsa.

“Di Jabodetabek ada delapan Sekolah Rakyat, dan ini merupakan niat baik kami untuk ikut berkontribusi mendukung program yang baik ini. Ke depan kami berharap

rasi museum yang sarat nilai sejarah. Rombongan kemudian melanjutkan ke Ruang Imersif, yang menampilkan perjalanan arsitektur museum dari masa kolonial hingga era nasionalisasi melalui tayangan visual interaktif.

Berlanjut kemudian ke Ruang Numismatik. Ruangan ini menampilkan koleksi uang dari berbagai masa, mulai dari era Hindia Belanda, pendudukan Jepang, kemerdekaan, hingga rupiah modern. Gus Ipul tampak antusias mendengarkan penjelasan dari Kurator Museum BI Syefri Luwis dan Zainal C. Airlangga mengenai makna sejarah di balik setiap lembar uang Indonesia.



termasuk soal adanya unsur pengaman seperti benang di dalam uang pecahan. Benang pengaman itulah yang menurut dia membuat uang termasuk rupiah tidak bisa dipalsukan karena dianyam sedemikian rupa dan mampu menimbulkan efek dinamis ilusi optik.

“Jadi setiap warga negara harus cinta, bangga, dan paham terhadap rupiah. Uang kita punya nilai historis dan simbol kebangsaan yang perlu dihargai. Di balik setiap lembar rupiah ada perjuangan, nilai budaya, dan proses panjang yang tidak

kantor-kantor Bank Indonesia di daerah juga bisa berpartisipasi,” ungkap Ramdan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono ikut berkeliling museum. Selain Ramdan, ikut mendampingi rombongan antara lain Direktur Departemen Komunikasi BI Hery Indratno dan Direktur Departemen Pengelolaan Uang BI Hari Widodo.

Kunjungan dimulai dengan memasuki Ruang Arsitektur Gedung. Mensos Gus Ipul tampak mengamati rincian gambar bangunan bersejarah dan proses resto-

Menutup kunjungan, Gus Ipul menyampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih untuk Bank Indonesia atas dukungan terhadap pendidikan inklusif melalui kegiatan literasi keuangan.

“Saya terus terang apresiasi ya pimpinan BI yang telah memiliki inisiatif dan program untuk mengajak anak-anak Sekolah Rakyat (tur). Ini akan memotivasi mereka dan menjadi jendela bagi mereka untuk melihat dunia keuangan lebih luas. Terima kasih BI, sukses terus dan maju bersama untuk Indonesia,” kata Gus Ipul. ♦



MENUJU 500 SEKOLAH RAKYAT

Arah pengembangan Sekolah Rakyat sudah jelas. Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan tekad menambah jumlah Sekolah Rakyat secara bertahap sebanyak 100 sekolah per tahun.

Intinya, pemerintah menargetkan berdirinya 500 sekolah rakyat di wilayah kantong-kantong masyarakat yang ekonominya paling lemah. Program juga diarahkan agar menjangkau lapisan menengah bawah.

Kisi-kisi pengembangannya pun sudah tersusun di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang menjadwalkan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap II pada bulan September 2025 dan dapat mulai beroperasi pada Juni 2026.. "Direncanakan, mulai September kita groundbreaking (peletakan batu pertama) untuk SR Tahap II. Karena pada Juni 2026, ditargetkan seluruh pembangunan SR harus sudah selesai," kata Dody, dalam penjelasan resmi pada pertengahan juli 2025 lalu.

Dody mengungkapkan, pembangunan SR Tahap II ini diproyeksikan akan menelan anggaran sekitar Rp200-300 miliar per sekolah. Anggarannya akan bergantung pada berapa hektare luasan sekolahnya. Sedangkan untuk pembangunan SR Ta-

hap I sendiri, Kementerian PU melaksanakan pekerjaan fisik selama 65 hari kalender sejak kontrak ditandatangani pada 10 Mei 2025.

Total nilai kontrak untuk pembangunan 63 lokasi SR Tahap IA di seluruh Indonesia



sebesar Rp322 miliar. "Proyek SR Tahap I ini baru merupakan langkah awal dari rencana pembangunan SR berskala lebih besar," ujarnya.

Salah satu di antara 63 lokasi ST Tahap IA ialah Sentra Paramita di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Lokasi ini difungsikan sebagai sarana pendidikan jenjang SMP dengan kapasitas empat rombongan belajar dan total daya tampung sekitar 100 siswa.

"Untuk SR Sentra Paramita, anggarannya sekitar Rp 5-6 miliar, karena merupakan sekolah rintisan. Jadi penanganan yang dilakukan oleh Kementerian PU adalah renovasi dari bangunan yang sudah eksisting. Harapannya maintenance SR dapat dilakukan dengan baik oleh Kementerian Sosial melalui dinas sosial," ujar Dody, dalam kunjungannya ke lokasi.

Melalui pembangunan SR, pemerintah menargetkan peningkatan akses pendidikan berkualitas, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan berada di wilayah yang selama ini sulit dijangkau layanan pendidikan formal. "Peran Kementerian PU dalam program SR difokuskan pada pembangunan infrastrukturnya, sementara untuk operasionalnya merupakan peran Kementerian Sosial. Diharapkan, kolaborasi antara Kementerian PU dan Kementerian Sosial berjalan dengan baik, sehingga dapat mendukung kesuksesan program SR di seluruh Indonesia," kata Dody.

Sejauh ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menganggarkan Rp 25,8 triliun untuk mengeksekusi program sekolah rakyat pada tahun 2026. Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana Strategis Kementerian PU, Maulidya Indah Junica, instansinya akan membangun sekitar 100 sekolah rakyat tahun depan.

Dana tersebut berasal dari total anggaran Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU tahun depan yang sebesar Rp 32 triliun. Selain untuk sekolah rakyat, anggaran itu juga akan dipakai membangun sarana olahraga, pasar, hingga pendidikan lainnya. "Kemudian kegiatan non pendidikan, yaitu kegiatan perekonomian, olahraga, kesehatan, dan sosial budaya, serta prasarana strategisnya, juga telah diindikasikan untuk total tahun anggaran 2026 adalah Rp 32 triliun, dengan rincian sekolah rakyat Rp 25,8 triliun, kemudian madrasah Rp 3,5 triliun, kemudian pasar, olahraga, pendidikan tinggi lainnya Rp 3 triliun," ungkap Maulidya dalam Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PU pada awal Mei 2025 lalu. ♦

SUMSEL PANTANG KETINGGALAN



Sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap program Sekolah Rakyat, Balai Diklat Keuangan Palembang bersinergi dengan Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan rangkaian kegiatan pengembangan diri dan peningkatan pengetahuan bagi para siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang. Kegiatan ini memilih tajuk BESANAK (Belajar Bersama Anak Sekolah).

BESANAK merupakan inovasi Balai Diklat Keuangan Palembang dalam bentuk kegiatan pelatihan, edukasi, dan penguatan karakter bagi siswa jenjang SMA di Sekolah Rakyat Sentra Budi Perkasa Palembang. Program ini dirancang untuk membekali para siswa dengan soft skill dan pengetahuan praktis sebagai bekal menuju masa depan yang lebih baik. Kegiatan BESANAK juga menjadi bagian dari kontribusi aktif Kemenkeu Satu Sumatera Selatan dalam pembangunan sumber daya manusia.

Dalam dialek Palembang, "BESANAK" berarti kerabat atau keluarga. Lebih spesifik, bisa merujuk pada keluarga besar atau hubungan kekerabatan yang luas, bukan hanya keluarga inti. Tema yang diangkat dalam BESANAK adalah "Membentuk Generasi Muda Unggul, Kreatif, dan Berkarakter untuk Menyongsong Indonesia Emas 2045".

Kegiatan ini berlangsung setiap Kamis sejak pertengahan Agustus hingga akhir September 2025, dengan berbagai materi bermanfaat yang dipaparkan oleh para pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan. Mulai dari penguatan integritas, inspirasi dan motivasi, hingga praktik public speaking, pengoperasian komputer dasar, dan keamanan informasi.

Pada penutupan rangkaian kegiatan BESANAK, pada Kamis, 16 Oktober 2025, siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang mengikuti Kunjungan Edukatif ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Palembang, yang berlokasi di kompleks pelabuhan Boom Baru. Para siswa mendapatkan pemahaman umum terkait keuangan negara melalui sosialisasi Pengenalan Keuangan Negara, dengan materi yang disampaikan oleh para pejabat yang mewakili unit kerja Kementerian Keuangan di Provinsi Sumsel.

Dalam sesi 1-2, para siswa diajak mengenal lebih dekat terkait penerimaan negara dan manfaat pajak bagi pembangunan, fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai community protector yang melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal dan berbahaya. Pada sesi 3-4, para siswa mendapat penjelasan mengenai belanja negara melalui program-program prioritas nasional dan pemahaman umum terkait aset negara dan kekayaan negara. Tambahan pula, para siswa pun berkunjung langsung melihat dari dekat pelaksanaan tugas KPPBC Tipe Madya Pabean B Palembang, terminal peti kemas Pelabuhan Boom Baru, dan berlayar di Sungai Musi di atas Kapal Patroli DJBC.

Akhirnya, semoga pengembangan Sekolah Rakyat pada 2026 berlangsung lancar dan merata serta mencapai tujuan luhurnya. Insya Allah. ♦

AMANAH DALAM PENGELOLAAN ASET NEGARA

OLEH: AKMALDIYA

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah cermin dari tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Bagi Kementerian Agama (Kemenag), sebuah institusi dengan jangkauan dan kepercayaan publik yang sangat luas, BMN bukan sekadar inventaris. Ia adalah manifestasi krusial dari amanah yang diberikan oleh rakyat dan negara. Prinsip amanah di lingkungan Kemenag harus melampaui kepatuhan normatif, mencakup profesionalisme, akuntabilitas, dan tanggung jawab penuh untuk menjaga serta mendayagunakan aset negara secara optimal demi kemaslahatan umat.

Bagi setiap ASN Kemenag, amanah dalam mengelola BMN adalah inti dari filosofi organisasi yang kita junjung tinggi: "Kerjaku Ibadahku". Setiap tindakan, mulai dari pencatatan yang tertib, pemeliharaan yang cermat, hingga pelaporan yang akurat adalah bentuk ketaatan, pengabdian, dan wujud nyata dari ihsan (kesungguhan) dalam berkerja.

Dilema BMN: Warisan yang Harus Dihentikan

Sifat pengelolaan BMN memang unik; ia seringkali terasa baik-baik saja di permukaan. Kelalaian hari ini, seperti aset yang tidak tercatat atau idle, tidak menimbulkan dampak instan, namun akan berubah menjadi "bom waktu" yang pasti meledak saat audit BPK tiba.

Kita harus mengakui, banyak permasalahan BMN saat ini merupakan "harta warisan" dari pengelola terdahulu yang tidak terdorong untuk mengelola aset dengan sungguh-sungguh. Mereka mewariskan sengketa lahan atau aset yang lenyap dari pembukuan, yang membutuhkan waktu, energi, dan biaya besar untuk diselesaikan. Amanah terbesar kita hari ini adalah memutus rantai pewarisan masalah BMN bagi generasi Kemenag berikutnya.

Permasalahan mendasar ini diperparah oleh kurangnya kepedulian pimpinan Satker. Perhatian terhadap BMN seringkali hanya muncul ketika proses itu bersinggungan langsung dengan kepentingan mendesak, seperti:

Kebutuhan Pengadaan: Ketika diwajibkan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang ketat dan harus sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK). Baru saat itu pimpinan bereaksi keras untuk mendesak perbaikan data BMN.

Kebutuhan Penghapusan: Ketika aset lama atau idle menghabiskan tempat, pimpinan baru peduli untuk mengajukan penghapusan.

Minimnya perhatian ini juga tercermin

dari alokasi anggaran dan SDM pengelola BMN yang sangat terbatas. Posisi pengelola BMN kerap diisi oleh pegawai yang merangkap, atau bahkan diserahkan kepada tenaga honorer/P3K tanpa dukungan formal yang memadai.

Kesenjangan Struktural: Krisis "BMN Warrior"

Di tengah tuntutan akuntabilitas dan skala Kemenag yang terbesar di Indonesia, dengan ribuan Satker tersebar luas dari Sabang hingga Merauke, isu SDM menjadi sangat genting.

Kita membutuhkan tenaga profesional yang diakui melalui Jabatan Fungsional. Namun, jabatan Penata Laksana Barang (JFPLB) yang mengawal aset, secara struktural masih kurang menarik. Sebagai kategori keterampilan, jenjang karier tertinggi JFPLB hanya mencapai level Penyelia. Keterbatasan jenjang ini membuat posisi JFPLB kurang diminati oleh ASN muda.

Data kita mencatat kesenjangan yang sangat mengkhawatirkan: dari formasi ideal yang disediakan hingga sekitar 5.000 posisi, Kemenag saat ini baru memiliki sekitar 64 Pejabat Fungsional Penata Laksana Barang. Kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM profesional ini adalah ancaman serius terhadap keberlanjutan Opini WTP.

Bukti Dedikasi: Lompatan Akuntabilitas PSP

Meskipun dalam keterbatasan formal, pengelolaan BMN Kemenag terus menunjukkan perbaikan signifikan, terutama berkat dedikasi para BMN Warrior. Mereka adalah para pejuang yang secara teguh menjaga aset negara, meskipun sebagian besar bukanlah JFPLB, melainkan P3K, honorer, atau ASN perangkap jabatan.

Berkat perjuangan para BMN Warrior ini, Kemenag telah mencatatkan lompatan akuntabilitas yang fenomenal, khususnya dalam aspek Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN. Pada tahun 2020, persentase aset Kemenag yang telah memiliki PSP baru mencapai 12%. Namun, berkat kerja keras kolektif, persentase tersebut saat ini telah melonjak hingga mencapai 88% untuk seluruh aset. Lompatan kuantitas dan kualitas ini adalah bukti nyata bahwa integritas dan dedikasi dapat melampaui keterbatasan struktural.

Komitmen Kemenag telah membuahkan hasil luar biasa: diraihnya opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan yang dipertahankan secara berturut-turut sejak tahun 2016. Opini WTP ini adalah cerminan akuntabilitas tertinggi. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, kita berpegang pada enam pilar strategis yang dijiwai oleh nilai amanah:

Penatausahaan BMN yang Tertib dan Akurat: Komitmen dimulai dari fondasi data yang solid. Ini meliputi pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan yang dilakukan secara disiplin. Penatausahaan yang tertib adalah langkah awal dan utama pencegahan temuan pemeriksaan.

Pencegahan Temuan dan Peningkatan IPA: Tujuan kita melampaui lulus audit. Upaya pencegahan temuan pemeriksaan harus menjadi prioritas harian. Lebih strategis lagi, Kemenag harus terus berupaya meningkatkan Indeks Pengelolaan Aset (IPA), yang mengukur seberapa efektif aset digunakan untuk mendukung Tupoksi dan memberikan nilai maksimal.

Penguatan SDM dan Dukungan Karier: Kita harus mendukung inisiatif strategis untuk meningkatkan daya tarik JFPLB. Keterbatasan JFPLB harus segera diatasi melalui percepatan pengangkatan dan dukungan pelatihan berkelanjutan. Kepedulian pimpinan harus memastikan keberadaan PIC BMN di setiap unit kerja didukung penuh.

Apresiasi dan Pemberian Reward: Sistem akuntabilitas harus dilengkapi dengan sistem motivasi. Penghargaan (Reward) bagi Satker atau individu yang menunjukkan kinerja pengelolaan BMN terbaik, misalnya melalui penilaian IPA tertinggi atau penyelesaian PSP tercepat, harus diberikan. Pemberian reward ini tidak hanya menjadi pengakuan atas dedikasi para BMN Warrior, tetapi juga memicu kompetisi positif yang mendorong budaya akuntabilitas.

Perencanaan Kebutuhan (RKBMN) yang Akurat: RKBMN harus disusun secara cermat dan faktual, berpedoman pada prinsip SBSK, untuk memastikan pengadaan barang benar-benar dibutuhkan dan mencegah aset idle.

Penganggaran dan Pemeliharaan yang Efektif: Anggaran terkait BMN harus direncanakan dan dilaksanakan secara efisien. Inspeksi rutin dan pemeliharaan berkala yang terencana adalah wujud tanggung jawab kolektif.

Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) yang Ketat: Peran kepemimpinan Satker harus ditingkatkan melalui sistem Wasdal yang ketat, berkala, dan berjenjang. Wasdal adalah mekanisme kunci untuk mencegah penyalahgunaan dan memitigasi risiko pengelolaan BMN. ♦ kemenag.go.id



IKLAN 1 HALAMAN FC
Rp50.000.000



IKLAN BACK COVER FC
Rp75.000.000



IKLAN 1/2 HALAMAN FC
Rp25.000.000

Media yang Tepat Untuk Promosi Usaha Anda

MOESLIM CHOICE

- ADVERTORIAL/INFORIAL (FC)
- IKLAN 1/2 CENTERSPEAD (FC)
- IKLAN 1/2 FACING PAGES (FC)
- IKLAN 1/2 HALAMAN (FC),
- IKLAN ADVERTORIA L/INFORIAL (FC)
- IKLAN CENTERSPREAD (FC), DI LUAR EDISI KHUSUS
- IKLAN COVER 2 (FC)
- IKLAN COVER 3 (FC)
- IKLAN COVER 4 (FC) 1 HALAMAN
- IKLAN DISPLAY (FC), 1 HALAMAN
- IKLAN HALAMAN 13, 15 & 17 (FC) 1 HALAMAN
- IKLAN HALAMAN 3 (FC) 1 HALAMAN
- IKLAN HALAMAN 5 (FC) 1 HALAMAN

MANFAAT PLUS BERIKLAN DI MAJALAH MOESLIM CHOICE

- Lebih Akurat dengan Target Pesan Iklan Sesuai dengan Topik Bahasan
- Pilihan Halaman Iklan yang mudah disimak Pembaca
- Harga Iklan Bertabur Diskon



IKLAN CENTER SPREAD FC
Rp80.000.000



CONTACT PERSON: NIKEN

021 - 791 96 781
0896 4369 4121

Email: moeslimchoice@gmail.com



MOESLIM CHOICE

HARGA RP. 125.000,-



AMRAN DAN HERMAN DERU MENYIAPKAN CUKUP PANGAN

FESTIVAL
REMPAH
SUMSEL
UNTUK SEMUA

SELEBRITI
BISA SAJA
GAGAL
BERHAJI

FIQIH
KEMITRAAN
BISNIS
KULINER

OLAHRAGA
MUBA
KIAN
BERCAHAYA

RAMBU-RAMBU
FOTOGRAFI
RUANG
TERBUKA